

**EVALUASI KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA DI DESA BLANG
CRUM AKIBAT RELOKASI PENGUNSI MON GEUDONG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Teknik**



Disusun Oleh :
BAHDURSYAH
NIM. 0001060588-66

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2007



EVALUASI KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA DI DESA BLANG CRUM AKIBAT RELOKASI PENGUNGGI MON GEUDONG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Teknik



Disusun Oleh :

BAHDURSYAH

NIM. 0001060588-66

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2007



Kata Pengantar

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan ciptaannya hingga berbilang-bilang, Dia telah memberikan rezeki dan tiada seorang pun lupa, nikmatnya tiada terbilang dan pemberiannya tiada henti. Kemudian shalawat beserta salam hanya untuk utusannya Nabi besar SAW, keluarga da para sahabatnya.

Selama mempersiapkan skripsi yang berjudul “Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana Di Desa Blang Crum Akibat Relokasi Pengungsi Mon Geudong” penulis sungguh merasa berbesar dan berbangga hati karena dukungannya skripsi ini dapat selesai dengan baik, ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Ir. A.Wahid Hasyim, MT dan Ibu Christia Meidiana, ST, M.Eng selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan kepada penulis
2. Ibu Ir. Ismu Rini, MT selaku dosen wali yang selalu memberikan semangat kepada penulis
3. Perangkat desa yang membantu memberikan data-data yang dibutuhkan penulis
4. Staf Poskeslit yang membantu memberikan informasi juga data-data pengungsi Mon Geudong yang dibutuhkan oleh penulis
5. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan doa hingga penulis kuat menghadapi seluruh rintangan dalam penulisan skripsi ini
6. Istri tercinta yang tidak pernah bosan dan selalu setia mendampingi penulis dalam setiap tinta yang tergores untuk skripsi ini
7. Teman-teman 2000 senasib seperjuangan yang selalu saling membantu sampai tetes keringat yang terakhir

Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan terutama kepada penulis sendiri. Penulis juga selalu siap untuk menerima kritik dan saran yang konstruktif demi hasil yang lebih baik lagi.

Malang, 2 Juli 2007

Penulis



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Materi	8
1.3.1 Ruang Lingkup Materi	8
1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah	11
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan	12
1.6 Kegunaan	12
1.7 Sistematika Pembahasan	13
1.8 Kerangka Pemikiran	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Teori Sarana Prasarana	16
2.1.1 Prasarana Jalan	16
2.1.2 Prasarana Sanitasi	18
2.1.3 Prasarana Sampah	18
2.1.4 Prasarana Air Bersih	20
2.1.5 Prasarana Drainase	21
2.1.6 Sarana Pendidikan	24
2.1.7 Sarana Kesehatan	25
2.1.8 Sarana Perdagangan Dan Jasa	26
2.1.9 Sarana Peribadatan	27
2.2 Teori Matrix Fungsi	29
2.2.1 Skalogram	29
2.2.2 Pola Permukiman	29
2.2.3 Indeks Sentralitas	31
2.3 Studi Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Kerangka Metodologi Penelitian	34
3.2 Metode Pengumpulan Data	36
3.2.1 Pengumpulan Data Primer	36
3.2.2 Pengumpulan Data Sekunder	36
3.3 Metode Analisis Data	37
3.3.1 Analisis Matrix Fungsi	37
3.3.2 Analisis Deskriptif	38
3.3.3 Analisis Normatif	40

3.4	Desain Survei.....	44
-----	--------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 45

4.1	Tinjauan Kebijakan Kota Lhokseumawe.....	45
-----	--	----

4.1.1	Kebijakan Bentuk & Pola Penggunaan Lahan.....	45
4.1.2	Kebijakan Karakteristik Kota Lhokseumawe	46
4.1.3	Kebijaksanaan Pengembangan Kependudukan	47
4.1.4	Kebijaksanaan Pengembangan Fisik Dasar	49
4.1.5	Kebijaksanaan Pengembangan Sektor Pembangunan	50
4.1.6	Kebijaksanaan Pusat Pelayanan.....	53
4.1.7	Kebijaksanaan Pengembangan Ruang Kota	53
4.1.8	Kebijaksanaan Pengembangan Transportasi	56
4.1.9	Kebijaksanaan Ruang Terbuka Hijau	57
4.1.10	Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe.....	58
4.1.11	Konsep Tata Ruang Kota Lhokseumawe	59
4.1.12	Kebijakan Penanggulangan Bencana Tsunami.....	60
4.1.13	Kebijakan Pemerintah Mengenai Relokasi Pengungsi.....	61

4.2	Tinjauan Umum Desa Blang Crum	63
-----	-------------------------------------	----

4.2.1	Letak Geografis Dan Administrasi	63
4.2.2	Kondisi Fisik Dasar	65
4.2.3	Tata Guna Lahan	67
4.2.4	Kependudukan Masyarakat Desa Blang Crum	70
4.2.5	Kependudukan Pengungsi Mon Geudong	73

4.3	Analisis Kondisi Eksisting Sarana Prasarana	74
-----	---	----

4.3.1	Matrx Fungsi	74
4.3.2	Analisis Deskriptif.....	73
4.3.2.1	Sarana Pendidikan	77
4.3.2.2	Sarana Kesehatan.....	77
4.3.2.3	Sarana Perdagangan Dan Jasa	82
4.3.2.4	Sarana Peribadatan	83
4.3.2.5	Prasarana Air Bersih.....	87
4.3.2.6	Prasarana Jalan	89
4.3.2.7	Prasarana Drainase	92
4.3.2.8	Prasarana Sanitasi.....	95
4.3.2.2	Prasarana Sampah.....	95

4.4	Analisis Normatif	99
-----	-------------------------	----

4.4.1	Sarana Pendidikan	99
4.4.2	Sarana Kesehatan.....	103
4.4.3	Sarana Perdagangan Dan Jasa	107
4.4.4	Sarana Peribadatan	111
4.4.5	Prasarana Air Bersih.....	114
4.4.6	Prasarana Jalan	116
4.4.7	Prasarana Drainase	119
4.4.8	Prasarana Sanitasi	122
4.4.9	Prasarana Sampah.....	122



BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	126
5.1	Kesimpulan.....	126
5.2	Dan Rekomendasi Saran.....	126
5.2.1	Rekomendasi Studi.....	126
5.2.2	Saran.....	127



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1	Standar Jaringan Jalan..... 18
Tabel 2.2	Parameter Air Bersih..... 21
Tabel 2.3	Standar Kebutuhan Sarana Prasarana Perdesaan & Kota Kecil..... 28
Tabel 4.1	Pola Penggunaan Lahan Di Kota Lhokseumawe Tahun 2002..... 46
Tabel 4.2	Pola Penggunaan Lahan Di Desa Blang Crum 68
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Desa Blang Crum..... 70
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Desa Blang Crum Menurut Umur 70
Tabel 4.5	Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Blang Crum 71
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Tiap Unit Lingkungan Di Desa Blang Crum 71
Tabel 4.7	Jumlah Pengungsi Di Barak Mon Geudong..... 73
Tabel 4.8	Jumlah Pengungsi Mon Geudong Menurut Umur 73
Tabel 4.9	Analisis Jenis Mata Pencaharian Pengungsi Mon Geudong 73
Tabel 4.10	Skalogram Desa Blang Crum Tahun 2006..... 74
Tabel 4.11	Matrix Pola Permukiman Desa Blang Crum Tahun 2006..... 75
Tabel 4.12	Indeks Sentralitas Desa Blang Crum Tahun 2006 76
Tabel 4.13	Analisis Sarana Pendidikan Desa Blang Crum 77
Tabel 4.14	Sarana Balai Pengajian Desa Blang Crum 78
Tabel 4.15	Analisis Sarana Kesehatan Desa Blang Crum 80
Tabel 4.16	Analisis Sarana Perdagangan Dan Jasa Desa Blang Crum 83
Tabel 4.17	Analisis Jaringan Jalan Desa Blang Crum 90
Tabel 4.18	Analisis Jaringan Drainase Desa Blang Crum 92
Tabel 4.19	Analisis Prasarana Sanitasi Desa Blang Crum..... 95
Tabel 4.20	Analisis Kebutuhan TK & SD Desa Blang Crum..... 99
Tabel 4.21	Analisis Kebutuhan SLTP & SMU Desa Blang Crum 99
Tabel 4.22	Analisis Kebutuhan Sarana Kesehatan Desa Blang Crum..... 103
Tabel 4.23	Analisis Kebutuhan Sarana Perdagangan Desa Blang Crum..... 107
Tabel 4.24	Analisis Kebutuhan Sarana Perdagangan Dilokasi Relokasi 108
Tabel 4.25	Analisis Kebutuhan Sarana Peribadatan Desa Blang Crum..... 111
Tabel 4.26	Evaluasi Jaringan Jalan Desa Blang Crum..... 117
Tabel 4.26	Evaluasi Jaringan Drainase Desa Blang Crum..... 120



DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran..... 15
Gambar 3.1	Kerangka Metodologi Penelitian..... 35
Gambar 4.1	Peta Batas Administrasi Desa Blang Crum..... 64
Gambar 4.2	Peta Topografi Desa Blang Crum 66
Gambar 4.3	Peta Tata Guna Lahan Desa Blang Crum 69
Gambar 4.4	Peta Pembagian Unit Lingkungan Desa Blang Crum 72
Gambar 4.5	Foto SDN 18 Muara Dua 78
Gambar 4.6	Foto TK Al Qautsar..... 78
Gambar 4.7	Foto Balai Pengajian Desa Blang Crum..... 78
Gambar 4.8	Peta Eksisting Sarana Pendidikan Desa Blang Crum..... 79
Gambar 4.9	Foto Polindes Desa Blang Crum 80
Gambar 4.10	Peta Eksisting Sarana Kesehatan Desa Blang Crum 81
Gambar 4.11	Foto Warung Desa Blang Crum 83
Gambar 4.12	Foto Kios Desa Blang Crum 83
Gambar 4.13	Peta Eksisting Sarana Perdagangan & Jasa Desa Blang Crum 85
Gambar 4.14	Peta Eksisting Sarana Peribadatan 86
Gambar 4.15	Foto Sumur Desa Blang Crum 87
Gambar 4.16	Peta Eksisting Prasarana Air Bersih Desa Blang Crum 88
Gambar 4.17	Foto Jalan Aspal Desa Blang Crum 90
Gambar 4.18	Foto Jalan Makadam Desa Blang Crum..... 90
Gambar 4.19	Peta Eksisting Jaringan Jalan Desa Blang Crum..... 91
Gambar 4.20	Foto Saluran Parit Beton Desa Blang Crum 93
Gambar 4.21	Foto Saluran Parit Uruk Desa Blang Crum..... 93
Gambar 4.22	Peta Eksisting Jaringan Drainase Desa Blang Crum..... 94
Gambar 4.23	Foto TPS Desa Blang Crum..... 96
Gambar 4.24	Foto Jamban Desa Blang Crum..... 96
Gambar 4.25	Peta Eksisting Sanitasi Desa Blang Crum..... 97
Gambar 4.26	Peta Eksisting Persampahan Desa Blang Crum 98
Gambar 4.27	Peta Evaluasi Sarana Pendidikan Desa Blang Crum..... 101
Gambar 4.28	Peta Persebaran Sarana Pendidikan Kecamatan Muara Dua 102
Gambar 4.29	Peta Evaluasi Sarana Kesehatan Desa Blang Crum 105
Gambar 4.30	Peta Persebaran Rumah Sakit Kecamatan Muara Dua..... 106
Gambar 4.31	Peta Evaluasi Sarana Perdagangan & Jasa Desa Blang Crum 109
Gambar 4.32	Peta Persebaran Pasar Kecamatan Muara Dua..... 110
Gambar 4.33	Peta Evaluasi Sarana Peribadatan Desa Blang Crum..... 112

Gambar 4.34	Peta Persebaran Masjid Kecamatan Muara Dua	113
Gambar 4.35	Peta Evaluasi Prasarana Air Bersih Desa Blang Crum	115
Gambar 4.36	Peta Evaluasi Jaringan Jalan Desa Blang Crum.....	118
Gambar 4.37	Peta Evaluasi Jaringan Drainase Desa Blang Crum.....	121
Gambar 4.38	Peta Evaluasi Sanitasi Desa Blang Crum.....	124
Gambar 4.39	Peta Evaluasi Sampah Desa Blang Crum.....	125



Abstraksi

BAHDURSYAH, 2007 : *Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana Di Desa Blang Crum Akibat Relokasi Pengungsi Mon Geudong*, Dosen Pembimbing : Ir. A.Wahid Hasyim, MT dan Christia Meidiana, ST, M.Eng.

Bencana Tsunami yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat Kota Lhokseumawe baik fisik (perubahan guna lahan serta sarana dan prasana) maupun non fisik (perubahan perekonomian, sistem dan pola hidup serta budaya).

Saat ini ada 189 kepala keluarga dengan 903 jiwa di barak pengungsian Desa Mon Geudong yang membutuhkan permukiman baru yang lebih layak demi kelangsungan hidup mereka (*POSKESLIT Mon Geudong, 2006*).

Oleh karena itu pemerintah menyediakan lokasi untuk relokasi pengungsi Mon Geudong di Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua. Lahan yang disediakan oleh pemerintah untuk 189 KK pengungsi Mon Geudong adalah 50.995 m². Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan Desa Blang Crum sebagai lokasi relokasi pengungsi karena desa ini memenuhi 6 kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu segi ketersediaan lahan, segi topografi lahan, segi aksesibilitas, segi biaya pembebasan lahan, segi ketersediaan fasilitas umum serta segi ketersediaan sarana dan prasarana.

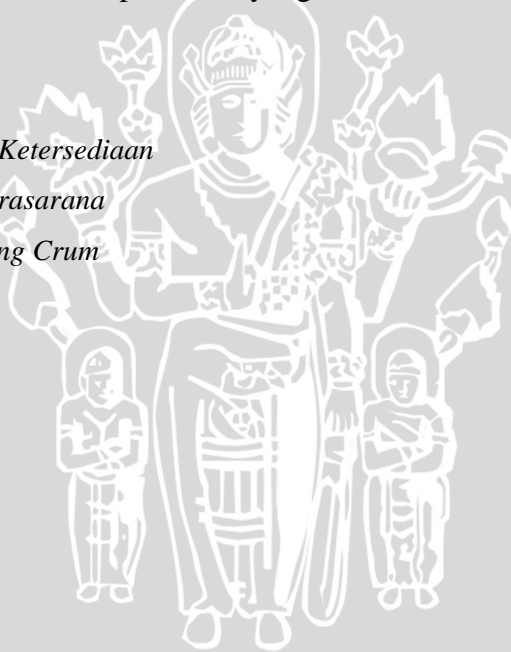
Setiap sarana prasarana memiliki standar masing-masing dalam segi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Setiap sarana prasarana memiliki skala pelayanan masing-masing serta jumlah penduduk yang dilayaninya. Dalam penelitian ini, sarana prasarana yang akan dievaluasi adalah sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan dan jasa, sarana peribadatan, prasarana air bersih, prasarana jalan, prasarana drainase, prasarana sanitasi serta prasarana sampah.

Di Desa Blang Crum terdapat sarana pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar (SD). Selain itu juga terdapat sarana pendidikan informal yang berupa balai pengajian. Untuk sarana kesehatan juga tersedia sebuah Polindes dan praktek bidan desa. Terdapat juga beberapa buah warung dan kios yang melayani kebutuhan sembako masyarakat Desa Blang Crum. Sebagai desa dengan mayoritas beragama Islam, di Desa Blang Crum juga terdapat sebuah Mushalla yang digunakan masyarakat untuk beribadah.

Untuk prasarana air bersih masyarakat mendapatkannya dari sumur yang terdapat dimasing-masing rumah. Desa Blang Crum juga telah dibangun jalan oleh pemerintah walau sebagian masih berjenis makadam dan terdapat saluran drainase disepanjang jalan baik yang berupa parit beton maupun parit yang diuruk sendiri oleh masyarakat. Sanitasi masyarakat juga termasuk baik karena semua rumah telah memiliki jamban sendiri dengan septik tank ditiap-tiap rumah. Selain itu juga terdapat sebuah TPS yang digunakan untuk menampung sampah masyarakat Desa Blang Crum.

Oleh karena itu, penulis menganalisis kondisi eksisting sarana prasarana Desa Blang Crum dengan menggunakan Analisis Deskriptif dan Matrix Fungsi.. Kemudian menghitung jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penduduk di Desa Blang Crum setelah bertambah dengan pengungsi Mon Geudong. Kemudian menggunakan standar Departemen PU untuk Prasarana Dan Sarana Perdesaan Dan Kota Kecil, mengevaluasi ketersediaan sarana prasarana yang tersedia di Desa Blang Crum.

Kata kunci :
- *Evaluasi Ketersediaan*
- *Sarana Prasarana*
- *Desa Blang Crum*



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 26 Desember 2004, terjadi sebuah gempa bumi besar di Nanggroe Aceh Darussalam. Gempa bumi tersebut disusul dengan terjadinya gelombang tsunami yang menghancurkan sebahagian besar pantai Barat dan Utara Nanggroe Aceh Darussalam. Gempa itu terjadi pukul 00:58:50 (UTC) atau pukul 06:58:50 waktu lokal di episentrum. Peristiwa gempa dengan kekuatan 9,0 magnitud (USGS), menurut BMG 6,8 pada skala Richter, berlokasi di lepas pantai barat Sumatera bagian utara, 3,298 Lintang Utara, 95,779 Bujur Timur, pada kedalaman 10 km, berjarak 250 km Selatan Barat Daya dari Banda Aceh dan 320 km barat dari Medan, Sumatera Utara (*Satgas Penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami di Provinsi NAD dan Sumut Bid PU, 31 Maret 2005*)

Hampir dua tahun peristiwa tsunami yang memporak-porandakan Aceh berlalu. Namun kerusakan yang ditimbulkannya masih terlihat sampai hari ini. Hingga kini lebih 67.000 korban tsunami masih bertahan hidup di dalam kawasan pengungsian yang kumuh dan minim fasilitas sanitasi itu. Kini perbaikan sarana dan prasarana telah dan sedang dilakukan berbagai pihak, pemerintah, NGO, dan negara-negara donor. Pemerintah pusat pun telah merespons musibah terbesar secara nasional tersebut dengan membentuk sebuah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Demikian pula yang dilakukan pemerintah daerah di tengah kendala teknisnya akibat gempa dan gelombang tsunami. Komitmen pemerintah pusat diwujudkan dalam bentuk anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang diplotkan melalui BRR dan kementerian/lembaga terkait sebesar Rp Rp 8,4 trilyun tahun 2005 dan Rp 13 trilyun untuk tahun 2006 (*Media Center Aceh, 5 Desember 2005*).

Di Kota Lhokseumawe terdapat 3 kecamatan yaitu Banda Sakti, Blang Mangat dan Muara Dua. Tetapi hanya dua kecamatan saja yang terkena dampak bencana tsunami yaitu Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Blang Mangat. Di Kecamatan Banda Sakti yang terkena tsunami ada 3 desa yaitu Pusong Lama, Pusong Baru dan Keudee Aceh. Sedangkan di Kecamatan Blang Mangat terdapat

7 buah desa yaitu Desa Kuala, Jambo Timu, Jambo Masjid dan Blang Cut, Tunong, Blang Teu dan Baloy (*POSKESLIT Desa Mon Geudong, 2006*).

Desa yang kondisinya cukup parah akibat terkena bencana tsunami yang dasyat tersebut di Kota Lhokseumawe adalah Desa Pusong Lama dan Pusong Baru. Desa Pusong Lama dan Pusong Baru yang berada dipesisir pantai Utara Kota Lhokseumawe yang juga merupakan salah satu pusat kegiatan masyarakat Kota Lhokseumawe. Mata pencaharian masyarakat Desa Pusong Lama dan Pusong Baru pada umumnya adalah nelayan dan pedagang. Mereka memilih bertempat tinggal dipesisir pantai sehingga mereka dapat lebih mudah dan murah dalam mencapai ke tempat mereka bekerja.

Ada beberapa dimensi yang bergerak paralel dengan mobilitas tempat tinggal, salah satunya adalah dimensi lokasi, yang mengacu pada tempat-tempat tertentu suatu kota yang dianggap paling cocok untuk tempat tinggal dalam kondisi dirinya. Kondisi diri manusia tersebut ditekankan pada penghasilan dan siklus kehidupannya. Lokasi dalam konteks pemilihan lokasi bermukim berkaitan erat dengan jarak terhadap tempat kerja (*accessibility to employment*). Perspektif pemilihan lokasi bermukim sering diistilahkan sebagai “*geophysical space*” (*John Turner, 1968*).

Walaupun tidak sampai meratakan seluruh rumah dengan tanah, bencana tsunami tersebut telah menghancurkan sarana dan prasarana yang ada seperti jalan. Jenis jalan di desa yang terkena bencana tsunami pada umumnya termasuk dalam jenis jalan lokal. Kerusakan terjadi hampir diseluruh ruas jalan yang ada di desa tersebut. Prasarana lain yang rusak seperti permukiman, tempat pembuangan sampah dan beberapa jaringan drainase. Bencana Tsunami tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat di desa tersebut.

Kerusakan lain yang juga ditimbulkan oleh bencana tsunami tersebut yaitu banyak sekali masyarakat yang pada umumnya nelayan tradisional dan pedagang kecil yang kehilangan tempat tinggal serta mata pencahariannya yang menjadi faktor utama mereka dalam bertahan hidup. Bencana tsunami juga merusakkan hampir semua perahu nelayan sehingga sangat menyulitkan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada ikan di laut. Karena pada umumnya penduduk di

desa yang terkena tsunami tersebut adalah bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional.

Pasca tsunami, sebagai bantuan awal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah merelokasi masyarakat di tiga desa tersebut ke beberapa barak pengungsian, antara lain adalah barak pengungsian yang berada di Desa Mon Geudong. Di barak pengungsian ini terdapat 189 kepala keluarga dengan 903 jiwa. Sedangkan jumlah pengungsi yang berada di barak pengungsian Kecamatan Blang Mangat adalah 1035 jiwa (*POSKESLIT Desa Mon Geudong, 2006*).

Untuk memulihkan kehidupan masyarakat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya dan Kota Lhokseumawe pada khususnya, Departemen Pekerjaan Umum telah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami di Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam dan Sumatera Utara Bidang Pekerjaan Umum, melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 21/KPTS/M/2004, dengan tugas utamanya adalah memantau dan memprogramkan pelaksanaan :

1. tahap tanggap darurat, yang dilaksanakan 3 bulan dari awal kejadian sampai dengan 26 Maret 2005.
2. tahap rehabilitasi, dilaksanakan pada tahun 2005 dan 2006.
3. tahap rekonstruksi, akan berjalan mulai paruh kedua tahun 2005 s/d 2009.

Tahap tanggap darurat adalah tahapan pertama dari program pemerintah. Tahap ini dilaksanakan 3 bulan dari awal kejadian sampai dengan 26 Maret 2005. Kegiatan difokuskan pada :

- Pembersihan sampah dan puing-puing bangunan serta pembukaan ruas-ruas jalan yang tertutup/ putus.
- Mengevakuasi korban.
- Penyediaan barak-barak untuk para pengungsi yang dilengkapi dengan ruang serba guna, prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, dan jalan lingkungan.

Tahap pertama tersebut telah dijalankan oleh pemerintah, NGO, dan LSM dengan segala daya upaya yang dimilikinya. Sekarang memasuki tahap kedua. Tahap ini dilaksanakan pada tahun 2005 dan tahun 2006. Program dalam tahap pertama yaitu:

- Dalam tahap ini dilakukan perbaikan infrastruktur PU dan permukiman agar berfungsi kembali secara minimal.
- Apabila perbaikan tidak memungkinkan, maka akan diantisipasi pemindahan atau relokasi infrastruktur PU dan permukiman yang mengalami kerusakan total.

Tahap ketiga pada program pemerintah ini akan berjalan mulai paruh kedua tahun 2005 s/d 2009. Program dalam tahap ketiga ini yaitu :

- Merupakan tahap akhir dari penanggulangan bencana gempa dan tsunami yaitu pemulihan total seluruh kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
- Mengingat kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi tahap ini, maka diperlukan dukungan perencanaan tata ruang yang telah memperhitungkan aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya masyarakat.

Untuk menangani masalah pengungsi Mon Geudong, Pemerintah Kota Lhokseumawe membuat suatu kebijakan relokasi pengungsi. Dalam kebijakan pemerintah tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe menetapkan Desa Blang Crum yang termasuk ke dalam Kecamatan Muara Dua sebagai lokasi relokasi pengungsi Mon Geudong. Kriteria pemerintah dalam memilih Desa Blang Crum sebagai lokasi relokasi adalah (*BAPEKOT Lhokseumawe, 2006*):

1. Dari segi ketersediaan lahan

Untuk memindahkan 189 KK atau 903 jiwa pengungsi Mon Geudong maka pemerintah harus menyediakan lahan yang cukup luas karena pengungsi tersebut harus ditempatkan di satu tempat. Mereka tidak mau kalau harus dipisahkan satu sama lain. Lahan yang direncanakan oleh pemerintah adalah 50.995 m².

2. Dari segi topografi lahan

Untuk meminimalkan biaya dan mempermudah pembangunan suatu permukiman baru maka permukiman tersebut harus diletakkan pada lokasi yang memiliki topografi relatif datar. Selain dapat meminimalkan biaya pemerintah untuk meratakan lahan tersebut, lokasi permukiman yang berada di lokasi yang memiliki topografi yang relatif datar akan lebih terhindar dari bencana seperti tanah longsor.

Selain itu Desa Blang Crum juga memiliki kelebihan lain yaitu lokasinya berada dekat dengan Sungai Meuraksa sehingga memudahkan dalam perencanaan jaringan drainase. Selain itu juga desa dekat dengan Laut Selat Malaka, hal ini sangat menguntungkan para pengunjung karena karakteristik pengunjung pada umumnya adalah nelayan.

3. Dari segi aksesibilitas

Dari segi aksesibilitas, Desa Blang Crum memiliki beberapa keuntungan, yaitu selain berada dipinggir jalan provinsi (jalan Medan – Banda Aceh), desa juga sudah dilewati oleh angkutan umum, sehingga dapat memudahkan para pengunjung untuk melakukan aktifitas mereka sehari-hari.

4. Dari segi biaya pembebasan lahan

Harga tanah di Kota Lhokseumawe sangat berfaedah. Semakin dekat dengan pusat kota maka akan semakin mahal harga jual lahan tersebut. Oleh karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah, sedangkan pemerintah harus membebaskan lahan yang cukup luas untuk relokasi pengunjung yaitu 50.995 m^2 , maka pemerintah harus mencari lokasi yang biaya pembebasan lahannya sesuai dengan kemampuan pemerintah. Setelah melalui beberapa dialog dan musyawarah dengan masyarakat Desa Blang Crum maka harga pembebasan lahan yang disepakati bersama adalah Rp.27.500,- per meter persegi.

5. Dari segi ketersediaan fasilitas umum

Salah satu syarat lokasi permukiman yang baik adalah memiliki atau dekat dengan berbagai macam fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Lhokseumawe memilih Desa Blang Crum karena desa

tersebut dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia yang berada di Desa Bukit Rata dan juga dekat dengan fasilitas pendidikan seperti SD Negeri 18 Muara Dua, SLTP Negeri Kandang, AKPER dan AKBID Negeri dan swasta milik Yayasan Muhammadiyah, serta Politeknik Negeri Bukit Rata.

6. Dari segi ketersediaan sarana dan prasarana

Melihat dari segi sarana dan prasarannya, kondisi sarana dan prasarana yang telah ada di Desa Blang Crum telah memadai dan cukup untuk melayani masyarakat desa tersebut. Seperti telah tersedianya prasarana persampahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga prasarana lainnya. Oleh karena itu dengan penambahan jumlah penduduk akibat relokasi pengungsi maka pemerintah juga akan meningkatkan jumlah dan pelayanan sarana prasarana bagi masyarakat bila jumlah yang telah ada tidak mencukupi kebutuhan masyarakat tersebut.

Sesuai dengan program pemerintah dalam pemulihan kondisi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya dan pengungsi di Kecamatan Banda Sakti pada khususnya, maka penelitian dititikberatkan pada program pemerintah tahap kedua dan ketiga yang salah satunya yaitu merelokasi pengungsi ke permukiman baru yang lebih permanen.

Oleh karena itu pemerintah menyediakan lokasi untuk relokasi pengungsi Mon Geudong di Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua. Lahan yang disediakan oleh pemerintah untuk 189 KK pengungsi Mon Geudong adalah 50.995 m². Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan Desa Blang Crum sebagai lokasi relokasi pengungsi karena desa ini memenuhi 6 kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu segi ketersediaan lahan, segi topografi lahan, segi aksesibilitas, segi biaya pembebasan lahan, segi ketersediaan fasilitas umum serta segi ketersediaan sarana dan prasarana.

Setiap sarana prasarana memiliki standar masing-masing dalam segi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Setiap sarana prasarana memiliki skala pelayanan masing-masing serta jumlah penduduk yang dilayaninya. Dalam penelitian ini, sarana prasarana yang akan dievaluasi adalah sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan dan jasa, sarana peribadatan, prasarana air

bersih, prasarana jalan, prasarana drainase, prasarana sanitasi serta prasarana sampah.

Untuk prasarana air bersih masyarakat mendapatkannya dari sumur yang terdapat dimasing-masing rumah. Desa Blang Crum juga telah dibangun jalan oleh pemerintah walau sebagian masih berjenis makadam dan terdapat saluran drainase disepanjang jalan baik yang berupa parit beton maupun parit yang diuruk sendiri oleh masyarakat. Sanitasi masyarakat juga termasuk baik karena semua rumah telah memiliki jamban sendiri dengan septik tank ditiap-tiap rumah. Selain itu juga terdapat sebuah TPS yang digunakan untuk menampung sampah masyarakat Desa Blang Crum.

Desa Blang Crum telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lokasi relokasi, maka penulis tidak akan menganalisis lagi kondisi fisik dasar serta kemampuan lahan Desa Blang Crum untuk dijadikan lokasi relokasi. Dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk, tentu biasanya diikuti oleh peningkatan kebutuhan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, penulis mengevaluasi apakah sarana prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah cukup untuk melayani penduduk Desa Blang Crum setelah bertambah dengan pengungsi Mon Geudong. Dasar yang menjadi tolak ukur perbandingan antara sarana prasarana yang telah tersedia dengan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Blang Crum setelah bertambah dengan pengungsi Mon Geudong adalah Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana Dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan Dan Kota Kecil, Depatemen PU. Kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah sehingga taraf hidup pengungsi dan penduduk Desa Blang Crum bisa lebih baik lagi dengan terpenuhi semua sarana prasarana yang dibutuhkan.

1.2. Identifikasi Masalah

- Pemerintah Kota Lhokseumawe berencana untuk merelokasi 189 kepala keluarga dengan 903 jiwa yang saat ini berada di barak pengungsian Desa Mon Geudong ke lokasi relokasi yang berada di Desa Blang Crum karena barak pengungsian sudah tidak layak huni lagi.
- Sarana prasarana yang telah tersedia selama ini di Desa Blang Crum hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduk Desa Blang Crum itu sendiri.

Setelah terjadi penambahan penduduk akibat relokasi pengungsi Mon Geudong, maka beberapa sarana prasarana perlu ditambah jumlahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan penduduk Desa Blang Crum dan pengungsi Mon Geudong.

1.3. Batasan Materi

1.3.1. Ruang Lingkup Materi

Sebagai langkah awal, maka akan dibuat batasan materi yang akan dibahas dalam penelitian “Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana Di Desa Blang Crum Akibat Relokasi Pengungsi Mon Geudong” agar proses pembahasan maupun analisis yang akan dilakukan tidak menyimpang dari tujuan studi.

Batasan materinya adalah menganalisis kondisi eksisting sarana prasarana yang ada di Desa Blang Crum kemudian mengevaluasi sarana dan prasarana tersebut apakah dapat memenuhi kebutuhan penduduk Desa Blang Crum setelah bertambah dengan pengungsi mon Geudong dengan cara membandingkannya dengan standar sarana prasarana Dep. PU untuk Perdesaan dan Kota Kecil. Materi permasalahan yang dimaksud dapat diuraikan, sebagai berikut:

- **Analisis Kondisi Eksisting Sarana Prasarana Di Desa Blang Crum**

Dalam analisis sarana prasarana yang akan dibahas antara lain:

- **Sarana Pendidikan**

Menganalisis kondisi eksisting sarana tersebut meliputi jenis sarana yang tersedia di Desa Blang Crum, kondisi fisik bangunan, skala pelayanannya serta jumlahnya.

- **Sarana Kesehatan**

Menganalisis kondisi eksisting sarana tersebut meliputi jenis sarana yang tersedia di Desa Blang Crum, kondisi fisik bangunan, skala pelayanannya serta jumlahnya.

- **Sarana Perdagangan Dan Jasa**

Menganalisis kondisi eksisting sarana tersebut meliputi jenis sarana yang tersedia di Desa Blang Crum, kondisi fisik bangunan, skala pelayanannya serta jumlahnya.

- **Sarana Peribadatan**

Menganalisis kondisi eksisting sarana tersebut meliputi jenis sarana yang tersedia di Desa Blang Crum, kondisi fisik bangunan, skala pelayanannya serta jumlahnya.

- **Prasarana Air Bersih**

Tahapan analisis pada prasarana air bersih, pertama-tama akan dianalisis kondisi eksistingnya meliputi sumber air bersih di Desa Blang Crum dan kondisi air yang dikonsumsi oleh masyarakat dari segi rasa, bau dan warna.

- **Prasarana Jalan**

Tahapan analisis pada prasarana jalan, pertama-tama akan dianalisis kondisi eksisting jalan termasuk panjang jalan, jenis jalan serta kondisi perkerasan jalan.

- **Prasarana Drainase**

Tahapan analisis pada prasarana drainase, pertama-tama akan dianalisis kondisi eksisting saluran drainase termasuk panjang saluran drainase, jenis serta kondisi saluran drainase.

- **Prasarana Sanitasi**

Untuk prasarana sanitasi, pertama-tama akan dianalisis jumlah jamban umum dan pribadi di Desa Blang Crum, kondisi jamban dimasing-masing rumah, dan letak jamban.

- **Prasarana Sampah**

Untuk prasarana sampah, pertama-tama akan dihitung jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk Desa Blang Crum dan pengungsi Mon Geudong, volume bak penampungan sampah dan sistem pengangkutan sampah dari rumah ke TPS.

• **Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana Di Desa Blang Crum**

- **Sarana Pendidikan**

Setelah terjadi penambahan penduduk di Desa Blang Crum akibat relokasi pengungsi Mon Geudong, maka kemudian dievaluasi ketersediaannya dengan cara membandingkan antara jumlah sarana yang tersedia di Desa Blang Crum dengan standar Sarana Prasarana Dep.PU untuk Perdesaan dan Kota Kecil. Dan bila sarana yang dibutuhkan tidak tersedia di Desa Blang Crum maka dimana masyarakat dapat mendapatkan sarana tersebut yang terdekat.

- **Sarana Kesehatan**

Setelah terjadi penambahan penduduk di Desa Blang Crum akibat relokasi pengungsi Mon Geudong, maka kemudian dievaluasi ketersediaannya dengan cara membandingkan antara jumlah sarana yang tersedia di Desa Blang Crum dengan standar Sarana Prasarana Dep.PU untuk Perdesaan dan Kota Kecil. Dan bila sarana yang dibutuhkan tidak tersedia di Desa Blang Crum maka dimana masyarakat dapat mendapatkan sarana tersebut yang terdekat.

- **Sarana Perdagangan Dan Jasa**

Setelah terjadi penambahan penduduk di Desa Blang Crum akibat relokasi pengungsi Mon Geudong, maka kemudian dievaluasi ketersediaannya dengan cara membandingkan antara jumlah sarana yang tersedia di Desa Blang Crum dengan standar Sarana Prasarana Dep.PU untuk Perdesaan dan Kota Kecil. Dan bila sarana yang dibutuhkan tidak tersedia di Desa Blang Crum maka dimana masyarakat dapat mendapatkan sarana tersebut yang terdekat.

- **Sarana Peribadatan**

Setelah terjadi penambahan penduduk di Desa Blang Crum akibat relokasi pengungsi Mon Geudong, maka kemudian dievaluasi ketersediaannya dengan cara membandingkan antara jumlah sarana yang tersedia di Desa Blang Crum dengan standar Sarana Prasarana Dep.PU untuk Perdesaan dan Kota Kecil. Dan bila sarana yang dibutuhkan tidak tersedia di Desa Blang Crum maka dimana masyarakat dapat mendapatkan sarana tersebut yang terdekat.

- **Prasarana Air Bersih**

Setelah menganalisis kondisi eksisting kemudian mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai sumber air bersih terhadap rencana relokasi pengungsi Mon Geudong.

- **Prasarana Jalan**

Setelah menganalisis kondisi eksisting jalan kemudian mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai jaringan jalan terhadap rencana relokasi pengungsi Mon Geudong.

- **Prasarana Drainase**

Setelah menganalisis kondisi eksisting saluran drainase kemudian mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai jaringan drainase terhadap rencana relokasi pengungsi Mon Geudong.

- **Prasarana Sanitasi**

Setelah menganalisis kondisi eksisting sanitasi kemudian mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai prasarana sanitasi tersebut terhadap rencana relokasi pengungsi Mon Geudong.

- **Prasarana Sampah**

Setelah menganalisis kondisi eksisting persampahan kemudian mengevaluasi apakah TPS tersebut masih mampu melayani sampah rumah tangga masyarakat. Kemudian juga mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

• **Yang tidak dibahas dalam penelitian ini adalah:**

Lokasi-lokasi lain yang di Desa Blang Crum yang mungkin juga dapat dijadikan lokasi relokasi.

1.3.2. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian “Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana Di Desa Blang Crum Akibat Relokasi Pengungsi Mon Geudong” adalah Desa Blang Crum yang berada di Kecamatan Muara Dua Kota Lhoksemawe.

Batas wilayah Desa Blang Crum adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Krueng Meuraksa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blang Buloh/Cot Mamplam
- Sebelah Barat berbatasan dengan Meunasah Manyang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Alue Awe

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa masalah yang terkait dengan studi “Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana Di Desa Blang Crum Akibat Relokasi Pengungsi Mon Geudong”, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi eksisting sarana prasarana yang telah tersedia di Desa Blang Crum?
2. Apakah sarana prasarana yang telah tersedia di Desa Blang Crum mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduk Desa Blang Crum dan pengungsi Mon Geudong?

1.5. Tujuan

Tujuan penyusunan penelitian “Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana Di Desa Blang Crum Akibat Relokasi Pengungsi Mon Geudong” adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kondisi eksisting sarana prasarana yang telah tersedia di Desa Blang Crum.
2. Mengetahui ketersediaan sarana prasarana di Desa Blang Crum dalam memenuhi kebutuhan penduduk Desa Blang Crum dan pengungsi Mon Geudong.

1.6. Kegunaan

Kegunaan atau manfaat dari penelitian “Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana Di Desa Blang Crum Akibat Relokasi Pengungsi Mon Geudong” antara lain:

1. Bagi peneliti

Sebagai wacana ilmiah perencanaan kota dan aplikasi konsep pengembangan wilayah dengan pendekatan standar jumlah kebutuhan sarana prasarana serta dapat menambah wawasan dan referensi tentang perencanaan wilayah dan kota.

2. Bagi mahasiswa dan akademisi

Sebagai masukan terhadap ilmu perkotaan khususnya perencanaan wilayah dan kota.

3. Bagi pemerintah daerah

Memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa rekomendasi dan bahan pertimbangan khususnya bagi dinas terkait seperti Dinas Kimpraswil dan Dinas PU.

4. Bagi masyarakat

Sebagai informasi dan wacana ilmiah perencanaan wilayah dan kota dan pengetahuan mengenai pengembangan wilayah kawasan Kota Lhokseumawe.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dari penelitian “Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana Di Desa Blang Crum Akibat Relokasi Pengungsi Mon Geudong”, terdiri dari:

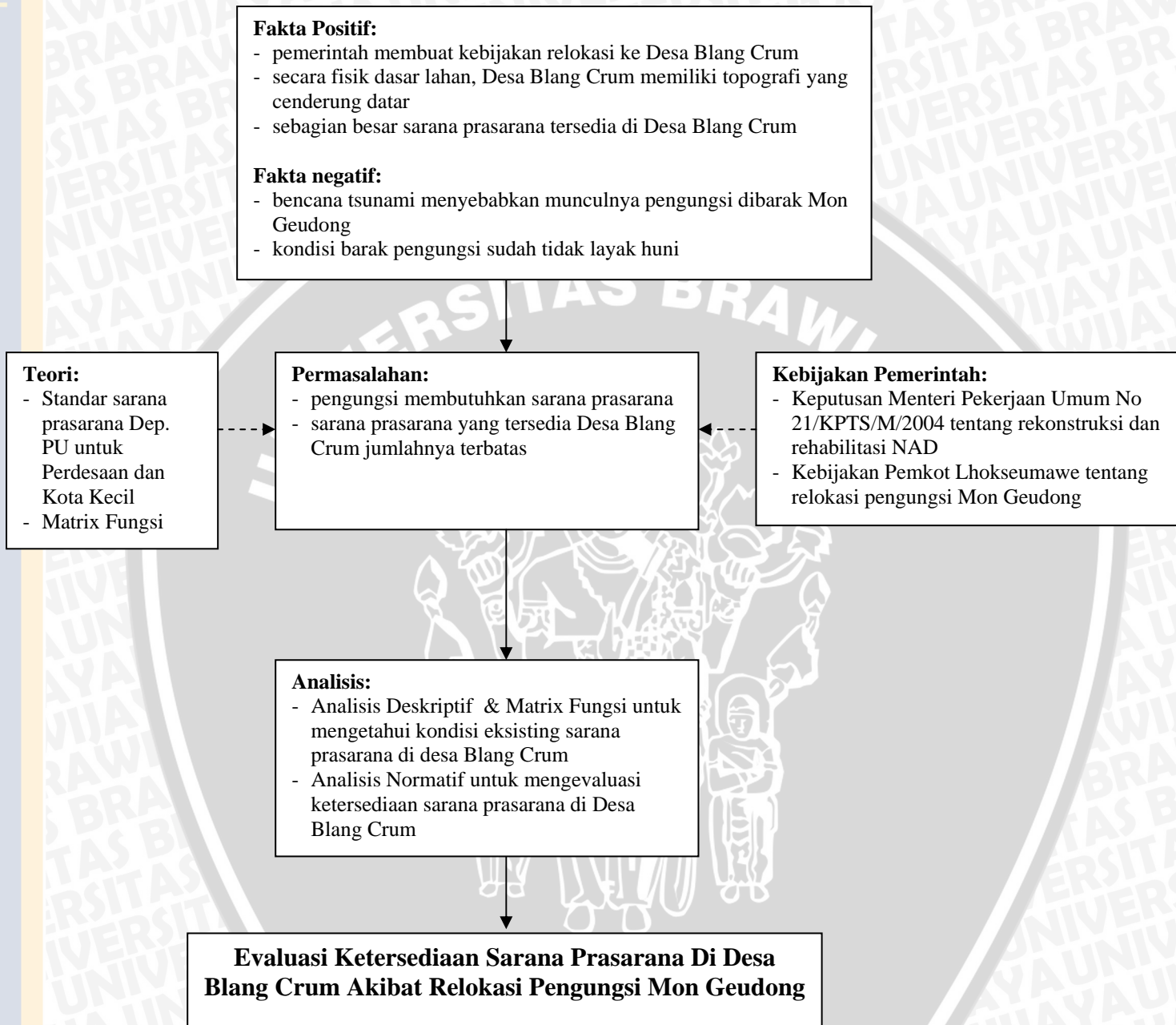
- Bab I** : Pendahuluan
Berisi Latar Belakang dari penelitian, Identifikasi, Batasan masalah dan Ruang Lingkup Wilayah, Rumusan masalah, Tujuan, Manfaat Perencanaan dan Sistematika Pembahasan.
- Bab II** : Tinjauan Pustaka
Berisi teori-teori yang mendasari studi ini yang berasal dari literatur serta berbagai media informasi, penelitian, seminar dan lainnya yang digunakan sebagai dasar untuk meneliti “Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana Di Desa Blang Crum Akibat Relokasi Pengungsi Mon Geudong”.
- Bab III** : Metode Penelitian
Berisi metode-metode baik metode kualitatif maupun kuantitatif yang digunakan untuk analisis “Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana Di Desa Blang Crum Akibat Relokasi Pengungsi Mon Geudong” yang terdiri dari analisis matrix fungsi dan analisis deskriptif untuk menganalisis kondisi eksisting sarana prasarana serta analisis normatif untuk mengevaluasi ketersediaan sarana prasarana di Desa Blang Crum.
- BAB IV** : Hasil dan pembahasan
Berisikan gambaran umum Kota Lhokseumawe dan gambaran umum wilayah studi. Selain itu juga berisi hasil analisis kondisi eksisting sarana prasarana di Desa Blang Crum serta evaluasi ketersediaan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan pengungsi di Desa Blang Crum.
- BAB V** : Kesimpulan dan saran
Berisikan kesimpulan dan saran dari kajian “Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana Di Desa Blang Crum Akibat Relokasi Pengungsi Mon Geudong”.

1.8. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah tahapan atau langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah proses studi perencanaan. Kerangka pemikiran dapat memberikan gambaran langkah-langkah studi secara sistematis supaya proses studi menjadi lebih terarah. (**Lihat Gambar 1.1**).



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Sarana Prasarana

2.1.1. Prasarana Jalan

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1980: jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang di peruntukan bagi lalu lintas.

Berdasarkan jenisnya jalan terbagi menjadi:

1. Jalan Arteri (Jalan Mayor)

Yaitu jalan yang melayani angkutan umum dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi dengan efisien.

2. Jalan Kolektor (Jalan Minor)

Yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan kecepatan sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

3. Jalan Lokal (Jalan Minor)

Yaitu jalan yang mengalami angkutan setempat dengan perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 adalah sebagai berikut :

1. Sistem Jalan Primer

Jalan primer adalah suatu jalan yang berguna untuk menghubungkan kota jenjang kesatu dengan jenjang kedua, ketiga dan jenjang dibawahnya di dalam suatu wilayah pengembangan.

Sistem jaringan jalan primer dapat di bagi :

■ Jalan Arteri Primer

Adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan jenjang kedua, jalan ini dapat direncanakan untuk kecepatan paling rendah 60 km/ jam dengan lebar badan jalan lebih dari 9 m.

■ Jalan Kolektor Primer

Adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua lainnya dan kota jenjang kedua dengan jenjang ketiga. Jalan ini di

rencanakan untuk kecepatan paling rendah 40 km/jam dengan lebar badan jalan lebih dari 7 m.

- **Jalan Lokal Primer**

Adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu/kedua/ketiga dengan persil. Jalan primer ini direncanakan untuk kecepatan paling rendah 20 km/jam dengan lebar badan jalan lebih dari 6 m.

2. Sistem Jalan Sekunder

Sistem jalan sekunder disusun mengikuti ketentuan peraturan tata ruang kota yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer sekunder, sekunder kedua dan seterusnya sampai pada perumahan.

- **Jalan Arteri Sekunder,**

Adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. Jalan arteri direncanakan berdasarkan kecepatan paling rendah 30 km/jam dengan lebar jalan lebih dari 8 m.

- **Jalan Kolektor Sekunder,**

Adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder lainnya, atau kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder ketiga. Jalan ini direncanakan berdasarkan kecepatan paling rendah 20 km/jam dengan lebar badan jalan lebih dari 7 m.

- **Jalan Lokal Sekunder,**

Adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan perumahan, atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan. Jalan ini direncanakan berdasarkan kecepatan paling rendah 10 km/jam dengan lebar badan jalan lebih dari 3,5 m. Jalan lokal itu sendiri terbagi dalam 2 macam:

1. Jalan Lokal Sekunder 1

- a. Jalan setapak, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kakai dan kendaraan beroda dua, dengan lebar jalan minimal 2 meter dan maksimal 3 meter.

- b. Jalan Kendaraan, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor, beroda dua dan tiga serta dimungkinkan bagi kendaraan beroda empat dengan lebar jalan minimal 3,5 meter dan maksimal 5 meter.

2. Jalan Lokal Sekunder 2

Jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda tiga atau lebih dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 5 meter.

Tabel 2.1
Standar Jaringan Jalan

Hirarki Jalan	Persyaratan				Batas Luas
	Kecepatan	Lebar Jalan	Tinggi Ruang Bebas	Kedalamam	
Kolektor Sekunder	20 km/jam	± 7 meter	-	-	Dari As + 7m
Lokal Sekunder	10 km/jam	± 5 meter	-	-	Dari As + 4m

Sumber: Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana Dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan Dan Kota Kecil, Departemen Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pebruari, 2000

2.1.2. Prasarana Sanitasi

Sanitasi menurut (Kalbermatten, 1987: 80) adalah usaha untuk mendapatkan kondisi yang sehat dalam pengaturan pembuangan kotoran manusia atau adalah cara pembuangan yang memenuhi aspek-aspek kesahatan lingkungan. Macam istilah sanitasi antara lain:

- a. Toilet atau WC adalah istiilah macam fasilitas sanitasi yang lebih maju dari jamban atau kakus, seperti adanya unit air perapat dan tangki peresapan atau yang lain.
- b. Jamban atau kakus adalah istilah sanitasi yang sangat sederhana, dapat terdiri dari plat jongkok dan lubang dibawahnya (langsung atau didalam tanah).

2.1.3. Prasarana Sampah

Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi sosial ekonomi tidak harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan gangguan pada kelestarian alam.

Sampah memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Bahan sisa, baik bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi (barang bekas) maupun bahan yang sudah diambil bagian untamanya.
- b. Dari segi sosial ekonomi, sampah adalah bahan-bahan yang sudah tidak ada harganya
- c. Dari segi lingkungan, sampah adalah bahan buangan yang sudah tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan pada kelestarian lingkungan.

Menurut standar pengelolaan persampahan Departemen Pekerjaan Umum Cipta Karya Tahun 2000 bahwa setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan suatu sistem pembuangan sampah yang aman dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi tempat pembuangan sampah. Fasilitas dalam pengumpulan sampah dibedakan antara sampah untuk masing-masing rumah tangga dan tempat pengumpulan sampah untuk lingkungan perumahan pedesaan dan kota kecil, yaitu sebagai berikut:

1. Fasilitas pengumpulan sampah rumah tangga.
 - a. Kapasitas minimum tempat sampah rumah tangga 40 liter berdasarkan jumlah orang dan banyaknya uangan sampah untuk saluran lingkungan perumahan pedesaan dan kota kecil yakni 2.5 sampai 2.75 liter/orang/hari.
 - b. Tempat sampah dibuat dari bahan rapat air.
 - c. Penempatannya sedemikian rupa, sehingga mudah dicapai oleh petugas kebersihan dan tidak mengganggu lalu lintas.
2. Tempat pengumpulan sampah lingkungan perumahan pedesaan dan kota kecil.
 - a. Kapasitas tempat sampah lingkungan minimum bervolume 2 m³ berdasarkan jumlah yang dilayani 200 rumah.
 - b. Tempat sampah dibuat dari bahan rapat air dan dapat berupa ruang.
 - c. Terbuka yang bisa menempatkan satu sampai dua kontainer kapasitas 6 m³.

Untuk pembakaran sampah harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Sebelum sampah dibakar terlebih dahulu dilakukan pemisahan bahan-bahan yang tidak dapat dibakar.
- b. Pembakaran harus dilakukan setiap hari.

3. Potensi Sampah (Q_k)

Untuk perhitungan potensi volume sampah yang dihasilkan penduduk digunakan pendekatan dengan menggunakan rumus:

$$Q_k = q \times p$$

Dimana:

Q_k : potensi volume sampah yang dihasilkan

q : koefisien kuantitas sampah (liter/orang/hari)

dengan ketentuan:

$q = 2.5 - 2.75$ lt/orang/hari; untuk ekonomi rendah

p = jumlah penduduk

Menurut SK SNI 19-2454-2002, Tata cara dalam pengumpulan sampah sebagai berikut; Pola pengumpulan individual tidak langsung adalah cara pengumpulan sampah dari masing-masing sumber sampah dibawa ke lokasi pemindahan (dengan menggunakan gerobak) melalui proses pemindahan untuk kemudian diangkut ke TPA, dengan syarat:

- Bagi daerah yang partisipasi masyarakatnya pasif
- Lahan lokasi pemindahan tersedia
- Bagi kondisi topografi relatif datar ($< 5\%$) dapat menggunakan alat pengumpulan non mesin (gerobak/becak)
- Alat pengumpulan masih dapat menjangkau secara langsung
- Kondisi lebar gang dapat dilalui alat pengumpulan tanpa mengganggu pemakai jalan lainnya
- Harus ada organisasi pengelola pengumpulan sampah

Sesuai dengan standar DPU, alat pengumpul yang dibutuhkan oleh suatu daerah/wilayah tertentu ditinjau dari jumlah KK yang ada diwilayah tersebut. Dengan standar 1 unit gerobak sampah manual dengan kapasitas sampah 1 m^3 digunakan untuk melayani 50 KK.

2.1.4. Prasarana Air Bersih

Air adalah sumber kehidupan. Air merupakan senyawa sederhana (H_2O), tetapi manfaatnya tidak terhitung. Parameter air yang penting ialah parameter fisik, kimia dan biologis (Hartono.A.J., *Teknologi Membran Pemurnian Air, 1994*), yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Parameter air bersih

Fisika	Kimia	Biologi
1. kekeruhan 2. warna 3. rasa & bau 4. endapan 5. temperatur	1. organik; a.l : karbohidrat, minyak/lemak/gemuk, pestisida, fenol, protein, deterjen, dan lain-lain. 2. anorganik; a.l : kesadahan, klorida, logam berat, nitrogen, pH, fosfor, belerang, bahan-bahan beracun. 3. gas-gas; a.l : hydrogen sulfida, metan, oksigen.	1. bakteri 2. binatang 3. tumbuh-tumbuhan 4. protista 5. virus

Sumber : - Metcalf dan Eddy 1974
- A.J.Hartono dan M.C.Widiatmoko 1994

Penyediaan air harus memenuhi kuantitas dan kualitas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 173/Men.Kes/Per/VII/1977, yaitu :

1. Aman dan higienis.
2. Baik dan layak minum.
3. Tersedia dalam jumlah yang cukup.
4. Harganya relatif murah atau terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

Standar dasar yang menentukan air bersih tersebut layak untuk dikonsumsi sebagai air minum menurut adalah sebagai berikut (Hartono.A.J., *Teknologi Membran Pemurnian Air*, 1994):

- Bebas organisme pathogenic.
- Tidak ada komponen kimia yang akan berpengaruh pada kesehatan dalam rentang waktu yang panjang.
- Bening (rendah endapan, tidak berwarna).
- Tidak asin.
- Tidak mengandung unsur rasa dan bau.
- Tidak menyebabkan korosi.

2.1.5. Pengertian Drainase

Pengertian Drainase menurut Suhardjono (1984:1) yaitu suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut.

Kegunaan dengan adanya drainase ini antara lain :

- Meringkakan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air permukaan tanah.
- Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.
- Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada.
- Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

A. Standart dan Sistem Penyediaan Drainase

Penyediaan sistem drainase harus disesuaikan dengan kondisi eksisting lahan tempat sistem tersebut akan dibangun. Macam-macam sistem drainase yang ada antara lain:

1. Sistem Drainase Utama, yaitu sistem drainase perkotaan yang melayani kepentingan sebagian besar warga masyarakat kota.
2. Sistem Drainase Lokal, yaitu sistem drainase perkotaan yang melayani kepentingan sebagian kecil warga masyarakat lingkungan setempat.
3. Sistem Drainase Terpisah, yaitu sistem drainase yang mempunyai jaringan saluran pembuangan terpisah untuk air permukaan atau air limpasan.
4. Sistem Drainase Gabungan, yaitu sistem drainase yang mempunyai jaringan saluran pembuangan yang sama, baik untuk air genangan atau air limpasan yang telah diolah.

Kemampuan permukaan tanah untuk merembeskan air secara alami yang dibagi menjadi 3 kelas, yaitu drainase baik/tidak pernah tergenang, drainase tergenang periodik dan drainase tergenang terus-menerus.

B. Sistem Jaringan Drainase

Sistem jaringan drainase di dalam wilayah kota umumnya dibagi atas 2 bagian yaitu drainase mayor dan drainase minor.

- **Sistem Drainase Mayor/Primer sampai Sekunder**

Sistem drainase mayor yaitu sistem saluran/badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (Catchment Area). Biasanya sistem ini menampung aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase primer, kanal-kanal atau sungai-sungai. Pada umumnya sistem drainase mayor ini disebut juga sebagai sistem saluran pembuangan utama (major system) atau drainase primer. Sistem ini merupakan penghubung antara drainase dan pengendalian banjir.

Debit rencananya untuk daerah urban urban umumnya dipakai dengan periode ulang antara 5 sampai 10 tahun. Di Indonesia mengingat keterbatasan dana untuk sungai-sungai besar yang berfungsi sebagai pengendalian banjir biasanya dipakai periode ulang antara 25 sampai 50 tahun.

Kondisi wilayah yang berbukit atau daerah yang kemiringan tanahnya cukup, persoalan pembuangan/pengaliran airnya tidak begitu sulit pemecahannya, karena perbedaan tingginya cukup besar sehingga air yang mengalir sangat cepat. Bilamana kemiringannya mencapai $> 0,001$ perlu dibuatkan terjunan yang berfungsi untuk mengurangi kemiringan saluran dan memperlambat aliran. Persoalan yang dihadapi di daerah perbukitan umumnya gerusan, karena sifat aliran yang deras.

Akan tetapi di daerah yang datar terutama di daerah desa dan kota kecil yang relatif datar ataupun pantai yang terkena pengaruh pasang surut, kadang-kadang tidak terdapat beda tinggi yang cukup untuk pengaliran. Air cenderung mengalir dengan lambat, bahkan timbul aliran balik akibat pengaruh pasang sehingga memungkinkan terjadinya sedimentasi. Pengaruh kemiringan yang landai dan kenaikan muka air laut cukup dominan. Pengukuran topografi yang detail mutlak diperlukan untuk perencanaan sistem drainase ini.

- **Sistem Drainase Mikro**

Drainase mikro yaitu sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan dimana sebagian besar di dalam wilayah kota. Secara keseluruhan yang termasuk dalam sistem drainase mikro adalah: saluran di sepanjang sisi jalan, saluran/selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota dan lain sebagainya dimana debit air yang dapat ditampungnya tidak terlalu besar.

Pada umumnya drainase mikro ini direncanakan untuk hujan dengan masa ulang 2,5 atau 10 tahun tergantung pada tata guna tanah yang ada. Sistem drainase untuk lingkungan permukiman lebih cenderung sebagai sistem drainase mikro.

Dari segi konstruksinya sistem saluran/drainase mikro dapat dibedakan atas dua bagian yaitu:

- a. **Sistem saluran tertutup**

Pengertian sistem saluran tertutup tidak sama dengan aliran dalam pipa. Aliran air masih bersifat gravitasi (aliran pada saluran terbuka) hanya konstruksi di atasnya

dibuat tertutup sehingga dapat dimanfaatkan untuk bangunan yang lain. Sistem ini cukup bagus digunakan di daerah perkotaan terutama untuk kota yang tinggi kepadatannya seperti kota Metropolitan dan kota-kota besar lainnya. Lahan yang tersedia sudah begitu terbatas dan mahal harganya, sehingga kadang-kadang tidak memungkinkan lagi untuk membuat sistem saluran terbuka. Walaupun tertutup sifat alirannya merupakan sifat aliran pada saluran terbuka yang mengalir secara gravitasi.

b. Sistem saluran terbuka

Biaya pembuatan sistem saluran terbuka biasanya lebih rendah dan tidak memerlukan teknologi yang begitu rumit sehingga sistem ini cenderung lebih sering digunakan sebagai alternatif pilihan dalam penanganan masalah drainase perdesaan. Sistem pemeliharannya relatif mudah dilakukan.

Sistem saluran terbuka ini biasanya direncanakan hanya untuk menampung dan mengalirkan air hujan (sistem terpisah). Namun kebanyakan sistem saluran ini berfungsi sebagai saluran campuran (gabungan) dimana misalnya sampah dan limbah penduduk dibuang ke saluran tersebut. Saluran ini sangat cocok untuk daerah perdesaan yang lahannya masih cukup luas.

2.1.6. Sarana Pendidikan

Perencanaan sarana pendidikan haruslah bertitik tolak dari perundang-undangan pendidikan yang akan dicapai. Sarana pendidikan yang berupa ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, serta sikap secara optimal. Pendidikan merupakan salah satu alat ukur yang dapat dipergunakan untuk memberikan penjagaan terhadap lingkungan, sehingga lingkungan yang baik dan efisien dapat terpelihara.

1. Taman Kanak-Kanak (TK)

Adalah fasilitas pendidikan yang dipergunakan untuk anak-anak usia 5-6.

- a. Minimum terdiri dari 2 ruang kelas yang masing-masing dapat menampung 35-40 murid dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain.
- b. Pencapaian maksimum adalah 500 m.
- c. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 1000 jiwa.
- d. Luas tanah yang dibutuhkan adalah 1200 m² dimana luas lantai 252 m².

2. Sekolah Dasar (SD)

Adalah fasilitas pendidikan yang dipergunakan untuk anak-anak usia 6-12 tahun.

- a. Minimum terdiri dari 6 ruang kelas yang masing-masing dapat menampung 40 murid dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain.
- b. Pencapaian maksimum adalah 1000 m.
- c. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 1600 jiwa.

3. Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP)

Adalah fasilitas pendidikan yang dipergunakan untuk menampung lulusan sekolah dasar.

- a. Minimum terdiri dari 6 kelas yang masing-masing dapat menampung 40 murid dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain.
- b. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 4800 jiwa.
- c. Luas lantai satu SLTP Umum adalah 1514 m^2 dan tanah yang dibutuhkan 2700 m^2 sedang untuk satu SLTP Khusus lainnya adalah 2551 m^2 dan tanah yang dibutuhkan 5000 m^2 .

2.1.7. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan bukan saja penting untuk kesehatan penduduk, melainkan berfungsi pula untuk mengendalikan perkembangan/pertumbuhan penduduk. Sarana kesehatan haruslah ditempatkan di berbagai tempat, sehingga mudah dicapai oleh yang berkepentingan.

a. Balai Pengobatan (BP)

Fungsi utama Balai Pengobatan adalah memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan. Titik beratnya terletak pada penyembuhan tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi. Lokasinya haruslah terletak di tengah-tengah lingkungan keluarga dimana radius pencapaiannya tidak boleh lebih dari 1000 m^2 dan melayani 10.000 penduduk.

b. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak dan Rumah Bersalin (BKIA dan Rumah Bersalin)

Fungsi utama dari sarana ini adalah untuk melayani ibu-ibu sebelum pada waktu, dan sesudah melahirkan serta melayani anak-anak usia 0 s/d usia 6 tahun. Lokasi haruslah terletak di tengah-tengah lingkungan keluarga dan diusahakan tidak menyeberang jalan-jalan lingkungan, radius pencapaian maksimum 2000 m dan minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 10.000 penduduk (4 RW).

c. Puskesmas dan Balai Pengobatan

Fungsi utama dari sarana ini adalah memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan juga sebagai organ terkecil dari Departemen Kesehatan untuk memantau seluruh kondisi kesehatan di lingkungan.

Lokasi Puskesmas sebaiknya di pusat lingkungan dekat dengan pelayanan pemerintah. Minimum penduduk yang mendukung sarana ini adalah 30.000 penduduk (1 lingkungan). Luas tanah yang dibutuhkan 1200 m².

d. Puskesmas dan Balai Pengobatan Kelompok 120.000 Penduduk

Fungsi utama sarana ini sama dengan Puskesmas dan balai pengobatan di lingkungan, hanya skalanya lebih luas termasuk koordinasi Puskesmas-Puskesmas dan balai pengobatan di lingkungan.

Lokasinya dapat di pusat kecamatan atau di tempat-tempat khusus disediakan sarana ini. Minimum penduduk yang mendukung sarana ini adalah 120.000 penduduk (1 kecamatan). Luas tanah bangunan yang dibutuhkan 2400 m². Sarana-sarana pelengkap lainnya tempat parkir, apotek, terminal kecamatan.

2.1.8. Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perniagaan dan industri merupakan unsur karya dalam perencanaan kota. Disamping sebagai fasilitas perbelanjaan dan industri juga merupakan mata pencaharian.

a. Warung

Fungsi utama warung adalah menjual barang-barang keperluan sehari-hari (sabun, gula, teh, rempah-rempah, dan lain-lain). Lokasinya terletak di tempat pusat lingkungan yang mudah dicapai dan mempunyai radius maksimum 500 m. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 250 penduduk.

b. Pertokoan

Fungsi utama sarana ini adalah menjual barang-barang keperluan sehari-hari yang berupa toko-toko. Lokasinya terletak di pusat dan tidak menyeberang jalan lingkungan dekat dengan Taman Kanak-Kanak dan tempat bermain. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 2500 penduduk.

c. Pusat Perbelanjaan Kawasan 30.000 Penduduk

Fungsi utama sebagai pusat perbelanjaan di lingkungan yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung-tepungan

dan lain-lain. Terdiri dari pasar dan toko-toko lengkap dengan bengkel-bengkel reparasi kecil seperti radio, kompor, setrika, sepeda dan motor-motor.

Lokasinya pada jalan utama lingkungan dan mengelompok dengan pusat lingkungan, dan mempunyai terminal kecil untuk pemberhentian kendaraan.

Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 30.000 penduduk.

2.1.9. Sarana Peribadatan

Jenis, macam dan besaran sarana-sarana peribadatan sangat bergantung dengan kondisi setempat.

Sarana peribadatan unuk agama Islam:

- a. Kelompok penduduk 500 jiwa
Satu langgar: 300 m²
- b. Kelompok penduuduk 2500
satu mesjid lingkungan: 1750 m²



Tabel 2.3
Standar Kebutuhan Sarana Perdesaan/Kota Kecil

Jenis Sarana	Jmh. Penduduk yang dilayani	Kebutuhan		Keterangan
		Luas lantai (m ²)	Luas Lahan (m ²)	
PENDIDIKAN				
1. Taman Kanak-kanak	Min. 1000	252 atau 15m ² /murid	1200	- 2Rg Kelas @35-40 - Radius max 500m
2. Sekolah Dasar	Min 1600	400-600	5000	- 6 Rg kelas@ 30mrd - Radius max 1000m
3. SLTP / SMU	Min 4800	Umum : 1514 Khusus: 2551	Umum : 2700 Khusus : 5000	- 3 Rg kelas @30mrd - KDB umum 60 - KDB khusus 50%
PERIBADATAN				
1. Masjid	2500	-	1700	
2. Musholla	500	-	300	
3. Gereja	100.000	1,2m ² /orang	1800	
KESEHATAN				
1. Puskesmas pembantu	30000	150	1200	
2. BKIA/R.bersalin	10000	-	1600	Radius 2000m
3. Apotek	10000	-	350	
4. Praktek dokter	5000	-	300	Bersatu dg. Rumah tangga
PERDAGANGAN				
1. Pasar Umum	30000	-	13500	
2. Toko	2500	-	1300	
3. Warung	250	-	300	
4. Pusat Pertokoan Kecil/Kios	250	-	50	
UMUM				
1. Pengumpul sampah	200	-	-	2m ³ / 200 rumah

Sumber: Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana Dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan Dan Kota Kecil, Depatemen Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pebruari, 2000

2.2. Matrix Fungsi

Matrix fungsi adalah analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar disuatu wilayah, dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas penduduk, untuk memperoleh / memanfaatkan fasilitas tersebut (Riyadi, 2003:110).

Matrix fungsi bertujuan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara pusat pelayanan yang ada dengan distribusi penduduk disuatu daerah. Matrix fungsi ini dapat dianalisis dengan 3 cara (Riyadi, 2003:115) yaitu:

2.2.1. Skalogram

Adalah metode yang paling sederhana karena hanya menunjukkan daftar dari komponen-komponen pendukungnya. Cara mengisi tabel Skalogram yaitu dengan memberikan tanda silang atau lainnya, untuk memberikan gambaran umum tentang keberadaan fungsi-fungsi pelayanan pada suatu wilayah. Kekurangan dari analisis Skalogram ini adalah kurang bisa dipergunakan untuk melihat jumlah setiap jenis pelayanan secara akurat (Riyadi, 2003:122). Oleh karena itu sebaiknya dilengkapi dengan matrix fungsi yang lain, dimana data dihitung secara lebih detail melalui teknik pembobotan, pemberian rangking, dan lain-lain. Komponen yang diperlukan dalam analisis Skalogram ini adalah:

- Data permukiman/wilayah yang dituju
- Jumlah penduduk/populasi masing-masing permukiman
- Data fungsi/fasilitas pelayanan pada setiap permukiman

Berikut adalah tabel Skalogram:

SKALOGRAM KABUPATEN/KOTA “X” PROPINSI “Y” TAHUN “Z”

No	Kecamatan	Populasi	Jenis Fungsi						Indeks Fungsi
			Perdagangan dan Jasa			Peribadatan			
			Warung/Kios	Toko	Pasar	Mesjid	Mushalla	Gereja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A	5000	x	x	x	x	x	x	6
2	B	2500	x			x		x	2
3	C	1000	x		x			x	3
Jumlah		8500	3	1	2	2	1	3	11

Sumber: Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta, 2003: 122

2.2.2. Pola Permukiman

Matrix Pola Permukiman adalah alat untuk menganalisis struktur atau hirarkhi fungsi-fungsi pelayanan yang ada pada suatu wilayah (Riyadi, 2003:116). Tujuan Matrix Pola Permukiman adalah untuk mengetahui tata jenjang dan distribusi

pusat-pusat pelayanan dalam suatu wilayah. Dapat juga untuk mengetahui sejauh mana mampu memberikan fungsi pelayanan dan jangkauan pelayanan. Dengan menggunakan matrix ini dapat diketahui wilayah yang terlayani dan wilayah yang belum terlayani.

**POLA PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA “X”
PROPINSI “ Y “ TAHUN “ Z “**

No	Lingkungan	Populasi (jiwa)	Jenis Fungsi						Indeks Fungsi
			Perdagangan dan Jasa			Peribadatan			
			Warung/Kios	Toko	Pasar	Mesjid	Mushalla	Gereja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A	5000	x	x	Dst				
			y	y					
2	B	2500	x	x	Dst				
			y	y					
3	C	1000	x	x	Dst				
			y	y					
Total Fungsi			X1	X1	Dst				
Total Prosen (%)			Y1	Y1	Dst				TOT (Y)

Sumber: Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta, 2003: 117

Keterangan:

x = jumlah fungsi

y = persentase fungsi (dari total fungsi)

y = $x/X1 * 100\%$

X1 = jumlah total fungsi

Y1 = total % (100%)

Cara pengisian:

1. Kolom (1) diisi nomor urut wilayah
2. Kolom (2) diisi nama kecamatan dalam wilayah, diusahakan urut jumlah populasi.
3. Kolom (3) jumlah populasi tiap kecamatan.
4. Kolom (4 – 14) diisi angka jumlah fungsi pelayanan yang ada.
5. Kolom (15) diisi jumlah persentase dari setiap baris seluruh fungsi yang ada. Skor tertinggi = frekuensi kegiatan suatu fungsi pelayanan yang tinggi & sebaliknya. Nilai rata-2 persentase baris = nilai baris pada kolom (15) dibagi jumlah kolom.
6. Total persentase = jumlah seluruh persentase pada setiap kolom.

2.2.3. Indeks Sentralitas

Indeks Sentralitas bertujuan untuk mengetahui: (Riyadi, 2003:118)

- struktur/hierarki pusat-pusat pelayanan dalam suatu wilayah,
- seberapa banyak fungsi yang ada,
- berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani,
- serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman.

Juga dapat digunakan untuk mengetahui frekuensi keberadaan fungsi yang menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tertentu. Dan dapat mengetahui frekuensi kegiatan fungsi yang menunjukkan tingkat pelayanan yang mungkin dilakukan oleh suatu fungsi tertentu di wilayah tertentu. Cara penilaian indeks sentralitas adalah berdasarkan bobot setiap fungsi yang ada.

INDEKS SENTRALITAS KABUPATEN/KOTA "X" PROPINSI "Y" TAHUN "Z"

No	Lingkungan	Populasi (jiwa)	Jenis Fungsi						Indeks Fungsi
			Perdagangan dan Jasa			Peribadatan			
			Warung/Kios	Toko	Pasar	Mesjid	Mushalla	Gereja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A	5000	x	x	Dst				
			y	y					
2	B	2500	x	x	Dst				
			y	y					
3	C	1000	x	x	Dst				
			y	y					
Total Fungsi			X1	X1	Dst				
Total Centrality (%)			100	100					
Nilai Bobot			Y1	Y1	Dst				TOT (Y)

Sumber: Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta, 2003: 119

Keterangan:

x = jumlah fungsi

y = nilai bobot fungsi

y = $x * Y1$

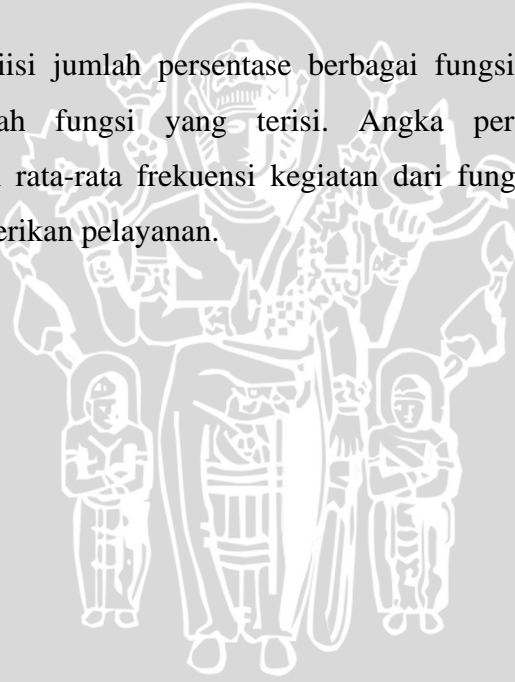
X1 = jumlah total fungsi

Y1 = nilai bobot

Y1 = $100/X1$

Cara pengisian tabel:

1. Prinsip pengisian kolom dan baris = pola permukiman.
2. Kolom (14) diisi jumlah masing-masing fungsi pada setiap kecamatan (setiap baris). Menunjukkan jumlah berbagai jenis pelayanan yg dimiliki suatu wilayah.
3. Baris total fungsi = jumlah setiap fungsi yang sama dalam seluruh kecamatan (setiap kolom).
4. Baris total centrality = setiap baris/kolom mempunyai nilai yang sama (100).
5. Baris nilai bobot = nilai total centrality dibagi jumlah fungsi pada setiap kolom. Semakin tinggi frekuensi keberadaan suatu fungsi, semakin kecil nilai bobot, berarti semakin kecil frekuensi kegiatan dan sebaliknya.
6. Kolom 15 diisi jumlah persentase berbagai fungsi pada baris, lalu dibagi jumlah fungsi yang terisi. Angka persentase rata-rata menunjukkan rata-rata frekuensi kegiatan dari fungsi-fungsi tersebut dalam memberikan pelayanan.



2.3. Studi Terdahulu

No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Variabel	Hasil	Perbedaan
1	Didik Dwi Rahmat Aprianto (1999) Evaluasi Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi Di Kec. Wagir Kab. Malang	Perencanaan lebih lanjut dalam penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi penduduk guna tercapainya kebutuhan fasilitas sosial ekonomi yang optimal	Metode yang digunakan adalah Teknik Skoring dan Analisis Korelasi Product Moment dari Pearson Tahapan analisis yaitu input data, kemudian menganalisis karakteristik penduduk dan fasilitas sosial ekonomi, kemudian menganalisis faktor yang berpengaruh, kemudian faktor yang berpengaruh dianalisis dengan analisis korelasi untuk mencari hubungannya	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah penduduk - jumlah fasilitas sosial ekonomi 	Terdapat hubungan jumlah penduduk dengan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi pada wilayah studi	<ul style="list-style-type: none"> - wilayah studi - menghitung kebutuhan sarana prasarana kemudian mengevaluasi ketersediaan sarana prasarana di wilayah studi - metode yang digunakan analisis deskriptif dan analisis normatif
2	Rini Ambarwati (2004) Pengembangan Potensi Desa Melalui Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Di Desa Sungegeneng Kec. Sekaran Kab. Lamongan	Menggali lebih lanjut potensi ekonomi yang dapat dikembangkan didesa serta merencanakan sarana prasarana yang mendukung pengembangan potensi ekonomi tersebut	Metode yang digunakan adalah perhitungan proyeksi penduduk, Shift Share, SWOT, ZOPP dan MPP Tahapannya yaitu menghitung proyeksi penduduk, kemudian menganalisis potensi desa, kemudian menganalisis sarana prasarana didesa sehingga diketahui sarana prasarana apa yang harus ditambah untuk dapat meningkatkan potensi desa	<ul style="list-style-type: none"> - potensi desa studi - sarana prasarana didesa studi 	<ul style="list-style-type: none"> - pertumbuhan sektor pertanian dan tambak pada desa studi termasuk pertumbuhan yang cepat dan meningkat - tingkat pelayanan prasarana belum keseluruhan dapat dijangkau - tingkat pelayanan sarana sebagian besar sudah memenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> - wilayah studi - menghitung kebutuhan sarana prasarana kemudian mengevaluasi ketersediaan sarana prasarana di wilayah studi - metode yang digunakan analisis deskriptif dan analisis normatif

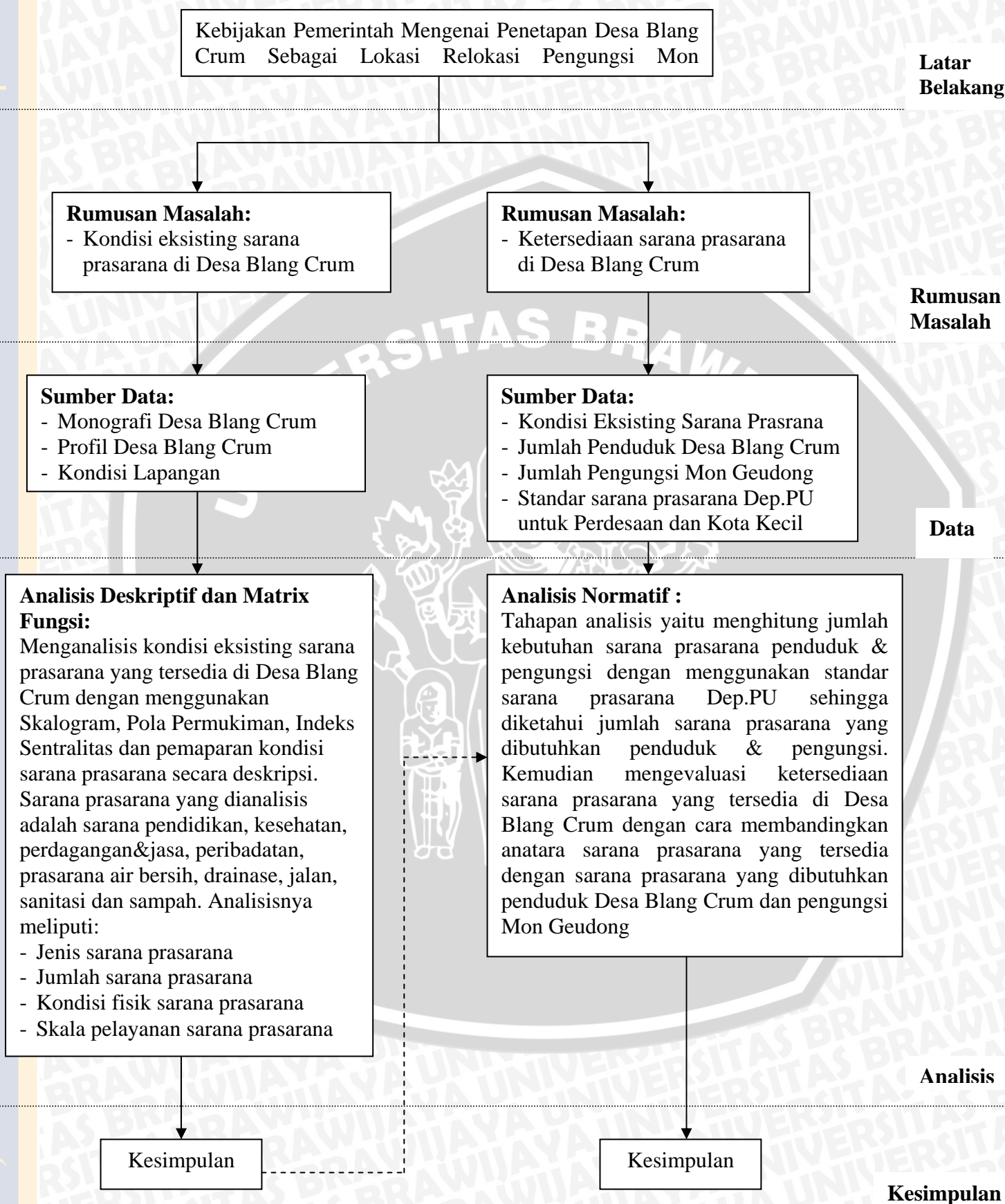
BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Metode Penelitian

Kerangka metode penelitian merupakan rangkaian tahapan proses penelitian secara keseluruhan yang dilakukan untuk mempermudah dalam pemecahan masalah sehingga diperoleh hasil seperti yang diharapkan. Untuk gambar Kerangka Metode Penelitian dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.



Gambar 3.1. Kerangka Metode Penelitian



3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Pengumpulan Data Primer

Teknik pengambilan data primer pada wilayah penelitian berdasarkan jenis yang digunakan terbagi dalam 2 kelompok yaitu;

1. observasi lapangan; merupakan pengamatan yang langsung dilakukan ke lapangan untuk mengetahui kondisi wilayah studi yang akan diteliti. Pada jenis ini data yang diteliti dikhususkan pada pola penggunaan lahan, pola pemukiman penduduk, pola jaringan jalan dan pola persebaran fasilitas.
2. wawancara; berupa tanya jawab langsung yang dilakukan kepada masyarakat dan aparat pemerintahan setempat untuk mengetahui respon, masukan dan keinginan masyarakat pada kecenderungan bermukim di masa yang akan datang.

Dalam pengumpulan data primer penelitian “Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana Di Desa Blang Crum Akibat Relokasi Pengungsi Mon Geudong”, waktu survey dari Agustus 2006 sampai Februari 2007. Survey primer dilakukan di barak pengungsi Desa Mon Geudong dan di Desa Blang Crum.

Dibarak pengungsi, kegiatan survey yang dilakukan adalah untuk mengumpulkan data kependudukan, sedangkan di Desa Blang Crum untuk mengumpulkan data kependudukan dan data yang berhubungan dengan sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, peribadatan serta prasarana air bersih, drainase, jalan, sanitasi dan sampah. Selain itu juga mengumpulkan data mengenai lokasi relokasi pengungsi walaupun hanya sebatas observasi lapangan saja. Data jumlah pengungsi dan data kondisi eksisting sarana prasarana di Desa Blang Crum dapat digunakan untuk mengevaluasi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pengungsi dan penduduk Desa Blang Crum setelah mengetahui kebutuhan sarana prasarana pengungsi Mon Geudong dan penduduk Desa Blang Crum.

3.2.2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dua jenis kegiatan yaitu dengan; a) studi literatur; mencari referensi, hasil observasi, kebijakan-kebijakan tata ruang dan teknis, data eksisting kependudukan dan sarana prasarana, serta dari informasi media massa baik itu melalui internet, televisi maupun koran atau jurnal, b) studi instansi; yaitu mencari data-data sekunder melalui instansi/organisasi yang terkait.

3.2. Metode Analisis Data

Metode analisis dilakukan untuk memfokuskan penelitian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Metode analisis digunakan sebagai alat untuk mewujudkan dan membahas sasaran yang ingin diwujudkan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Tahapan yang pertama adalah menganalisis kondisi eksisting sarana prasarana yang ada di Desa Blang Crum dengan menggunakan Analisis Deskriptif. Tetapi khusus untuk sarana juga dianalisis dengan menggunakan Matrix Fungsi yang terdiri dari Skalogram, Pola Permukiman dan Indeks Sentalitas. Sumber data untuk analisis kondisi eksisting didapat dari survey sekunder dibalai desa dan observasi lapangan secara langsung. Sehingga diketahui kondisi eksisting sarana prasarana yang telah tersedia di Desa Blang Crum.

Tahapan yang terakhir adalah menganalisis ketersediaan sarana prasarana di Desa Blang Crum. Langkah awal adalah menghitung jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pengungsi Mon Geudong dan penduduk Desa Blang Crum menggunakan analisis normatif dengan menggunakan standar sarana prasarana Dep. PU untuk Perdesaan dan Kota Kecil sehingga diketahui jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan. Kemudian mengevaluasi ketersediaan sarana prasarana di Desa Blang Crum dengan cara membandingkan antara sarana prasarana yang tersedia dengan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pengungsi Mon Geudong dan penduduk Desa Blang Crum sehingga diketahui apakah sarana prasarana yang telah tersedia di Desa Blang Crum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Blang Crum dan pengungsi Mon Geudong.

3.3.1. Analisis Matrix Fungsi

Khusus untuk sarana dapat digunakan Matrix Fungsi sehingga diketahui jumlah sarana yang tersedia dan tingkat skala pelayanan sarana prasarana di Desa Blang Crum dalam memenuhi kebutuhan penduduk Desa Blang Crum dan pengungsi Mon Geudong. Matrix Fungsi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- Skalogram

Adalah metode yang paling sederhana karena hanya menunjukkan daftar dari komponen-komponen pendukungnya. Cara mengisi tabel Skalogram yaitu dengan memberikan tanda silang atau lainnya, untuk memberikan gambaran umum tentang keberadaan fungsi-fungsi pelayanan pada suatu wilayah.

Kekurangan dari analisis Skalogram ini adalah kurang bisa dipergunakan untuk melihat jumlah setiap jenis pelayanan secara akurat.

- **Pola Permukiman**

Matrix Pola Permukiman adalah alat untuk menganalisis struktur atau hirarkhi fungsi-fungsi pelayanan yang ada pada suatu wilayah (Riyadi, 2003:116). Tujuan Matrix Pola Permukiman adalah untuk mengetahui tata jenjang dan distribusi pusat-pusat pelayanan dalam suatu wilayah. Dapat juga untuk mengetahui sejauh mana mampu memberikan fungsi pelayanan dan jangkauan pelayanan. Dengan menggunakan matrix ini dapat diketahui wilayah yang terlayani dan wilayah yang belum terlayani.

- **Indeks Sentralitas**

Indeks Sentralitas bertujuan untuk mengetahui: (Riyadi, 2003:118)

- struktur/hierarkhi pusat-pusat pelayanan dalam suatu wilayah,
- seberapa banyak fungsi yg ada,
- berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yg dilayani,
- serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman.

Juga dapat digunakan untuk mengetahui frekuensi keberadaan fungsi yang menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tertentu. Dan dapat mengetahui frekuensi kegiatan fungsi yang menunjukkan tingkat pelayanan yang mungkin dilakukan oleh suatu fungsi tertentu di wilayah tertentu.

3.3.2. Analisis Deskriptif

Dalam menganalisis kondisi eksisting sarana prasarana, digunakan juga Analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif dilakukan dengan cara memaparkan kondisi eksisting sarana prasarana menyangkut jenis, jumlah dan kondisi fisik bangunan. Sarana prasarana yang dianalisis antara lain:

- **Sarana Pendidikan**

Tahapannya yaitu menganalisis jenis sarana, kondisi fisik, jumlah dan skala pelayanannya dengan menggunakan analisis deskriptif sehingga diketahui kondisi eksisting sarana di Desa Blang Crum.

- **Sarana Kesehatan**

Tahapannya yaitu menganalisis jenis sarana, kondisi fisik, jumlah dan skala pelayanannya dengan menggunakan analisis deskriptif sehingga diketahui kondisi eksisting sarana di Desa Blang Crum.

- **Sarana Perdagangan Dan Jasa**

Tahapannya yaitu menganalisis jenis sarana, kondisi fisik, jumlah dan skala pelayanannya dengan menggunakan analisis deskriptif sehingga diketahui kondisi eksisting sarana di Desa Blang Crum.

- **Sarana Peribadatan**

Tahapannya yaitu menganalisis jenis sarana, kondisi fisik, jumlah dan skala pelayanannya dengan menggunakan analisis deskriptif sehingga diketahui kondisi eksisting sarana di Desa Blang Crum.

- **Prasarana Air Bersih**

Tahapan analisis pada prasarana air bersih, pertama-tama akan dianalisis kondisi eksistingnya meliputi sumber air bersih di Desa Blang Crum dan kondisi air yang dikonsumsi oleh masyarakat dari segi rasa, bau dan warna dengan menggunakan analisis deskriptif sehingga diketahui kualitas sumber air bersih di Desa Blang Crum.

- **Prasarana Jalan**

Tahapan analisis pada prasarana jalan, pertama-tama akan dianalisis kondisi eksisting jalan termasuk panjang jalan, jenis jalan serta perkerasan jalan dengan menggunakan analisis deskriptif sehingga diketahui kondisi eksisting jaringan jalan di Desa Blang Crum.

- **Prasarana Drainase**

Tahapan analisis pada prasarana drainase, pertama-tama akan dianalisis kondisi eksisting saluran drainase termasuk panjang saluran drainase, jenis serta kondisi fisik saluran drainase dengan menggunakan analisis deskriptif sehingga diketahui kondisi eksisting saluran drainase di Desa Blang Crum.

- **Prasarana Sanitasi**

Untuk prasarana sanitasi, pertama-tama akan hitung jumlah jamban umum dan pribadi, kondisi jamban, dan letak jamban dimasing-masing rumah dengan menggunakan analisis deskriptif sehingga diketahui kondisi eksisting prasarana sanitasi di Desa Blang Crum.

- **Prasarana Sampah**

Untuk prasarana sampah, pertama-tama akan dihitung jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk Desa Blang Crum dan penghuni Mon Geudong, volume bak penampungan sampah dan sistem pengangkutan sampah dari rumah ke TPS dengan menggunakan analisis deskriptif sehingga diketahui kondisi eksisting prasarana persampahan di Desa Blang Crum.

Variabelnya adalah:

- jenis sarana prasarana eksisting
- jumlah sarana prasarana eksisting
- kondisi sarana prasarana eksisting
- skala pelayanan sarana prasarana

3.3.3. Analisis Normatif

Analisis Normatif digunakan untuk mengevaluasi ketersediaan sarana prasarana yang ada di Desa Blang Crum dengan cara membandingkan antara jumlah sarana yang dibutuhkan dengan sarana prasarana yang tersedia di Desa Blang Crum. Langkah awal adalah menghitung jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan oleh penghuni Mon Geudong dan penduduk Desa Blang Crum menggunakan dengan menggunakan standar sarana prasarana Dep. PU untuk Perdesaan dan Kota Kecil sehingga diketahui jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan. Kemudian mengevaluasi ketersediaan sarana prasarana di Desa Blang Crum dengan cara membandingkan antara sarana prasarana yang tersedia dengan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh penghuni Mon Geudong dan penduduk Desa Blang Crum sehingga diketahui apakah sarana prasarana yang telah tersedia di Desa Blang Crum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Blang Crum dan penghuni Mon Geudong.

- **Sarana Pendidikan**

Setelah terjadi penambahan penduduk di Desa Blang Crum akibat relokasi penghuni Mon Geudong, maka kemudian dihitung jumlah sarana yang dibutuhkan di Desa Blang Crum dengan menggunakan analisis normatif dengan standar Sarana Prasarana Dep. PU untuk Perdesaan dan Kota Kecil. Kemudian dievaluasi ketersediaan sarannya dengan cara membandingkan antara sarana yang tersedia dengan sarana yang dibutuhkan oleh penghuni Mon Geudong dan penduduk Desa Blang Crum sehingga diketahui apakah sarana yang telah tersedia di Desa Blang Crum cukup

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Blang Crum dan pengungsi Mon Geudong. Dan bila sarana yang dibutuhkan tidak tersedia di Desa Blang Crum maka dimana masyarakat dapat mendapatkan sarana tersebut yang terdekat.

- **Sarana Kesehatan**

Setelah terjadi penambahan penduduk di Desa Blang Crum akibat relokasi pengungsi Mon Geudong, maka kemudian dihitung jumlah sarana yang dibutuhkan di Desa Blang Crum dengan menggunakan analisis normatif dengan standar Sarana Prasarana Dep. PU untuk Perdesaan dan Kota Kecil. Kemudian dievaluasi ketersediaan sarannya dengan cara membandingkan antara sarana yang tersedia dengan sarana yang dibutuhkan oleh pengungsi Mon Geudong dan penduduk Desa Blang Crum sehingga diketahui apakah sarana yang telah tersedia di Desa Blang Crum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Blang Crum dan pengungsi Mon Geudong. Dan bila sarana yang dibutuhkan tidak tersedia di Desa Blang Crum maka dimana masyarakat dapat mendapatkan sarana tersebut yang terdekat.

- **Sarana Perdagangan Dan Jasa**

Setelah terjadi penambahan penduduk di Desa Blang Crum akibat relokasi pengungsi Mon Geudong, maka kemudian dihitung jumlah sarana yang dibutuhkan di Desa Blang Crum dengan menggunakan analisis normatif dengan standar Sarana Prasarana Dep. PU untuk Perdesaan dan Kota Kecil. Kemudian dievaluasi ketersediaan sarannya dengan cara membandingkan antara sarana yang tersedia dengan sarana yang dibutuhkan oleh pengungsi Mon Geudong dan penduduk Desa Blang Crum sehingga diketahui apakah sarana yang telah tersedia di Desa Blang Crum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Blang Crum dan pengungsi Mon Geudong. Dan bila sarana yang dibutuhkan tidak tersedia di Desa Blang Crum maka dimana masyarakat dapat mendapatkan sarana tersebut yang terdekat.

- **Sarana Peribadatan**

Setelah terjadi penambahan penduduk di Desa Blang Crum akibat relokasi pengungsi Mon Geudong, maka kemudian dihitung jumlah sarana yang dibutuhkan di Desa Blang Crum dengan menggunakan analisis normatif dengan standar Sarana Prasarana Dep. PU untuk Perdesaan dan Kota Kecil. Kemudian dievaluasi ketersediaan sarannya dengan cara membandingkan antara sarana yang tersedia dengan sarana yang dibutuhkan oleh pengungsi Mon Geudong dan penduduk Desa Blang Crum sehingga diketahui apakah sarana yang telah tersedia di Desa Blang Crum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Blang Crum dan pengungsi Mon

Geudong. Dan bila sarana yang dibutuhkan tidak tersedia di Desa Blang Crum maka dimana masyarakat dapat mendapatkan sarana tersebut yang terdekat.

- **Prasarana Air Bersih**

Setelah diketahui kondisi eksisting kemudian mengevaluasi kebutuhan penduduk dan pengungsi dengan menggunakan analisi normatif sehingga diketahui apakah prasarana yang tersedia telah mampu memenuhi kebutuhan penduduk dan pengungsi di Desa Blang Crum dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai sumber air bersih terhadap rencana relokasi pengungsi Mon Geudong.

- **Prasarana Jalan**

Setelah diketahui kondisi eksisting jalan kemudian mengevaluasi kebutuhan penduduk dan pengungsi dengan menggunakan analisi normatif sehingga diketahui apakah prasarana yang tersedia telah mampu memenuhi kebutuhan penduduk dan pengungsi di Desa Blang Crum dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai jaringan jalan terhadap rencana relokasi pengungsi Mon Geudong.

- **Prasarana Drainase**

Setelah diketahui kondisi eksisting saluran drainase kemudian mengevaluasi kebutuhan penduduk dan pengungsi dengan menggunakan analisi normatif sehingga diketahui apakah prasarana yang tersedia telah mampu memenuhi kebutuhan penduduk dan pengungsi di Desa Blang Crum dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai jaringan drainase terhadap rencana relokasi pengungsi Mon Geudong.

- **Prasarana Sanitasi**

Setelah diketahui kondisi eksisting sanitasi kemudian mengevaluasi kebutuhan penduduk dan pengungsi dengan menggunakan analisi normatif sehingga diketahui apakah prasarana yang tersedia telah mampu memenuhi kebutuhan penduduk dan pengungsi di Desa Blang Crum dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai prasarana sanitasi tersebut terhadap rencana relokasi pengungsi Mon Geudong.

- **Prasarana Sampah**

Setelah diketahui kondisi eksisting persampahan kemudian mengevaluasi kebutuhan penduduk dan pengungsi dengan menggunakan analisi normatif sehingga diketahui apakah prasarana yang tersedia telah mampu memenuhi kebutuhan penduduk dan pengungsi di Desa Blang Crum. Kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah terhadap rencana relokasi pengungsi Mon Geudong.

Variabelnya adalah:

- jumlah pengungsi Mon Geudong
- jumlah penduduk Desa Blang Crum
- kondisi eksisting sarana prasarana Desa Blang Crum



3.3. Desain Survei

No	Tujuan	Variabel	Sumber Data	Metode Pengumpulan	Metode Analisis	Output
1	Mengetahui kondisi eksisting sarana prasarana yang telah tersedia di Desa Blang Crum	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis sarana prasarana - Jumlah sarana prasarana - Kondisi fisik sarana prasarana eksisting - Skala pelayanan sarana prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Profil Desa Blang Crum - Observasi lapangan 	Metode pengumpulan data dengan : <ul style="list-style-type: none"> - Primer - Sekunder 	Analisis Deskriptif & Matrix Fungsi Dengan cara menganalisis kondisi eksisting sarana prasarana yang dibutuhkan di Desa Blang Crum meliputi jenis, jumlah, kondisi fisik dan skala pelayanan sehingga diketahui kondisi eksisting sarana prasarana. Sarana prasarananya meliputi pendidikan, kesehatan, peribadatan, peribadatan, air bersih, drainase, jalan, sanitasi & sampah.	Kondisi eksisting sarana prasarana di Desa Blang Crum
2	Mengetahui kebutuhan sarana prasarana serta ketersediaannya di Desa Blang Crum	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengungsi dan penduduk Desa Blang Crum - Sarana prasarana yang dibutuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Profil Desa Blang Crum - Profil pengungsi Mon Geudong - Standar sarana prasarana menurut standar Dep. PU - Hasil analisis kondisi eksisting sarana prasarana 	Metode pengumpulan data dengan : <ul style="list-style-type: none"> - Sekunder 	Analisis Normatif Menghitung jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pengungsi Mon Geudong dan penduduk Desa Blang Crum dengan menggunakan standar sarana prasarana Dep. PU untuk Perdesaan dan Kota Kecil sehingga diketahui jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan. Kemudian mengevaluasi ketersediaan sarana prasarana di Desa Blang Crum dengan cara membandingkan jumlah sarana prasarana eksisting dengan sarana prasarana yang dibutuhkan penduduk dan pengungsi sehingga diketahui ketersediaan sarana prasarananya.	Mengetahui ketersediaan sarana prasarana di Desa Blang Crum dalam memenuhi kebutuhan penduduk Desa Blang Crum dan pengungsi Mon Geudong



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Kebijakan Kota Lhokseumawe

Tinjauan kebijakan Kota Lhokseumawe berisikan gambaran umum mengenai Kota Lhokseumawe dan bersumber dari RTRW Kota Lhokseumawe tahun 2004-2014. berikut adalah gambaran umum Kota Lhokseumawe:

4.1.1. Kebijakan Bentuk Pola Penggunaan Lahan

Bentuk dan pola penggunaan lahan di Kota Lhokseumawe pada umumnya tumbuh mengikuti jenis kegiatan yang berlangsung di wilayah ini. Pada dasarnya masyarakat tinggal dan menempati suatu kawasan yang berorientasi ke pusat kota.

Secara umum pola penggunaannya dapat dikelompokkan atas 2 (dua) bagian besar yaitu:

1. Penggunaan Lahan Kawasan Terbangun

Pola penggunaan lahan ini menempati bebrbagai kegiatan seperti permukiman penduduk, industri, perdagangan, perkantoran, jasa dan fasilitas ekonomi, fasilitas sosial dan pelayanan umum, kegiatan industri dan sebagainya.

2. Penggunaan Lahan Kawasan Tidak Terbangun

Proporsi penggunaan lahan kawasan ini meliputi lahan untuk kegiatan kehutanan rakyat dan pertanian yang terdiri dari kebun campuran/tegalan yang cenderung semakin berkurang jumlahnya dan kegiatan perikanan atau tambak.

A. Penggunaan Lahan Kawasan Terbangun

Proporsi luas kawasan terbangun dibandingkan luas wilayah Kota Lhokseumawe secara keseluruhan adalah sekitar 3.685 ha atau 20,41 %, dalam hal ini luas bangunan beserta halaman sekitarnya dan fasilitas penunjang lainnya.

Proporsi penggunaan lahan terbangun yang terbesar terdapat di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat, yang terdiri dari lahan permukiman, perkantoran (pemerintahan dan bangunan umum), pelayanan sosial, serta perdagangan dan jasa. Khusus Kecamatan Banda Sakti yang merupakan pusat kota, maka kegiatan perdagangan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah ini.

Areal terbangun lainnya adalah untuk kegiatan industri, fasilitas sosial seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, olah raga, dan jasa pelayanan umum lainnya.

Kawasan permukiman umumnya tersebar di wilayah kecamatan, dan hampir 10 % dari luas wilayah Kota Lhokseumawe ini didominasi oleh kawasan permukiman.

B. Penggunaan Lahan Kawasan Tidak Terbangun

Proporsi lahan tidak terbangun di Kota Lhokseumawe terdiri atas lahan rawa-rawa dan tanah pertanian yang dimanfaatkan untuk kegiatan sawah, kebun campuran, areal perikanan/tambak, dan lain-lain.

Kawasan tidak terbangun relatif luas jumlahnya yaitu sekitar 14.410 ha atau 79,59 %, terutama di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat yang umumnya berada dibagian Barat dan Selatan kota serta banyak terdapat rawa-rawa dengan ketinggian permukaan tanah relatif rendah yang rawan genangan air atau bencana banjir. Areal pertanian sawah dan kebun campuran/tegalan lokasinya berada di wilayah Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat.

Tabel 4.1
Pola Penggunaan Lahan Di Kota Lhokseumawe Tahun 2002

No	Jenis	Kecamatan			Luas (Ha)
		Banda Sakti	Blang Mangat	Muara Dua	
1	Sawah	-	892	1.011	1.903
2	Tegalan/Kebun	8	2.836	2.421	5.337
3	Ladang /Huma	37	-	-	37
4	Padang Rumput	64	-	-	64
5	Tidak diusahakan	135	221	2.175	2.531
6	Hutan Rakyat	-	295	-	295
7	Perkebunan	-	285	-	285
8	Lain-lain	-	78	3.886	3.964
9	Pekarangan	808	1.005	1.883	3696
Jumlah Luas Total		1.124	5.612	11.370	18.106

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2002

4.1.2. Kebijakan Karakteristik Kota Lhokseumawe

Berdasarkan RUTRK Lhokseumawe dan wilayah yang sekitarnya Tahun 1991/1992 yang direvis tahun 1995, melihat karakteristik Kota Lhokseumawe, baik dari perkotaanya sendiri maupun dari kedudukannya dalam konstelasi regional secara normatif berdasarkan fakta yang ada, maka fungsi yang diembannya adalah mencakup:

1. Pusat industri
2. Pusat pelayanan perdagangan dan jasa
3. Pusat administrasi dan pemerintahan

4. Pusat pendidikan
5. Pusat kesehatan
6. Pusat pertahanan dan keamanan

Konsep pembangunan Kota Lhokseumawe secara eksternal adalah konsep pembangunan prasarana kota yang melayani lingkup regional yaitu lingkup Wilayah Pengembangan II (WP II) atau wilayah luar Aceh karena didukung oleh prasarana transportasi darat serta lokasinya berada pada kawasan Selat Malaka.

4.1.2. Kebijakan Pengembangan Kependudukan

Kebijakan pengembangan kependudukan Kota Lhokseumawe diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan yang efektif dan bermutu di masa mendatang. Pengendalian pertumbuhan penduduk perlu diimbangi dengan peningkatan kegiatan-kegiatan dibidang sosial, ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini sesuai dengan Kebijakan Dasar Pembangunan Propinsi Naggroe Aceh Darussalam.

Mobilitas dan aktifitas penduduk selama ini, cenderung tumbuhnya sarana dan prasarana kota. Jumlah penduduk akan menentukan besaran kebutuhan jumlah dan jenis sarana dan prasarana tersebut. Kondisi tersebut harus disesuaikan dengan prediksi jumlah penduduk di masa mendatang.

Jumlah penduduk di Kota Lhokseumawe pada tahun 2002 adalah 157.338 jiwa. Jumlah tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya dengan perkembangan rata-rata per tahunnya 5,97 %. Berdasarkan angka tingkat perkembangan jumlah penduduk tersebut dapat diketahui perkiraan jumlah penduduk sampai akhir tahun 2014 yaitu sebesar 307,117 jiwa.

Menyadari hal tersebut, maka untuk kepentingan perencanaan Kota Lhokseumawe, jumlah perkiraan penduduk tahun 2014 berdasarkan hasil perhitungan akan dijadikan sebagai tolak ukur perhitungan pemenuhan kebutuhan di masa mendatang. Akan tetapi dalam penataan ruangnya akan dikembangkan berdasarkan pemanfaatan ruang kota secara optimal dengan melihat ketersediaan lahan yang dapat dijadikan objek pengembangan fisik terbangunnya.

Berdasarkan keadaan diatas, kebijakan untuk mengatur dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia ini adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan penduduk di masa mendatang harus dilihat sebagai potensi perkembangan kota, yaitu disektor angkatan kerja sehingga perlu diimbangi dengan peningkatan ketrampilan penduduk yang sesuai dengan peluang kerja.
2. Untuk mendukung perkiraan jumlah penduduk di masa mendatang, harus diupayakan penyediaan sarana dan prasarana serta kegiatan yang dapat meyerap tenaga kerja. Dengan demikian diharapkan kota lhokseumawe dapat menjadi salah satu orientasi penduduk yang siap untuk turut serta mengembangkan kotanya.
3. Perlu dijaga kesinambungan pertumbuhan dan kualitas penduduk guna menghindari kesenjangan penyebaran penduduk dengan wilayah belakangnya.
4. Pengaruh penyebaran penduduk harus dapat memperhatikan keadaan pola sosial budaya setempat. Hal ini dilakukun untuk menghindari terjadinya konsentrasi pertumbuhan penduduk pada kawasan-kawasan tertentu dan untuk mencapai jenjang penyebaran penduduk yang seimbang diseluruh bagian wilayah kota.
5. Pendistribusian dan pengaturan kepadatan jumlah penduduk harus dilakukan dengan mempertimbangkan kegiatan yang akan ditempatkan pada masing-masing BWK dan Sub BWK-nya.

Untuk mengarahkan perkembangan penduduk dalam lingkungan permukiman yang ideal, dilakukan pengaturan jumlah penduduk yang sebanding dengan daya tampung lahan dan proporsi penggunaan lahannya. Untuk mencapai pemanfaatan lahan yang efektif, maka pengaturan kepadatan dan daya tampung penduduk disesuaikan dengan sistem pembagian BWK.

Dengan demikian agar terbentuk suatu BWK yang ideal tingkat kepadatan penduduknya, maka kebijaksanaan pengembangan kepadatan penduduk pada kawasan yang layak untuk pengembangan fisik kota adalah sebagai berikut :

- kepadatan tinggi (100-150 jiwa/Ha) diarahkan pada kawasan dengan intensitas cukup tinggi yaitu disekitar pusat kota (karakteristk keurbanan tinggi) dan kawasan industri.
- Kepadatan Sedang (51-100 jiwa/Ha) diarahkan pada kawasan yang berada antara pusat kota dengan kawasan pinggirannya (kawasan transisi).
- Kepadatan Rendah (20-50 jiwa/Ha) diarahkan pada kawasan yang didominasi pemanfaatan lahan dengan intensitas cukup rendah serta lahan yang dapat dikembangkan masih cukup luas, atau didominasi penggunaan lahannya merupakan lahan yang belum terbangun atau lahan pertanian/perkebunan dan tambak.

4.1.3. Kebijakan Pengembangan Fisik Dasar

Posisi geografis Kota Lhokseumawe mempunyai potensi yang sangat strategis baik dari lintas darat, laut maupun udara karena dapat meningkatkan arus transportasi disana.

Keadaan topografinya yang relatif datar dengan kemiringan antara 0-8% pada kawasan pusat kota dan 8-15% pada kawasan pinggiran, menunjukkan bahwa tidak ada hambatan untuk pengembangan fisik atau mempunyai kemampuan yang ideal untuk menampung perkembangan kegiatan kota seperti perumahan, sarana dan prasarana kota, dan lainnya. Lahan yang relatif datar dapat menekan biaya pembangunan fisik dan penyediaan utilitas. Mengingat relatif datar dan rendahnya permukaan lahan kota dari permukaan air laut, maka perlu diperhatikan sistem penanganan jaringan drainase kota sebagai saluran pengendali banjir kota dan saluran limbah rumah tangga.

Dari segi hidrologi, Kota Lhokseumawe dialiri oleh Sungai Krueng Cunda, Krueng Meuraksa dan anak-anak sungai lainnya. Keberadaan sungai ini akan menjadi pembatas pengembangan fisik perkotaan. Sungai ini selain berfungsi sebagai daerah tangkapan air juga mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat, yaitu dapat dimanfaatkan potensinya untuk kegiatan perikanan dan sebagainya.

Pola permukiman sudah menunjukkan pola penyebaran yang teratur, namun keteraturan tersebut belum ditunjang oleh kualitas dan kelayakan bangunan serta kelengkapan fasilitas disekitarnya. Sementara itu fasilitas-fasilitas yang sudah ada relatif menyebar secara tidak teratur, mengakibatkan pelayanannya kurang optimal, seperti terdapat dikawasan pinggiran Kota Lhokseumawe (Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua). Pola permukiman yang ada umumnya memusat pada kawasan pusat kota dan menyebar disepanjang jalan Medan – Banda Aceh dengan intensitas bangunan yang cukup tinggi.

Berdasarkan kondisi diatas, maka kebijakan pengembangan fisik Kota Lhokseumawe adalah :

1. Dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan kawasan terbangunnya yang sebagian besar berorientasi dipusat kota sekitar jalan regional Medan – Banda Aceh, maka pengembangan fisik kedepan harus mengarah secara tersebar dipenjuru kota sesuai dengan kemampuan lahannya.
2. Kecendrungan perkembangan fisik kota harus dilihat berdasarkan besar dan arah perkembangan penduduk serta kegiatannya.

3. Untuk tumbuh lebih cepat, maka pada kawasan pinggiran perlu penyediaan fasilitas yang memadai dan lengkap
4. Penanganan banjir pada daerah genangan dapat dilakukan dengan sistem pompanisasi dan memperbanyak pintu air yang terkelola dengan baik.

4.1.4. Kebijakan Pengembangan Sektor Pembangunan

A. Sektor Industri

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang diandalkan di Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah. Kebijakan pengembangan sektor industri ini dapat dilakukan dengan :

1. Mengembangkan kemampuan tenaga kerja industri, manajemen keahlian dan ketrampilan.
2. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal pada setiap kegiatan industri yang ada di daerah.
3. Meningkatkan kaitan antara industri dasar dengan industri menengah dan kecil

B. Sektor Prasarana Wilayah dan Pariwisata

Sektor prasarana wilayah mencakup perhubungan, pertambangan dan energi, serta telekomunikasi. Sektor prasarana wilayah dan pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi dalam pengembangan kota karena pengaruhnya akan menunjang dan merangsang sektor lain untuk tumbuh.

Pembangunan prasarana wilayah lebih diarahkan secara merata agar setiap penjuru kota dapat terjangkau dan terlayani dengan baik dan cepat, sehingga memacu pertumbuhan kawasan-kawasan pinggiran.

Kebijakan perhubungan dan pariwisata ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Perhubungan :

1. Peningkatan kapasitas dan kemampuan jalan yang ada
2. Pembuatan jaringan jalan baru dan jembatan secara tepat dan terarah guna untuk memperlancar akses untuk menuju ke kawasan pinggiran dan daerah sekitarnya
3. Peningkatan jaringan jalan ke lingkungan pemukiman penduduk dalam rangka kelancaran lalu lintas dan keindahan serta keteraturan kota
4. Peningkatan fasilitas pendukung transportasi



5. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi regional dalam rangka mendukung keberadaan industri

b) Telekomunikasi

1. Penambahan jumlah telepon baru dan peningkatan kapasitas Sentral Telepon Otomat (STO) Kota Lhokseumawe
2. Pengembangan atau perluasan jaringan fasilitas komunikasi untuk wilayah yang belum terjangkau telepon
3. Peningkatan mutu teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kemajuan zaman, seperti pengembangan jaringan telepon seluler, internet dan sebagainya dengan sistem yang lebih canggih atau non manual

c) Drainase dan Air Limbah

Sistem drainase Kota Lhokseumawe yang berfungsi sebagai saluran pembuangan air hujan dilakukan dengan drainase tertutup. Hal ini sebagai efisiensi lahan sehingga fungsi di atas saluran tersebut dapat dijadikan trotoar atau jalur pedestrian. Untuk pengembangan saluran drainase pada lingkungan permukiman dibuat dengan sistem terbuka. Pengembangan sistem jaringan drainase dilakukan secara bertingkat sesuai dengan besaran jaringan jalan dan lingkungan yang dilayaninya

Pengembangan saluran pembuangan air limbah dilakukan dengan membuat saluran tertutup karena limbah yang disalurkan dapat menimbulkan pencemaran terhadap udara sekitar. Sebelum disalurkan ke saluran pembuangan, limbah harus diolah terlebih dahulu dengan septik tank.

d) Pembuangan Sampah

Untuk memudahkan sistem pengelolaan pembuangan sampah di Kota Lhokseumawe, pemerintah menyediakan beberapa buah tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang ditunjang oleh tempat pembuangan sampah sementara dimasing-masing rumah. Sebagai sarana angkut untuk pembuangannya disediakan gerobak sampah, truk sampah atau alat angkut lainnya.

e) Air Bersih

Pengembangan air bersih di Kota Lhokseumawe untuk sementara ini mengacu pada pola lama yaitu mengandalkan air dari PDAM Tirta Mon Pase yang merupakan perusahaan daerah dibawah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

f) Energi

1. Penambahan kapasitas pembangkit listrik
2. Penambahan jaringan transmisi distribusi khususnya bagi kawasan permukiman dikawasan pinggiran

g) Pariwisata

1. Perbaikan dan peningkatan sarana transportasi ke kawasan wisata khususnya Ujong Blang dan kawasan wisata lainnya
2. Pentaan kawasan wisata yang memadai
3. Peningkatan fasilitas dan pelayanan wisata
4. Peningkatan promosi wisata

C. Sektor Perdagangan dan Jasa

Kegiatan perdagangan bertujuan untuk melancarkan arus barang dan jasa yang berkaitan erat dengan kesempatan kerja, peningkatan produksi serta secara tidak langsung meningkatkan pendapatan masyarakat. Kebijakan pengembangan sektor ini adalah :

1. Pola kebijaksanaan bapak angkat bagi usaha menengah dan kecil, terutama pedagang ekonomi lemah.
2. Perhatian dari pemerintah dengan memberikan kredit lunak bagi para pengusaha ekonomi lemah agar usaha mereka dapat berkembang serta memperkecil angka pengangguran.
3. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana seperti pasar dan kondisi lingkungan pasar, agar dapat berfungsi dengan baik serta tidak mengurangi estetika kota
4. Memberikan kemudahan dan pedagang dibidang ekspor.
5. Mendorong pedagang dan konsumen meningkatkan mutu dan jumlah produksi terutama untuk komoditi non migas.

D. Sektor Permukiman

Kebijakan pembangunan permukiman dilakukan untuk memperbaiki dan mengatur tata ruang lingkungan permukiman. Hal ini ditujukan untuk menjaga keteraturan dan estetika kota serta kesehatan masyarakat.

Pembangunan di sektor permukiman ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan fasilitas kota serta utilitas kota. Dari sinilah didapatkan angka yang terukur mengenai jumlah kebutuhan penduduk, terhadap fasilitas tersebut seperti kesehatan, pendidikan, peribadatan, taman, lapangan olah raga dan sebagainya, serta kebutuhan

utilitas seperti air bersih, listrik, telepon, drainase dan air kotor, sampah dan sebagainya.

Selama ini sudah disediakan berbagai fasilitas dan utilitas permukiman namun dalam jumlah dan kondisi yang terbatas. Hal ini mengingat keterbatasan dana pembangunan yang dimiliki pemerintah, sedangkan perhatian investor terhadap kondisi seperti ini masih sangat kecil. Oleh karena itu strategi yang dikembangkan dimasa mendatang yaitu :

1. Pengaturan tata ruang yang sehat dan nyaman
2. Penyediaan fasilitas dan utilits kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai, terutama sekali difokuskan untuk lingkungan perumahan masyarakat ekonomi rendah
3. Pembangunan perumahan dengan memperhatikan adat, tradisi dan kondisi sosial masyarakat setempat
4. Partisipasi mayarakat dan pihak swasta dalam pembangunan dan penyediaan perumahan rakyat yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat.

4.1.5. Kebijakan Pusat Pelayanan

Dalam salah satu tujuan perencanaan Kota Lhokseumawe adalah untuk memberikan pertimbangan yang sebaik-baiknya mengenai distribusi pusat utama dan pusat pelayanan yang lebih kecil disesuaikan dengan pola penyebaran dan kepadatan penduduk dari kota yang direncanakan tersebut.

Untuk keseluruhan Kota Lhokseumawe, distribusi pusat-pusat pelayanan didasarkan pada suatu urutan hirarki fungsional. Jadi pusat-pusat pelayanan akan disebar dan secara hirarki terbagi atas puat utama kota yang melayani kebutuhan seluruh kota, sub pusat kota yang melayani sebagian wilayah kota dan sub-sub pusat yang merupakan pusat lingkungan. Seangkan untuk unit sosial terkecil (lingkungan perumahan) akan dilayani oleh pusat tertentu misalnya warung/kios, atau satu TK dan SD.

4.1.6. Kebijakan Pengembangan Ruang Kota

A. Kegiatan Perkantoran

Kegiatan pemerintah tetap dipertahankan kawasannya pada lokasi yang sudah ada. Kegiatan perkantoran swasta ditempatkan pada satu kawasan dengan kegiatan pemerintah dan pada kawasan disepanjang jalan raya Medan – Banda Aceh.

B. Pusat Perdagangan

Salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan pengembangan kegiatan perdagangan adalah memisahkan dan membina sektor ini menjadi 2 bagian yaitu : “pasar grosir” dialokasikan pada lokasi pasar tradisional dipusat kota serta pengembangan pasar induk yang erdekatan lokasinya dengan terminal terpadu di Alue Awe, disamping juga dilakukan pengembangan “pasar eceran” yang menyatu loksinya dengan pasar tradisional di pusat kota, pasar pagi, pasar Cunda dan pasar lainnya yang tersebar loasinya dipusat kecamatan atau pada sub pusat pelayanan seperti BWK.

C. Fasilitas Pelayanan Umum dan Sosial

Untuk sektor pelayanan umum dan sosial, mengingat kepentingan dan karakteristik konsumen serta kecendrungan yang ada, lokasi tetap dipertahankan pada kawasan pusat kota atau pada kawasan sekitar perkantoran (baik pemerintah maupun swasta), serta disepanjang jalan raya Medan - Banda Aceh. Disamping itu untuk skala pelayanan kecil disediakan cadangan lokasi pada setiap BWK atau lingkungan permukiman.

1. Pendidikan

Kegiatan pendidikan dengan skala pelayanan lingkungan (seperti TK) ditempatkan pada tiap unit/pusat lingkungan. Tingkat SD ditempatkan pada sub BWK, sedangkan untuk tingkat menengah (SLTP dan SMU) melayani BWK maupun lingkup Kota Lhokseumawe. Sedangkan perguruan tinggi ditempatkan pada kawasan yang jauh dari keramaian kota, sesuai dengan lokasi yang ada.

2. Kesehatan

Pengembangan fasilitas kesehatan disesuaikan dengan skala pelayanan dan jumlah penduduk pendukungnya serta penambahan jumlah penduduk. Pengembangan fasilitas kesehatan tersebut terdiri dari Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, Praktek Bidan, Praktek Dokter, dan Apotek. Disamping itu juga ditunjang oleh peranan tenaga medis sebagai penggerak tewujudnya kesehatan penduduk dan lingkungan, misalnya Posyandu.

3. Peribadatan

Pengembangan fasilitas peribadatan disesuaikan dengan jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut. Berdasarkan komposisinya, jumlah penduduk beragama Islam sangat dominan jumlahnya yaitu 98%. Mengingat besaran tersebut maka penambahan fasilitas peribadatan di masa mendatang lebih dititik beratkan pada pengembangan fasilitas peribadatan umat Islam baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.

Pengembangan fasilitas peribadatan lainnya untuk agama Kristen, Hindu dan Budha, mengingat jumlah pengikutnya yang relatif kecil maka untuk sementara tidak dikembangkan di Kota Lhokseumawe. Apalagi saat ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, sudah berlaku Syariat Islam diseluruh Propinsi NAD.

4. Fasilitas Pelayanan Umum Lainnya

Pengembangan fasilitas pelayanan umum disamping yang sudah ada, juga meningkatkan fasilitas yang baru sesuai dengan skala pelayanan dan kebutuhan kota. Fasilitas pelayanan umum ini dapat berupa pos keamanan yang menunjang keamanan dan kenyamanan suasana kota yang berfungsi sebagai ibukota provinsi. Fasilitas lainnya adalah Kantor Pos dan Giro, pelayanan Telkom, PLN, PDAM, Media Massa, biro periklanan, dan fasilitas pelayanan umum lainnya.

Kawasan pelayanan umum ini dapat menyatu dengan perkantoran swasta, jasa konsultan, fitness building, bank, asuransi, dan sebagainya.

D. Perumahan

Pengelompokan perumahan tersebut disesuaikan dengan sebaran jumlah dan kepadatan penduduk serta besaran lingkungan perumahan. Perluasan kawasan perumahan diarahkan keseluruh penjuru kota. Untuk lingkungan perumahan disekitar pusat kota masih dapat dipertahankan dengan meningkatkan kualitasnya (program perbaikan/peremajaan kampung dan konsolidasi lahan). Sedangkan pada kawasan yang relatif padat dibatasi pengembangannya secara horizontal.

Kebijaksanaan dalam pengembangan perumahan ini meliputi :

1. Adanya kerjasama terpadu antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman, serta pemugaran rumah-rumah.

2. Penyediaan lahan untuk fasilitas-fasilitas pembangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah.
3. Pembebanan bunga kredit rendah terhadap KPR-BTN.
4. Pengembangan perumahan di masa mendatang diarahkan pada kawasan sebelah Selatan, Barat, dan Tenggara kota.

E. Terminal Regional dan Pelabuhan

Terminal regional sudah selayaknya dipindahkan dari kawasan Cunda ke kawasan lain yang berdekatan dengan jalan lingkar dan jalan raya Medan – Banda Aceh, seperti pada kawasan Alue Awe. Pengembangan ini dilakukan dalam rangka memacu dan merangsang pertumbuhan kota ke arah pinggiran sehingga banyak kegiatan yang bermunculan disana, seiring dengan pengembangan jalan regional (ring road). Sementara itu disekitar kawasan ini juga diharapkan akan dibangun Stasiun Kereta Api dalam rangka mengaktifkan kembali jalur kereta api yang pernah aktif sebelumnya.

Sementara itu terminal Cunda diturunkan fungsinya menjadi terminal kota. Pelabuhan yang ada seperti pelabuhan nelayan (TPI), pelabuhan Pertamina dan LNG Arun tetap dipertahankan fungsinya dan dipelihara. Pelabuhan nelayan yang terdapat di daerah Pusong ditingkatkan fungsinya dalam rangka memacu pertumbuhan sektor perikanan dan kelautan.

F. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi diarahkan disepanjang daerah aliran sungai, tambak dan sepanjang pantai.

4.1.7. Kebijakan Pengembangan Transportasi

Kebijakan pengembangan sistem transportasi pada dasarnya merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan penduduk dalam hal memberikan kemudahan hubungan antar ruang kegiatan sesuai dengan fungsi kota yang akandiembannya. Disamping itu juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kemudahan pergerakan antar kawasan.

Fungsi khusus dari masing-masing jalan pada dasarnya dapat dibagi 2 yaitu:

1. Jalan masuk ke land use yang berdekatan

2. Jalan yang hanya menampung lalu-lintas dan bertujuan ke land use yang jauh letaknya dari jalan itu, atau dengan perkataan lain jalan yang memberikan kemudahan untuk pergerakan penumpang dan barang.

Diantara kedua fungsi utama ini ada beberapa macam jalan yang melayani land use atau lalu-lintas, yang pada pokoknya dapat dibagi dalam empat golongan besar, yaitu jalan lingkungan, lokal, kolektor, dan jalan arteri. Tingkat spesialisasi jalan-jalan tersebut menentukan pelayanan yang akan diberikan dan seberapa jauh jalan tersebut dapat dipakai dalam rencana.

Jalan menurut klasifikasinya tersebut terbagi lagi atas dua fungsi, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Sistem primer saat ini sekaligus berfungsi sebagai jalan utama kota dengan lingkup regional, sedangkan jaringan jalan lainnya termasuk sistem sekunder.

Berdasarkan uraian di atas, maka arahan kebijaksanaan dalam pengembangan jaringan jalan Kota Lhokseumawe adalah:

1. Menciptakan kelancaran komunikasi dan kemudahan pencapaian dalam kota, antar kawasan terutama pusat kota dan sub-sub pelayanannya (BWK dan Sub BWK), serta kawasan pelayanan.
2. Menghindari tercampurnya angkutan regional dan lokal.
3. Pemerataan beban jalan sehingga kapasitas tampung jalan optimum.
4. Kemungkinan peningkatan volume lalu-lintas pada jalur utama.
5. Peningkatan kualitas dan pengembangan jembatan baru untuk memudahkan hubungan antar kawasan.
6. Peningkatan dan perencanaan jalan baru pada kawasan-kawasan yang cenderung meningkat intensitas kegiatannya sehingga akan meningkatkan bangkitan lalu lintas.
7. Pengembangan jalan baru diharapkan tidak mengganggu atau membebani jalan yang sudah ada atau menimbulkan masalah transportasi baru.

4.1.8. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau

Kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau adalah perlunya suatu lingkungan yang alami, nyaman dan menghindari kepadatan lingkungan permukiman. Disamping itu memberikan kesegaran dan terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan asri.

Dengan demikian sebagai kebijaksanaan pengembangan ruang terbuka hijau ini adalah:

1. Ruang terbuka hijau sebagai tempat rekreasi dan olah raga.
Ruang terbuka ini berbentuk taman, lapangan olah raga atau areal rekreasi
2. Ruang terbuka hijau sebagai taman kota
Ruang terbuka hijau yang berbentuk lingkungan atau tempat olah raga, dimana minimal 80 % merupakan ruang terbuka dan harus dihijaukan. Taman kota tersebut terletak dipusat-pusat lingkungan permukiman atau dalam kawasan fungsi lain seperti perkantoran, perdagangan, pusat kota dan lain sebagainya.
3. Ruang terbuka hijau sebagai kawasan konservasi
Ruang terbuka hijau terletak dilahan kritis seperti daerah aliran sungai dan pantai, serta kawasan lain yang apabila dibangun maka akan mempengaruhi lingkungan (kualitas lingkungan menurun).

4.1.9. Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe

Produk yang ada hubungannya dengan Kota Lhokseumawe ini adalah RUTRK Lhokseumawe yang disusun pada tahun 1991/1992 telah direvisi pada tahun 1995/1996.

Dalam Rencana ini Kota Lhokseumawe telah ditetapkan dengan kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Dua ditetapkan dalam BWK Pusat Kota dengan pusatnya di Kota Lhokseumawe, ditetapkan dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan dan komersial, dengan elemen utama sebagai kawasan perdagangan, perkantoran, pemerintahan, jasa, pergudangan dan kawasan industri. Elemen penunjang sebagai kawasan perumahan, terminal, jalan arteri sekunder pergudangan dan pelabuhan laut.
2. Kecamatan Blang Mangat termasuk dalam BWK Timur, dengan pusatnya di Peunteut, ditetapkan sebagai pusat pengembangan kegiatan pertanian dan sumber daya alam lainnya, dengan elemen utama sebagai kawasan kegiatan industri dasar, kawasan perumahan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan elemen penunjangnya sebagai kawasan perdagangan, jaringan jalan kolektor primer dan arteri sekunder.

4.1.10. Konsep Tata Ruang Kota Lhokseumawe

1. Konsep Tata Ruang

Berdasarkan pengamatan dilapangan, kecenderungan perkembangan kota, dan pendekatan matriks fungsional, maka konsep tata ruang Kota Lhokseumawe sampai tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut:

- Kawasan perkantoran dipertahankan dilokasi saat ini (Kecamatan Banda Sakti), namun perlu ditingkatkan kualitas bangunan dan memperbaiki sarana prasarana fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
- Meningkatkan kemudahan pencapaian antara pusat kota dengan kawasan sekitarnya, dilakukan dengan memperbaiki dan meningkatkan pembangunan jalan baru.
- Alokasi kegiatan diprioritaskan pada kawasan dengan kemiringan lahan dibawah 15 % atau pada lahan yang dapat dikembangkan secara teknis (cut and fill).
- Pembatasan pengembangan kawasan terbangun pada kawasan pertanian potensial, tambak dan rawa, serta pembatasan pengembangan pada jalur hijau seperti pada sempadan sungai dan pantai.
- Meningkatkan penataan kawasan wisata, hiburan, dan perhotelan pada sepanjang kawasan pantai Kecamatan Banda Sakti.

2. Konsep Pengembangan Ruang Permukiman

Melihat kondisi kemungkinan perkembangan kawasan perencanaan yang ditunjang oleh keberadaan kawasan permukiman, maka konsep pengembangan ruang untuk permukiman yang saat ini sering dipakai untuk kota-kota adalah *Neighbourhood*. *Neighbourhood* dapat dikatakan sebagai konsep pengembangan lingkungan permukiman, yang membagi kawasan permukiman menjadi unit-unit kawasan permukiman. Tiap unit lingkungan memiliki pusat unit lingkungan dan beberapa unit lingkungan memiliki pusat yang lebih besar dan seterusnya. Pusat-pusat tersebut bertingkat secara hirarkis yang ditentukan berdasarkan skala pelayanannya. Konsep *Neighbourhood* dikembangkan terutama untuk mengatasi dan mencegah permasalahan-permasalahan kota terutama kemacetan lalu-lintas. Konsep *Neighbourhood* mengembangkan bahwa pusat unit lingkungan akan melayani unit lingkungannya, dengan demikian tidak terjadi lalu-lintas yang tidak perlu dari satu unit lingkungan ke unit lingkungan yang lain.

Kota Lhokseumawe yang berkembang dengan kegiatan industri, pemerintahan, perdagangan dan jasa, cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dalam proses tumbuh dan berkembang tersebut tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang sering dialami oleh kota-kota yang sudah berkembang seperti kemacetan lalu-lintas. Oleh karena itu pada rencana ini akan ditetapkan konsep Neighbourhood tersebut.

Kota Lhokseumawe sebagai kawasan permukiman akan mempunyai pusat utama yaitu pusat yang berfungsi melayani seluruh kawasan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu dan juga melayani seluruh kota sehingga pusat utama ini mempunyai skala pelayanan kota. Pusat sekunder yaitu pusat yang melayani kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk bagian wilayah kota atau yang melayani kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam skala pelayanan Sub BWK.

4.1.11. Kebijakan Penanggulangan Bencana Tsunami

Departemen Pekerjaan Umum telah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami di Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam dan Sumatera Utara Bidang Pekerjaan Umum, melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 21/KPTS/M/2004, dengan tugas utamanya adalah memantau dan memprogramkan pelaksanaan:

1. Tahap tanggap darurat, yang dilaksanakan 3 bulan dari awal kejadian sampai dengan 26 Maret 2005.
2. Tahap rehabilitasi, dilaksanakan pada tahun 2005 dan 2006.
3. Tahap rekonstruksi, akan berjalan mulai paruh kedua tahun 2005 s/d 2009.

Tahap tanggap darurat adalah tahapan pertama dari program pemerintah. Tahap ini dilaksanakan 3 bulan dari awal kejadian sampai dengan 26 Maret 2005. Kegiatan difokuskan pada:

- Pembersihan sampah dan puing-puing bangunan serta pembukaan ruas-ruas jalan yang tertutup/ putus.
- Mengevakuasi korban.
- Penyediaan barak-barak untuk para pengungsi yang dilengkapi dengan ruang serba guna, prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, dan jalan lingkungan.

Tahap pertama tersebut telah dijalankan oleh pemerintah, NGO, dan LSM dengan segala daya upaya yang dimilikinya. Sekarang memasuki tahap kedua. Tahap ini dilaksanakan pada tahun 2005 dan tahun 2006. Program dalam tahap ini yaitu :

- Dalam tahap ini dilakukan perbaikan infrastruktur PU dan permukiman agar berfungsi kembali secara minimal.
- Apabila perbaikan tidak memungkinkan, maka akan diantisipasi pemindahan atau relokasi infrastruktur PU dan permukiman yang mengalami kerusakan total.

Tahap ketiga pada program pemerintah ini akan berjalan mulai paruh kedua tahun 2005 s/d 2009. Program dalam tahap ketiga ini yaitu :

- Merupakan tahap akhir dari penanggulangan bencana gempa dan tsunami yaitu pemulihan total seluruh kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Diperlukan dukungan perencanaan tata ruang yang telah memperhitungkan aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya masyarakat.

Mengingat kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi tahap ini, maka diperlukan dukungan perencanaan tata ruang yang telah memperhitungkan aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya masyarakat.

4.1.12. Kebijakan Pemerintah Mengenai Relokasi Pengungsi

Untuk menangani masalah pengungsi Mon Geudong, Pemerintah Kota Lhokseumawe membuat suatu kebijakan relokasi pengungsi. Dalam kebijakan pemerintah tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe menetapkan Desa Blang Crum yang termasuk ke dalam Kecamatan Muara Dua sebagai lokasi relokasi pengungsi Mon Geudong. Dalam menetapkan lokasi tersebut, pemerintah mengemukakan beberapa alasan untuk memperkuat kebijakan tersebut yaitu (*BAPEKOT Lhokseumawe, 2006*):

1. Dari segi ketersediaan lahan

Untuk memindahkan 189 KK atau 903 jiwa pengungsi Mon Geudong maka pemerintah harus menyediakan lahan yang cukup luas karena pengungsi tersebut harus ditempatkan di satu tempat. Mereka tidak mau kalau harus dipisahkan satu sama lain. Lahan yang direncanakan oleh pemerintah adalah 5

Ha. Oleh karena itu hal ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memilih Desa Blang Crum sebagai lokasi relokasi.

2. Dari segi topografi lahan

Untuk meminimalkan biaya dan mempermudah pembangunan suatu permukiman baru maka permukiman tersebut harus diletakkan pada lokasi yang memiliki topografi relatif datar. Selain dapat meminimalkan biaya pemerintah untuk meratakan lahan tersebut, lokasi permukiman yang berada di lokasi yang memiliki topografi yang relatif datar akan lebih terhindar dari bencana seperti tanah longsor.

Selain itu Desa Blang Crum juga memiliki kelebihan lain yaitu lokasinya berada dekat dengan Sungai Meuraksa sehingga memudahkan dalam perencanaan jaringan drainase. Selain itu juga desa ini dekat dengan Laut Selat Malaka, Hal ini sangat menguntungkan para pengungsi karena karakteristik pengungsi pada umumnya adalah nelayan.

3. Dari segi aksesibilitas

Dari segi aksesibilitas, Desa Blang Crum memiliki beberapa keuntungan, yaitu selain berada dipinggir jalan Negara (jalan Medan – Banda Aceh), desa ini juga sudah dilewati oleh angkutan umum, sehingga dapat memudahkan para pengungsi untuk melakukan aktifitas mereka sehari-hari.

4. Dari segi biaya pembebasan lahan

Harga tanah di Kota Lhokseumawe sangat berfluktuatif. Semakin dekat dengan pusat kota maka akan semakin mahal harga jual lahan tersebut. Oleh karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah, sedangkan pemerintah harus membebaskan lahan yang cukup luas untuk relokasi pengungsi yaitu 5 Ha, maka pemerintah harus mencari lokasi yang biaya pembebasan lahannya sesuai dengan kemampuan pemerintah. Setelah melalui beberapa dialog dan musyawarah dengan masyarakat Desa Blang Crum maka harga pembebasan lahan yang disepakati bersama adalah Rp.27.500,- per meter persegi.

5. Dari segi ketersediaan fasilitas umum

Salah satu syarat lokasi permukiman yang baik adalah memiliki atau dekat dengan berbagai macam fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah memilih Desa Blang Crum karena desa tersebut dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia yang berada di Desa Bukit Rata dan

juga dekat dengan fasilitas pendidikan seperti SD Negeri Kandang, SLTP Negeri Kandang, AKPER dan AKBID Negeri dan swasta milik Yayasan Muhammadiyah, serta Politeknik Negeri Bukit Rata.

6. Dari segi ketersediaan sarana dan prasarana

Melihat dari segi sarana dan prasarannya, kondisi sarana dan prasarana yang telah ada di Desa Blang Crum telah memadai dan cukup untuk melayani masyarakat desa tersebut. Seperti telah tersedianya prasarana persampahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga prasarana lainnya. Oleh karena itu dengan penambahan jumlah penduduk akibat relokasi pengungsi maka pemerintah juga akan meningkatkan jumlah dan pelayanan sarana prasarana bagi masyarakat bila jumlah yang telah ada tidak mencukupi kebutuhan masyarakat tersebut.

4.2. Tinjauan Umum Desa Blang Crum

4.2.1. Letak Geografis dan Administrasi

Desa Blang Crum terletak di Kemukiman Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Desa Blang Crum terletak pada pertengahan lintas jalan raya Banda Aceh – Medan, dengan batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Krueng Meuraksa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Blang Buloh/Cot Mamplam
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Meunasah Manyang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Alue Awe

Untuk lebih jelas mengenai batas administratif Desa Blang Crum dapat dilihat pada peta batas administratif Desa Blang Crum (**Gambar 4.1**).

Peta 4.1

Peta Batas Administratif Desa Blang Crum



4.2.2. Kondisi Fisik Dasar

a. Topografi

Berdasarkan kondisi topografinya, Desa Blang Crum merupakan dataran rendah yang terletak pada ketinggian 0 m – 25 m di atas permukaan laut (dpl). Bentuk bentang permukaan tanahnya relatif datar dengan kemiringan lahan yang berkisar antara 0 – 25 %. Luas dataran adalah sekitar 190 Ha yang terdiri dari lahan permukiman, sawah dan tambak sedangkan luas perbukitan adalah sekitar 154 Ha yang terdiri hutan dan perkebunan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta topografi Desa Blang Crum (**Gambar 4.2**).

b. Batuan dan tanah

Kondisi geologinya dipengaruhi oleh material-material gugusan Gunung Bukit Barisan. Batuan induk yang mendasari terbentuknya struktur geologi wilayah Desa Blang Crum, dengan jenis tanah bervariasi dan sebagian besar jenis tanahnya meliputi podzolid merah kuning, organosol, alluvial dan latosol.

c. Klimatologi

Desa Blang Crum tergolong daerah beriklim basah dengan curah hujan yang relatif sedang dengan rata-rata curah hujan berkisar 1.770 mm/tahun. Bulan basah jatuh pada sekitar hulan September sampai dengan Februari, sedangkan bulan kering berada pada bulan April sampai dengan bulan Agustus.

d. Hidrologi

Menurut kondisi hidrologinya, Desa Blang Crum terdapat sungai kecil dan alur sungai lainnya. Sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai saluran pembuangan sistem drainase Desa Blang Crum. Sungai yang membatasi Desa Blang Crum adalah Sungai Krueng Meuraksa.

Berdasarkan kondisi daerahnya yang terletak di daerah pantai dengan ketinggian yang relatif rendah dan bentang permukaan tanahnya yang relatif datar, hal ini merupakan faktor penyebab terdapatnya rawa (terutama rawa laut) dan tambak.

Air tanah di kategorikan sebagai air asin, air payau dan air tawar. Di Desa Blang Crum kondisi air tanahnya termasuk air tawar. Rata-rata kedalaman permukaan air tanah dangkal yang diperoleh melalui sumur-sumur adalah sekitar 2-10 meter, dan pada musim hujan kedalaman permukaan air sumur adalah sekitar 1 meter.

Peta 4.2
Peta Topografi Desa Blang Crum



4.2.3. Tata Guna Lahan

Pada dasarnya bentuk dan pola penggunaan lahan oleh masyarakat di Desa Blang Crum pada umumnya adalah permukiman, pertanian, ladang dan tambak ikan.

Secara umum pola penggunaan lahan dapat dikelompokkan atas 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Penggunaan Lahan Kawasan Terbangun

Pola penggunaan lahan ini menempati berbagai kegiatan seperti permukiman penduduk, perdagangan, sekolah, tempat peribadatan, dan kuburan.

2. Penggunaan Lahan Kawasan Tidak Terbangun

Proporsi penggunaan lahan kawasan ini meliputi rawa-rawa, lahan untuk kegiatan kehutanan rakyat dan pertanian yang terdiri dari kebun campuran/tegalan yang cenderung semakin berkurang luasnya dan kegiatan atau tambak.

- a. **Penggunaan Lahan Kawasan Terbangun**

Proporsi luas lahan terbangun dibandingkan luas wilayah Desa Blang Crum secara keseluruhan adalah sekitar 108 Ha, dalam hal ini adalah luas bangunan beserta halaman sekitarnya dan fasilitas penunjang lainnya.

- b. **Penggunaan Lahan Kawasan Tidak Terbangun**

Proporsi kawasan tidak terbangun di Desa Blang Crum terdiri atas lahan rawa-rawa dan tanah pertanian yang dimanfaatkan untuk kegiatan sawah, kebun campuran, areal perikanan/tambak, dan lain-lain. Kawasan tidak terbangun ini relatif luas jumlahnya yaitu sekitar 212 Ha.

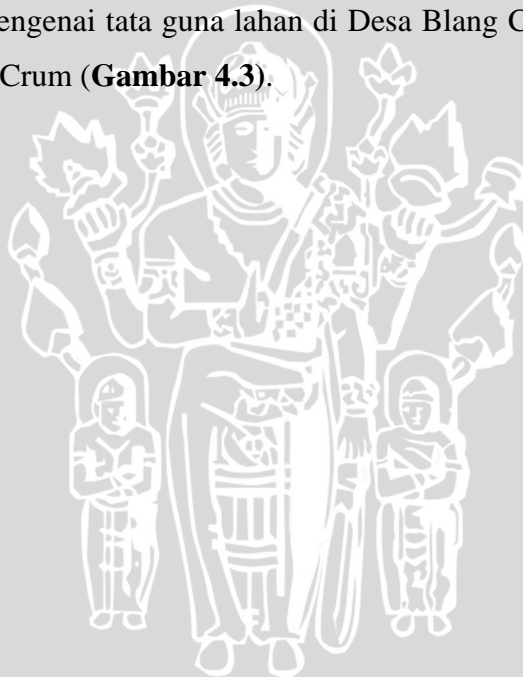
Luas wilayah secara keseluruhan berdasarkan Undang undang Nomor 02 Tahun 2001 adalah sekitar 320 Ha. Wilayah Desa Blang Crum yang digunakan untuk permukiman adalah 108 Ha, sawah seluas 36 Ha, perkebunan 75 Ha, hutan rakyat 55 Ha, tambak/tebat 12 Ha, kolam 8 Ha, dan rawa-rawa 26 Ha. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 4.2.**

Tabel 4.2
Pola Penggunaan Lahan Di Desa Blang Crum

No	Penggunaan	Luas (Ha) / Panjang (Km)
1	Untuk Permukiman / perumahan	108 Ha
2	Untuk Bangunan	
	a. Sekolah	v
	b. Tempat peribadatan	v
	c. Kuburan	v
	d. Jalan	v
3	Sawah tadah hujan	36 Ha
4	Perkebunan rakyat	75 Ha
5	Hutan Rakyat	55 Ha
6	Tambak	8 Ha
7	Perikanan air tawar	12 Ha
8	Rawa	26 Ha
Total Luas Desa Blang Crum		320 Ha

Sumber : Profil Desa Blang Crum, 2006

Untuk lebih jelas mengenai tata guna lahan di Desa Blang Crum dapat dilihat pada peta TGL Desa Blang Crum (**Gambar 4.3**).



Peta 4.3
Peta Tata Guna Lahan Desa Blang Crum



4.2.4. Kependudukan Masyarakat Desa Blang Crum

Jumlah penduduk Desa Blang Crum adalah 1.868 jiwa, jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 886 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 982 jiwa. Di Desa Blang Crum terdapat 475 KK. Tingkat kepadatan penduduk Desa Blang Crum adalah sekitar 6 jiwa/Km². Dapat dilihat pada **Tabel 4.3**.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Blang Crum

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	886 jiwa
2	Perempuan	982 jiwa
3	Penduduk Keseluruhan	1868 jiwa
4	Kepadatan penduduk	6 jiwa/Ha

Sumber : Profil Desa Blang Crum, 2006

Sedangkan data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada **Tabel 4.4**.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Desa Blang Crum Menurut Umur

No	Kelompok umur	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 12 bulan	79	93	172
2	13 bulan – 4 tahun	67	58	125
3	5 – 6 tahun	74	102	176
4	7 – 12 tahun	93	101	194
5	13 – 15 tahun	107	108	215
6	16 – 18 tahun	64	76	140
7	19 – 25 tahun	69	73	142
8	26 – 35 tahun	84	88	172
9	36 – 45 tahun	65	76	141
10	46 – 50 tahun	65	69	134
11	51 – 55 tahun	48	51	99
12	56 – 65 tahun	38	43	81
13	66 – 75 tahun	31	36	67
14	Lebih dari 75 tahun	6	8	14
Jumlah		886	982	1.868

Sumber : Profil Desa Blang Crum, 2006

Pada umumnya penduduk Desa Blang Crum adalah petani dan nelayan karena Desa Blang Crum masih memiliki lahan pertanian yang lumayan luas yaitu 36 Ha dan Desa Blang Crum dekat dengan sungai dan pantai. Jumlah penduduk Desa Blang Crum berdasarkan mata pencahariannya dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

Tabel 4.5
Struktur mata pencaharian penduduk Desa Blang Crum

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	338
2	Nelayan	67
3	Pemilik Usaha Pertambangan Galian C	1
4	Guru	7
5	Perawat Kesehatan (Mantri)	1
6	Karyawan BUMN / BUMD	3
7	Karyawan Swasta	13
8	Pensiunan PNS / POLRI / TNI	12
9	Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga	270
10	Kuli Bangunan	28

Sumber : Profil Desa Blang Crum, 2006

Di Desa Blang Crum terdapat pembagian permukiman kedalam 3 unit Lingkungan. Hal ini dilakukan oleh Kepala Desa agar mempermudah mengatur dan mengkoordinasikan penduduk Desa Blang Crum. Setelah lokasi relokasi resmi ditempati oleh pengungsi Mon Geudong, maka lokasi relokasi tersebut akan menjadi Unit Lingkungan yang ke 4. Jumlah penduduk Desa Blang Crum berdasarkan Unit Lingkungan dapat dilihat pada **Tabel 4.6**.

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Tiap Unit Lingkungan Desa Blang Crum

No	Unit Lingkungan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Unit Lingkungan 1	665
2	Unit Lingkungan 2	650
3	Unit Lingkungan 3	553
Jumlah Total Penduduk		1868

Sumber : Profil Desa Blang Crum, 2006

Untuk lebih jelas mengenai pembagian Unit Lingkungan di Desa Blang Crum dapat dilihat pada peta pembagian unit lingkungan Desa Blang Crum (**Gambar 4.4**)

Peta 4.4

Peta Pembagian Unit Lingkungan Desa Blang Crum



4.2.5. Kependudukan Pengungsi Mon Geudong

Pengungsi yang berada di Barak Pengungsian Mon Geudong adalah para korban bencana Tsunami yang berasal dari 3 desa yang berada di Kota Lhokseumawe yaitu Desa Pusong Baru, Pusong Lama dan Keude Aceh. Pada umumnya para pengungsi ini bermata pencaharian nelayan dan pedagang.

Tabel 4.7
Jumlah Pengungsi di Barak Mon Geudong

No	Desa	Jumlah KK (Kepala Keluarga)	Pria (jiwa)	Wanita (jiwa)
1	Pusong Baru	75	157	192
2	Pusong Lama	104	208	298
3	Keudee Aceh	10	21	27
Jumlah Pengungsi		189	903	

Sumber : Poskeslit Mon Geudong, 2006

Mengenai mata pencaharian pengungsi Mon Geudong yang didapat dari hasil survey primer dapat dilihat pada **Tabel 4.8**.

Tabel 4.8
Jenis Mata Pencaharian Pengungsi Mon Geudong

No	Jenis pekerjaan	Desa			Jumlah
		Pusong Baru	Pusong Lama	Keudee Aceh	
1	Nelayan	49	73	3	125
2	Pedagang	21	19	2	42
3	Tukang Becak	5	12	5	22

Sumber : Poskeslit Mon Geudong, 2006

Sedangkan data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada **Tabel 4.9**.

Tabel 4.9
Jumlah Pengungsi Mon Geudong Menurut Umur

No	Kelompok umur	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 12 bulan	12	21	33
2	13 bulan – 4 tahun	10	28	38
3	5 – 6 tahun	29	41	70
4	7 – 12 tahun	36	49	85
5	13 – 15 tahun	48	61	109
6	16 – 18 tahun	27	39	66
7	19 – 25 tahun	35	42	77
8	26 – 35 tahun	23	34	57
9	36 – 45 tahun	35	43	78
10	46 – 50 tahun	29	38	67
11	51 – 55 tahun	40	45	85
12	56 – 65 tahun	27	34	61
13	66 – 75 tahun	24	33	57
14	Lebih dari 75 tahun	11	9	20
Jumlah		386	517	903

Sumber : Poskeslit Mon Geudong, 2006

4.3. Analisis Kondisi Eksisting Sarana Prasarana

Menganalisis kondisi eksisting sarana prasarana dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan memaparkan jenis sarana, jumlah, kondisi fisik dan skala pelayanan sarana dan prasarana yang ada di Desa Blang Crum. Sarana yang dianalisis meliputi sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, dan peribadatan. Sedangkan untuk prasarana adalah air bersih, drainase, jalan, sanitasi dan sampah hanya dianalisis dengan menggunakan Analisis Deskriptif. Khusus untuk analisis sarana, dianalisis dengan menggunakan dua buah analisis yaitu Analisis Deskriptif dan menggunakan Matrix Fungsi berupa Skalogram, Matrix Pola Permukiman dan Indeks Sentralitas, untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan yang ada dengan distribusi penduduk suatu daerah dan analisis Deskriptif untuk mengetahui kondisi eksisting sarana tersebut.

4.3.1. Analisis Matrix Fungsi

A. Skalogram

Skalogram digunakan untuk mengetahui jumlah sarana yang terdapat disuatu wilayah. Berikut adalah Skalogram Desa Blang Crum:

Tabel 4.10
Skalogram Desa Blang Crum Tahun 2006

No	Lingkungan	Populasi (jiwa)	Jenis Sarana							
			Pendidikan				Kesehatan			
			TK	SD	SMP	SMU	Polindes	Bidan Desa	Puskesmas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Lingkungan 1	665	x	-	-	-	-	x	-	-
2	Lingkungan 2	650	-	-	-	-	-	x	-	
3	Lingkungan 3	553	-	x	-	-	-	-	-	
Jumlah		1.868	1	1	0	0	1	1	0	

Bersambung....

Sambungan....

No	Lingkungan	Populasi (jiwa)	Jenis Sarana						Indeks Fungsi	
			Perdagangan dan Jasa			Peribadatan				
			Warung/Kios	Toko	Pasar	Mesjid	Mushalla	Gereja		
			11	12	13	14	15	16	17	
1	Lingkungan 1	665	x	-	-	-	-	-	-	3
2	Lingkungan 2	650	x	-	-	-	x	-	-	3
3	Lingkungan 3	553	x	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah		1.868	3	0	0	0	1	0	8	

Sumber : Hasil Analisis , 2006

Dari Skalogram diatas dapat diketahui bahwa sarana yang terdapat di Desa Blang Crum adalah sarana pendidikan berupa TK berada di Lingkungan 1 dan SD berada di Lingkungan 3, sarana kesehatan berupa Polindes berada di Lingkungan 1

dan Praktek Bidan berada di Lingkungan 2, sarana perdagangan berupa warung/kios yang tersebar di Lingkungan 1, Lingkungan 2, dan Lingkungan 3. Serta sarana peribadatan berupa Mushalla yang terdapat di Lingkungan 2 sebanyak 1 buah. Kekurangan dari Skalogram ini adalah tidak bisa memunculkan jumlah sarana yang terdapat disetiap unit lingkungan yang ada di Desa Blang Crum.

B. Matrix Pola Permukiman

Bertujuan untuk mengetahui tata jenjang dan distribusi pusat-pusat pelayanan dalam suatu wilayah. Berikut adalah Matrix Pola Permukiman Desa Blang Crum:

Tabel 4.11
Matrix Pola Permukiman Desa Blang Crum Tahun 2006

No	Lingkungan	Populasi (jiwa)	Jenis Sarana							
			Pendidikan				Kesehatan			
			TK	SD	SMP	SMU	Polindes	Bidan Desa	Puskesmas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Lingkungan 1	665	1 100%	-	-	-	-	1 100%	-	-
2	Lingkungan 2	650	-	-	-	-	-	1 100%	-	
3	Lingkungan 3	553	-	1 100%	-	-	-	-	-	
Total Fungsi			1	1	-	-	1	1	-	
Total Prosen (%)			100%	100%			100%	100%		

Bersambung....

Sambungan....

No	Lingkungan	Populasi (jiwa)	Jenis Sarana						Indeks Fungsi
			Perdagangan dan Jasa			Peribadatan			
			Warung/Kios	Toko	Pasar	Mesjid	Mushalla	Gereja	
			11	12	13	14	15	16	17
1	Lingkungan 1	665	6 46,31%	-	-	-	-	-	41,05
2	Lingkungan 2	650	3 23,01%	-	-	-	-	-	20,50
3	Lingkungan 3	553	4 30,68%	-	-	-	1 100%	-	38,45
Total Fungsi			13	-	-	-	1	-	18
Total Prosen (%)			100%				100%		100%

Sumber : Hasil Analisis , 2006

Berdasarkan Matrix Pola Permukiman, maka Lingkungan 1 melayani kebutuhan sarana di Desa Blang Crum sebesar 41,05 %. Untuk Lingkungan 2 melayani kebutuhan sarana di Desa Blang Crum sebesar 20,50 %. Dan untuk Lingkungan 3 melayani kebutuhan sarana di Desa Blang Crum sebesar 38,45 %. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa lingkungan yang memberikan pelayanan sarana

terbesar untuk Desa Blang Crum adalah Lingkungan 1 dan lingkungan yang memberikan pelayanan sarana terkecil adalah Lingkungan 2.

C. Indeks Sentralitas

Bertujuan untuk mengetahui struktur pusat-pusat pelayanan dalam suatu wilayah, jumlah fungsi yang ada, jenis fungsi dan jumlah penduduk yang dilayani, serta frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman. Indeks Sentralitas untuk Desa Blang Crum adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Indeks Sentralitas Desa Blang Crum Tahun 2006

No	Lingkungan	Populasi (jiwa)	Jenis Sarana							
			Pendidikan				Kesehatan			
			TK	SD	SMP	SMU	Polindes	Bidan Desa	Puskesmas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Lingkungan 1	665	1 100	-	-	-	-	1 100	-	-
2	Lingkungan 2	650	-	-	-	-	-	1 100	-	-
3	Lingkungan 3	553	-	1 100	-	-	-	-	-	-
Total Fungsi			1	1	-	-	1	1	-	-
Total Centrality (%)			100%	100%			100%	100%		
Nilai Bobot			100	100			100	100		

Bersambung....

Sambungan....

No	Lingkungan	Populasi (jiwa)	Jenis Sarana							Indeks Fungsi
			Perdagangan dan Jasa			Peribadatan			Jumlah	
			Warung/Kios	Toko	Pasar	Mesjid	Mushalla	Gereja		
11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Lingkungan 1	665	6 46,31	-	-	-	-	-	8	30,79
2	Lingkungan 2	650	3 23,01	-	-	-	-	-	4	30,76
3	Lingkungan 3	553	4 30,68	-	-	-	1 100	-	6	38,45
Total Fungsi			13	-	-	-	1	-	18	18
Total Centrality (%)			100%				100%			100%
Nilai Bobot			7.67				100		-	-

Sumber : Hasil Analisis , 2006

Berdasarkan Indeks Sentralitas, maka sarana yang berada di Lingkungan 3 memiliki tingkat pelayanan paling tinggi terhadap kebutuhan sarana di Desa Blang Crum yaitu sebesar 38,45 %. Untuk sarana yang berada di Lingkungan 1 memiliki tingkat pelayanan tertinggi kedua terhadap kebutuhan sarana di Desa Blang Crum yaitu sebesar 30,79 %. Dan sarana yang berada di Lingkungan 2 memiliki pelayanan terendah terhadap kebutuhan sarana di Desa Blang Crum yaitu sebesar 30,76 %. Maka

berdasarkan Indeks Sentralitas, sarana yang memiliki frekuensi kegiatan terkecil adalah sarana perdagangan karena memiliki frekuensi keberadaan yang paling besar diantara sarana-sarana yang lain.

4.3.2. Analisis Deskriptif

4.3.2.1 Sarana Pendidikan

Berdasarkan Skalogram diatas maka sarana pendidikan yang ada di Desa Blang Crum adalah sebuah Taman Kanak-Kanak Al-Qautsar dan sebuah SD Negeri 18 Muara Dua. Kondisi bangunan kedua sarana pendidikan masih cukup baik dan layak dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jenis bangunan TK dan SD adalah bangunan permanen. TK Al-Qautsar hanya terdapat 2 ruang kelas dan menampung 80 siswa. Sedangkan SDN 18 Muara Dua yang ada di Desa Blang Crum, setiap tingkatan kelas masing-masing memiliki 1 buah kelas dengan daya tampung 30 siswa per kelas. Maka daya tampung SDN 18 Muara Dua adalah 180 siswa.

Berdasarkan Matrix Pola Permukiman, karena sarana pendidikan berupa SD dan TK hanya terdapat masing-masing 1 buah maka fungsi pelayanan masing-masing sarana tersebut terhadap kebutuhan sarana pendidikan di Desa Blang Crum adalah 100 %.

Dan berdasarkan Indeks Sentralitas, maka nilai bobot untuk TK dan SD tersebut adalah 100. Artinya sarana pendidikan tersebut memiliki frekuensi kegiatan yang cukup tinggi.

Tabel 4.13
Analisis Sarana Pendidikan Desa Blang Crum

No	Jenis Sarana	Jumlah	Kondisi Fisik Bangunan
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1	Bangunan fisik TK Al-Qautsar ini masih cukup baik karena tidak terdapat bagian bangunan yang sudah rusak baik atap, dinding, maupun lantai.
2	SD dan sederajat	1	Bangunan fisik TK Al-Qautsar ini masih cukup baik karena tidak terdapat bagian bangunan yang sudah rusak baik atap, dinding, maupun lantai.

Sumber : Hasil Analisis, 2006



Gambar 4.5
Sarana Pendidikan (SD Negeri 18 Muara Dua)



Gambar 4.6
Sarana Pendidikan (TK Al Qautsar)

Sebagai salah satu daerah yang mayoritas beragama Islam, maka selain sarana pendidikan yang bersifat umum, di Desa Blang Crum juga terdapat beberapa balai pengajian yang mereka gunakan untuk belajar mengaji. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 4.14**.

Tabel 4.14
Sarana Balai Pengajian Desa Blang Crum

No	Nama Balai Pengajian	Jumlah Anggota		Jumlah Guru	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Nurul Iman	20	20	2	1
2	Darul Ikhlas	40	25	3	1
3	Darul Munawwarah	24	30	-	2
4	Darul Muta'allim	118	124	3	1
5	Asyasyafi'iyah	40	-	1	-
6	Nurul Huda	18	12	1	1

Sumber : Hasil Analisis, 2006



Gambar 4.7
Balai Pengajian Nurul Iman

Untuk lebih jelas mengenai sarana pendidikan dan balai pengajian yang ada di Desa Blang Crum dapat dilihat pada peta eksisting sarana pendidikan (**Gambar 4.8**).

Peta 4.8

Peta Eksisting Sarana Pendidikan Desa Blang Crum



4.3.2.2 Sarana Kesehatan

Berdasarkan Skalogram, sarana kesehatan yang ada Desa Blang Crum adalah Polindes (Poliklinik Desa) dan Praktek Bidan. Masing-masing sarana kesehatan tersebut berjumlah 1 buah. Kondisi fisik bangunan Polindes dan Praktek Bidan masih cukup baik karena tidak terdapat kerusakan bangunan baik atap, dinding, maupun lantai. Jenis bangunannya adalah permanen. Polindes berada disebelah Balai Desa sedangkan Praktek Bidan berada dirumah bidan itu sendiri.

Berdasarkan Matrix Pola Permukiman, karena Polindes dan Praktek Bidan hanya terdapat masing-masing 1 buah, maka fungsi pelayanan masing-masing sarana tersebut terhadap kebutuhan sarana kesehatan di Desa Blang Crum adalah 100 %.

Dan berdasarkan Indeks Sentralitas, maka nilai bobot untuk Polindes dan Praktek Bidan tersebut adalah 100. Artinya sarana kesehatan tersebut memiliki frekuensi kegiatan yang cukup tinggi.

Tabel 4.15
Analisis Sarana Kesehatan Desa Blang Crum

No	Jenis Sarana	Jumlah	Kondisi Fisik Bangunan
1	Polindes	1	Bangunan fisik Polindes ini masih cukup baik karena tidak terdapat bagian bangunan yang sudah rusak baik atap, dinding, maupun lantai.
2	Praktek Bidan	1	Bangunan fisik Praktek Bidan ini masih cukup baik karena tidak terdapat bagian bangunan yang sudah rusak baik atap, dinding, maupun lantai.

Sumber : Hasil Analisis, 2006



Gambar 4.9
Polindes Desa Blang Crum

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana kesehatan Desa Blang Crum dapat dilihat pada peta eksisting sarana kesehatan (**Gambar 4.10**).

Peta 4.10

Peta Eksisting Sarana Kesehatan Desa Blang Crum



4.3.2.3 Sarana Perdagangan dan Jasa

Berdasarkan Skalogram, untuk sarana perdagangan, Desa Blang Crum telah dilayani oleh beberapa kios dan warung milik warga desa itu sendiri. Kios dan warung tersebut mereka bangun dengan biaya mereka masing-masing dan pada umumnya lokasinya berada di rumah warga itu sendiri. Jumlah warung yang ada di Desa Blang Crum adalah 5 buah, sedangkan jumlah kios adalah 8 buah. Perbedaan warung dan kios adalah dari segi luasan dan jumlah barang yang tersedia, warung lebih banyak barang yang tersedia dan luas ruangnya juga lebih besar daripada kios. Kondisi fisik bangunan warung dan kios masih cukup baik karena tidak terdapat kerusakan baik di dinding, atap dan lantai. Warung dan kios pada umumnya berada di rumah warga itu sendiri. Jenis bangunan warung adalah permanen sedangkan kios dari bangunan semi permanen.

Menurut Matrix Pola Permukiman, Lingkungan 1 karena terdapat paling banyak warung/kios sebanyak 6 buah (46,31 %) maka menjadi lingkungan yang terbesar dalam melayani kebutuhan sarana perdagangan di Desa Blang Crum, kemudian yang terbesar kedua terhadap pelayanan sarana di Desa Blang Crum adalah Lingkungan 3 sebesar 30,68 % atau sebanyak 4 buah warung/kios. Dan yang memberikan pelayanan terkecil terhadap kebutuhan sarana perdagangan di Desa Blang Crum adalah lingkungan 2 sebesar 23,01 % atau sebanyak 3 buah warung/kios.

Berdasarkan Indeks Sentralitas, maka nilai bobot untuk setiap warung/kios adalah sebesar 7,67. Oleh karena itu, lingkungan yang memiliki frekuensi kegiatan perdagangan terbesar adalah Lingkungan 1 sebesar 46,31. Lingkungan yang memiliki frekuensi kegiatan perdagangan terbesar kedua adalah Lingkungan 3 sebesar 30,68. Dan lingkungan yang memiliki frekuensi kegiatan perdagangan terkecil adalah Lingkungan 2 sebesar 23,01.

Selain itu di Desa Blang Crum juga terdapat jasa pelayanan telekomunikasi umum berupa wartel (warung telepon). Jumlah wartel di Desa Blang Crum adalah 1 unit, tetapi wartel ini sudah cukup melayani penduduk Desa Blang Crum karena pada umumnya saat sekarang ini banyak warga yang sudah memiliki telepon rumah sendiri atau telepon seluler.

Tabel 4.16
Analisis Sarana Perdagangan dan Jasa Desa Blang Crum

No	Jenis Sarana	Jumlah	Kondisi Fisik Bangunan
1	Warung	5	Bangunan fisik warung ini masih cukup baik karena tidak terdapat bagian bangunan yang sudah rusak baik atap, dinding, maupun lantai.
2	Kios	8	Bangunan fisik warung ini masih cukup baik karena tidak terdapat bagian bangunan yang sudah rusak baik atap, dinding, maupun lantai.

Sumber : Hasil Analisis, 2006



Gambar 4.11
Warung Desa Blang Crum



Gambar 4.12
Kios Desa Blang Crum

Untuk lebih jelas mengenai persebaran sarana perdagangan dan jasa Desa Blang Crum dapat dilihat pada peta eksisting sarana perdagangan dan jasa Desa Blang Crum (**Gambar 4.13**).

4.3.2.4 Sarana Peribadatan

Berdasarkan Skalogram, untuk fasilitas peribadatan di Desa Blang Crum hanya terdapat sebuah Meunasah/Mushalla, sedangkan Mesjid tidak terdapat di Desa Blang Crum. Kondisi mushalla di Desa Blang Crum kurang baik, selain bangunannya yang masih semi permanen, terdapat juga bagian-bagian lain yang sudah mulai rusak sedikit seperti atap, lantai dan dinding.

Berdasarkan Matrix Pola Permukiman, karena Mushalla merupakan satu-satunya sarana peribadatan yang terdapat di Desa Blang Crum, maka fungsi pelayanan sarana tersebut terhadap kebutuhan sarana peribadatan di Desa Blang Crum adalah 100 %.

Dan berdasarkan Indeks Sentralitas, maka nilai bobot untuk Mushalla tersebut adalah 100. Artinya sarana peribadatan tersebut memiliki frekuensi kegiatan yang cukup tinggi.

Untuk kebutuhan mesjid, mereka biasanya menggunakan mesjid yang berada di desa tetangga seperti di Desa Meunasah Manyang. Untuk lebih jelas mengenai sarana peribadatan di Desa Blang Crum dapat dilihat pada peta eksisting sarana peribadatan Desa Blang Crum (**Gambar 4.14**).



Peta 4.13

Peta Eksisting Sarana Perdagangan Dan Jasa Desa Blang Crum



Peta 4.14

Peta Eksisting Sarana Peribadatan Desa Blang Crum



4.3.2.5 Prasarana Air Bersih

Masyarakat Desa Blang Crum menggunakan air bersih yang berasal dari sumur. Hal ini karena jaringan PDAM belum tersedia di Desa Blang Crum. Kondisi sumur warga Desa Blang Crum cukup baik dan layak untuk dikonsumsi karena selain air sumur itu bersih dan jernih, kedalaman sumur juga sangat dangkal yaitu 1-2 meter. Hal ini karena topografi Desa Blang Crum berada pada ketinggian 0-5 meter dari permukaan laut. Selain itu, air sumur di Desa Blang Crum juga telah memenuhi parameter air bersih karena tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Untuk lebih jelas mengenai prasarana air bersih Desa Blang Crum dapat dilihat pada peta eksisting sarana peribadatan Desa Blang Crum (**Gambar 4.16**).



Gambar 4.15
Sumur Desa Blang Crum

Peta 4.16

Peta Eksisting Prasarana Air Bersih Desa Blang Crum



4.3.2.6 Prasarana Jalan

Jalan di Desa Blang Crum termasuk dalam jenis jalan lokal sekunder. Jalan di Desa Blang Crum sebagian telah diaspal, tetapi masih ada juga yang jenis makadam. Panjang jalan yang telah diaspal adalah 4.2 km. Sedangkan panjang jalan makadam adalah 4.3 km.

Jalan yang ada di Desa Blang Crum adalah:

- Jalan Medan – Banda Aceh

Jalan ini adalah yang menghubungkan Desa Blang Crum dengan daerah lain, termasuk dengan Kota Lhokseumawe. Panjang jalan ini adalah 4000 m dengan lebar 10 m. Perkerasan jalan ini sudah sangat baik yaitu dengan aspal beton. Kondisi jalan ini juga masih sangat baik karena tidak terdapat bagian jalan yang rusak.

- Jalan Meunasah

Jalan ini adalah jalan yang terbentang disepanjang Desa Blang Crum. Panjang jalan ini adalah 3800 m dengan lebar jalan 5 m. Untuk jalan ini belum adanya perkerasan karena jalan ini masih termasuk jenis jalan makadam. Kondisi jalan juga tidak terlalu baik karena masih banyak terdapat lobang genangan air hujan dan kondisi jalan juga tidak rata. Bila musim hujan kondisi jalan sangat becek karena jalan masih terdiri dari campuran batu dan tanah kuning.

- Jalan Lorong Barona

Jalan ini adalah jalan yang menuju ke lokasi relokasi pengungsi. Panjang jalan ini adalah 200 m dengan lebar 3 m. Jalan ini masih termasuk jenis jalan makadam dengan kondisi yang kurang baik.

- Jalan Lorong Lampoh Jok

Jalan ini juga salah satu jalan yang belum ada perkerasan aspal. Jalan Lorong Lampoh Jok ini masih berupa jalan makadam. Kondisi jalan ini juga kurang baik karena masih terdiri dari campuran batu dan tanah kuning sehingga masih banyak terdapat lubang dan pada musim hujan jalan ini juga becek. Panjang jalan ini adalah 300 m dengan lebar 3 m.

- Jalan Lorong Keulayu

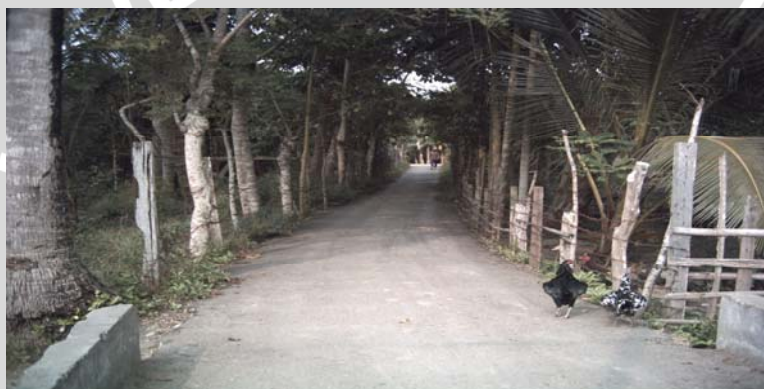
Untuk Jalan Lorong Kelayu ini kondisinya sudah lebih baik daripada Jalan Lorong Lampoh Jok karena seluruh jalan ini telah diaspal Hot Mix

walaupun masih terdapat beberapa lubang di jalan. Biaya pengaspalan jalan ini merupakan swadaya warga itu sendiri. Sehingga kondisi jalan yang memiliki panjang 200 m dan lebar 4 m ini sudah cukup baik.

Tabel 4.17
Analisis Jaringan Jalan Desa Blang Crum

No	Nama Jalan	Jenis Perkerasan	Panjang (m)	Lebar (m)	Kondisi Eksisting
1	Jalan Medan-B.Aceh	Aspal	4000	10	Tidak ada kerusakan
2	Jalan Meunasah	Makadam	3800	5	Berlubang dan becek saat musim hujan
3	Jalan Lorong Barona	Makadam	200	3	Berlubang dan becek saat musim hujan
4	Jalan Lr. Lampoh Jok	Makadam	300	3	Berlubang dan becek saat musim hujan
5	Jalan Lorong Keulayu	Aspal	200	4	Terdapat beberapa lubang

Sumber : Hasil Analisis, 2006



Gambar 4.17
Jalan Aspal (Lr. Keulayu)



Gambar 4.18
Jalan Makadam (Jl. Meunasah)

Untuk lebih jelasnya mengenai jaringan jalan di Desa Blang Crum dapat dilihat pada peta jaringan jalan Desa Blang Crum (**Gambar 4.19**).

Peta 4.19

Peta Eksisting Prasarana Jalan Desa Blang Crum



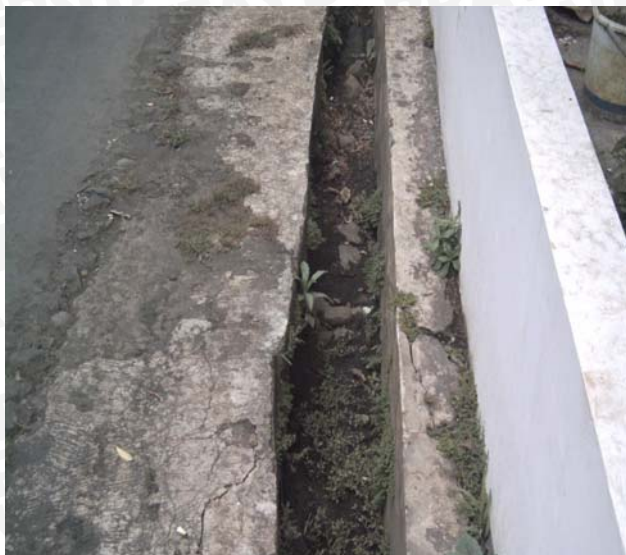
4.3.2.7 Prasarana Drainase

Saluran drainase di Desa Blang Crum yang berupa parit yang telah disemen masih sangat terbatas karena hanya berada sepanjang 800 m disepanjang jalan Medan-Banda Aceh dan 200 m di jalan Meunasah. Drainase ini termasuk jenis drainase terbuka dengan kondisi yang rusak karena tidak adanya perawatan baik dari pemerintah maupun dari warga itu sendiri. Dari 3800 m panjang jalan Meunasah, hanya sepanjang 200 m saja yang memiliki drainase dengan perkerasan semen dengan kondisi yang masih baik. Sedangkan untuk selebihnya di jalan Meunasah masih berupa parit yang diuruk sendiri oleh warga. Untuk saluran drainase di sepanjang jalan Lorong Lampoh Jok dan Lorong Keulayu saluran drainasenya masih berupa parit hasil urukan warga dengan kondisi yang tidak baik. Untuk warga yang berada di jalan Lorong Lampoh Jok dan sebagian jalan Meunasah, saluran yang mereka uruk tersebut langsung menuju ke alur sungai yang berada dibelakang rumah mereka.

Tabel 4.18
Analisis Jaringan Drainase Desa Blang Crum

No	Nama Jalan	Jenis Jaringan Drainase	Panjang (m)	Lebar (cm)	Kondisi Eksisting
1	Jalan Medan-Banda Aceh	Saluran terbuka	-Parit semen 800 -Parit uruk 2000	80	Dari 4000m panjang jalan hanya 800m saja yang telah dibangun saluran dengan kondisi yang telah rusak. Sisanya hanya berupa parit uruk
2	Jalan Meunasah	Saluran terbuka	-Parit semen 200 -Parit uruk 2800	60	Dari 3800m panjang jalan hanya 200m saja yang telah dibangun saluran dengan kondisi yang masih baik. Sisanya hanya berupa parit uruk
3	Jalan Lorong Lampoh Jok	Saluran terbuka	200	30	Saluran mereka gali sendiri menuju alur sungai terdekat dengan kondisi yang kurang baik
4	Jalan Lorong Keulayu		200	30	Saluran mereka gali sendiri dengan kondisi yang kurang baik

Sumber : Hasil Analisis, 2006



Gambar 4.20
Saluran Parit Beton Desa Blang Crum



Gambar 4.21
Saluran Parit Uruk Desa Blang Crum

Untuk lebih jelasnya mengenai arah dan saluran drainase Desa Blang Crum dapat dilihat pada peta eksisting jaringan drainase Desa Blang Crum (**Gambar 4.22**).



Peta 4.22

Peta Eksisting Prasarana Drainase Desa Blang Crum



4.3.2.8 Prasarana Sanitasi

Prasarana sanitasi di Desa Blang Crum pada umumnya telah baik karena seluruh rumah warga yaitu sebanyak 312 rumah telah memiliki jamban masing-masing. Hanya saja jamban mereka ada yang didalam rumah dan ada yang diluar rumah. Dan semua warga telah memiliki septiktank masing-masing sebagai tempat pembuangan akhir dari jamban tersebut. Pada umumnya kondisi jamban mereka cukup baik. Di Desa Blang Crum juga terdapat 3 buah jamban umum tapi warga sudah jarang menggunakannya karena pada saat ini semua rumah telah memiliki jamban masing-masing. Jamban umum tersebut dibangun pada saat sebelum semua rumah warga memiliki jamban masing-masing. Jadi pada saat itu, jamban umum masih dibutuhkan oleh masyarakat Desa Blang Crum.

Tabel 4.19
Analisis Prasarana Sanitasi Desa Blang Crum

No	Lokasi dan Jenis Jamban	Jumlah	Kondisi Fisik Bangunan
1	Jamban didalam rumah	195	Baik
2	Jamban diluar rumah	117	Baik
3	Jamban umum	3	Baik

Sumber : Hasil Analisis, 2006

Untuk lebih jelas mengenai sanitasi Desa Blang Crum dapat dilihat pada peta eksisting sanitasi Desa Blang Crum (**Gambar 4.25**).

4.3.2.9 Prasarana Sampah

Untuk sarana persampahan di Desa Blang Crum meraka memiliki sebuah TPS untuk menampung sampah. Kondisi bak TPS cukup baik karena telah dikelilingi oleh pagar tembok sehingga sampah tidak berceceran keluar lokasi TPS. Akan tetapi di Desa Blang Crum tidak terdapat pasukan kuning untuk mengangkut sampah warga untuk dibawa ke TPS, jadi warga membawa sampahnya masing-masing untuk dibuang ke TPS setempat.

Untuk perhitungan potensi volume sampah yang dihasilkan penduduk digunakan pendekatan dengan menggunakan rumus:

$$Q_k = q \times p$$

Dimana:

Q_k : potensi volume sampah yang dihasilkan

q : koefisien kuantitas sampah (liter/orang/hari)

dengan ketentuan:

$q = 2.5 - 2.75$ lt/orang/hari; untuk ekonomi rendah

p = jumlah penduduk

$$\begin{aligned} Q_k &= q \times p \\ &= 2,5 \text{ lt/org/hr} \times 1868 \text{ org} \\ &= 4670 \text{ lt/hr} \end{aligned}$$

Dengan menggunakan rumus diatas, dapat diketahui bahwa volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk Desa Blang Crum adalah 4.670 lt/hr. Volume 1 kontainer bak sampah adalah 6 m^3 atau lebih kurang 6000 liter.



Gambar 4.23
TPS Desa Blang Crum



Gambar 4.24
Jamban Desa Blang Crum

Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi TPS di Desa Blang Crum dapat dilihat pada peta eksisting persampahan Desa Blang Crum (**Gambar 4.26**).

Peta 4.25

Peta Eksisting Prasarana Sanitasi Desa Blang Crum



Peta 4.26

Peta Eksisting Prasarana Sampah Desa Blang Crum



4.4. Analisis Normatif

Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi ketersediaan sarana prasarana di Desa Blang Crum. Langkah awal yaitu menghitung kebutuhan sarana prasarana di Desa Blang Crum kemudian membandingkan antara sarana prasarana yang tersedia dengan sarana prasara yang dibutuhkan.

4.4.1. Sarana Pendidikan

Berdasarkan standar sarana pendidikan Dep. PU untuk Perdesaan dan Kota Kecil, maka dapat dihitung kebutuhan sarana pendidikan di Desa Blang Crum berdasarkan usia sekolah penduduk Desa Blang Crum dan pengungsi Mon Geudong. Dalam analisis berikut, jumlah penduduk yang digunakan adalah jumlah penduduk Desa Blang Crum dijumlahkan dengan jumlah pengungsi Mon Geudong.

Tabel 4.20
Analisis Kebutuhan TK & SD Desa Blang Crum

No	Jenis Sarana	Jumlah Eksisting	Standar	Jumlah Penduduk (Usia Sekolah)	Jumlah Sarana Dibutuhkan
1	TK	1	1 TK=80 siswa	246	4
2	SD	1	1 SD=180 siswa	279	2

Sumber : Hasil Analisis, 2006

Sedangkan perhitungan kebutuhan SLTP dan SMU tidak menggunakan standar berdasarkan usia sekolah tetapi berdasarkan standar pelayanan SLTP dan SMU terhadap jumlah penduduk disuatu daerah menurut standar sarana Dep. PU untuk Perdesaan dan Kota Kecil.

Tabel 4.21
Analisis Kebutuhan SLTP & SMU Desa Blang Crum

No	Jenis Sarana	Jumlah Eksisting	Standar	Jumlah Penduduk	Jumlah Sarana Dibutuhkan
1	SLTP	-	1 SLTP=minimal 4800 jiwa	2771	-
2	SMU	-	1 SMU=minimal 4800 jiwa	2771	-

Sumber : Hasil Analisis, 2006

Dari hasil analisis pada tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan berupa TK dan SD yang tersedia di Desa Blang Crum belum memenuhi kebutuhan penduduk berdasarkan standar kebutuhan sarana pendidikan. Setelah terjadi penambahan penduduk dengan adanya penambahan pengungsi Mon Geudong, maka jumlah TK meningkat kebutuhannya menjadi 4 buah dan SD meningkat

kebutuhannya menjadi 2 buah. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan penduduk, maka sarana pendidikan yang harus ditambah adalah Taman Kanak-Kanak sebanyak 3 buah dan SD sebanyak 1 buah. Untuk distribusi rencana TK dan SD di Desa Blang Crum harus berdasarkan skala pelayanan berdasarkan radius jarak pelayanan. Untuk TK radius pelayanannya adalah 500 m². Oleh karena itu, maka untuk TK distribusinya diharapkan berada disetiap unit lingkungan termasuk 1 buah dilokasi relokasi. Sedangkan untuk SD juga diperlukan penambahan 1 buah. Karena SD yang telah ada berada di Lingkungan 3, maka untuk memaksimalkan pelayanan SD berdasarkan Matrix Pola Permukiman, SD yang akan ditambah direncanakan di Lingkungan 1. Sehingga setiap SD setidaknya-tidaknnya dapat melayani dua unit lingkungan.

Untuk sarana pendidikan berupa SLTP dan SMU, setelah dianalisis dan dievaluasi, selain memang belum tersedia di Desa Blang Crum, bahkan setelah ditambah dengan jumlah pengungsi Mon Geudong yang sebanyak 903 jiwa pun jumlah tersebut belum memenuhi standar kebutuhan sarana pendidikan. Maka, untuk sarana pendidikan SLTP, SMU, dan Perguruan Tinggi yang belum tersedia di Desa Blang Crum, penduduk di Desa Blang Crum tersebut dapat menggunakan sarana pendidikan yang berada diluar Desa Blang Crum karena seperti SLTP dan SMU Negeri yang terdapat di Desa Kandang karena jaraknya tidak terlalu jauh. Untuk lebih jelas mengenai sarana pendidikan di Desa Blang Crum dapat dilihat pada peta analisis sarana pendidikan Desa Blang Crum (**Gambar 4.27**) dan peta persebaran sarana pendidikan di Kecamatan Muara Dua. (**Gambar 4.28**).

Peta 4.27

Peta Evaluasi Sarana Pendidkan Desa Blang Crum



Peta 4.28

Peta Persebaran Sekolah Di Kec Muara Dua



4.4.2. Sarana Kesehatan

Berdasarkan hasil analisis eksisting sarana kesehatan, maka dapat dihitung kebutuhan sarana kesehatan untuk penduduk Desa Blang Crum dan pengungsi Mon Geudong dengan menggunakan standar sarana Dep. PU untuk Perdesaan dan Kota Kecil.

Tabel 4.22
Analisis Kebutuhan Sarana Kesehatan Penduduk Desa Blang Crum

No	Sarana	Jlh Penduduk (Jiwa)	Eksisting	Standar (Jiwa)	Kebutuhan	Penambahan Sarana
1	Apotek	2771	-	-	-	Tidak diperlukan penambahan karena sarana yang tersedia telah mamapu melayani penduduk
2	Bidan Desa		1	5000	1	
3	Balai Pengobatan		1	10.000	1	
4	Puskesmas		-	30.000	-	

Sumber : Hasil Analisis, 2006

Dari hasil analisis pada tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana kesehatan yang ada Desa Blang Crum hanya sebuah Polindes (Poliklinik Desa) dan sebuah praktek Bidan Desa. Untuk Apotek, toko obat dan lain-lain belum tersedia. Pada umumnya masyarakat Desa Blang Crum akan pergi ke Kota Lhokseumawe untuk memenuhi kebutuhan akan sarana kesehatan tersebut. Di desa yang bertetangga dengan Desa Blang Crum yaitu Desa Bukit Rata terdapat sebuah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia yang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Kota Lhokseumawe dan masyarakat Kabupaten Aceh Utara karena skala pelayanan rumah sakit ini adalah skala regional. Selain itu juga terdapat sebuah RS Swasta PT. Arun di Desa Blangtuphat yang masih termasuk kedalam Kecamatan Muara Dua. Oleh karena itu, maka pengungsi Mon Geudong juga dapat menggunakan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia tersebut untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka.

Berdasarkan standar kebutuhan sarana perdesaan dan kota kecil, maka skala pelayanan untuk sebuah Balai Pengobatan/Polindes adalah 10.000, apotek dan BKIA melayani penduduk minimal 10.000 jiwa, Puskesmas melayani penduduk minimal 30.000 jiwa, dan Rumah Sakit melayani penduduk minimal 140.000 jiwa.

Berdasarkan skala pelayanan tersebut, ketersediaan sarana kesehatan berupa satu unit Polindes dan sebuah praktek Bidan Desa, walaupun tidak memenuhi standar sarana dari segi jumlah penduduk, tetapi sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduk

Desa Blang Crum dan pengungsi Mon Geudong yang akan dipindahkan ke desa tersebut. Untuk lebih jelas mengenai evaluasi sarana kesehatan di Desa Blang Crum dapat dilihat pada peta evaluasi sarana kesehatan (**Gambar 4.29**) dan untuk sekolah yang terdapat di Kecamatan Muara Dua dapat dilihat pada peta persebaran sarana kesehatan di Kecamatan Muara Dua (**Gambar 4.30**).



Peta 4.29

Peta Evaluasi Sarana Kesehatan Desa Blang Crum



Peta 4.30

Peta Persebaran Rumah Sakit Di Kec. Muara Dua



4.4.3. Sarana Perdagangan dan Jasa

Berdasarkan hasil analisis eksisting sarana perdagangan dan jasa di Desa Blang Crum, maka dapat dihitung kebutuhan akan sarana perdagangan tersebut di Desa Blang Crum dengan menggunakan standar sarana Dep. PU untuk Perdesaan dan Kota Kecil.

Tabel 4.23
Analisis Kebutuhan Sarana Perdagangan Desa Blang Crum

No	Sarana	Jlh Penduduk (Jiwa)	Eksisting	Standar (Jiwa)	Kebutuhan	Penambahan Sarana
1	Warung/Kios	2771	13	250	12	Tidak diperlukan penambahan karena sarana yang tersedia telah mamapu melayani penduduk
2	Toko		-	2500	1	1
3	Pasar Umum		-	10.000	-	-

Sumber : Hasil Analisis, 2006

Dari hasil analisis sarana perdagangan dan jasa diatas dapat diketahui bahwa setelah terjadi penambahan jumlah penduduk akibat masuknya pengungsi Mon Geudong, untuk warung dan kios, dari segi jumlahnya tetap tidak diperlukan penambahan sarana karena jumlah yang ada telah lebih 1 buah. Sedangkan yang perlu penambahan adalah sarana perdagangan berupa toko sebanyak 1 buah. Karena menurut standar Dep. PU, 1 buah toko melayani 2500 penduduk.

Bila dilihat dari segi jumlah, warung dan kios yang terdapat di Desa Blang Crum memang telah melebihi dari standar Dep. PU. Tetapi bila ditinjau dari segi persebarannya menurut Matrix Pola Permukiman, maka sangat kurang, karena semua sarana perdagangan yang telah ada di Desa Blang Crum hanya tersebar dilokasi permukiman penduduk Desa Blang Crum, sedangkan dilokasi relokasi belum tersedia sarana perdagangan dan jasa apapun. Oleh karena itu, untuk kebutuhan sarana perdagangan khusus bagi pengungsi Mon Geudong dilokasi relokasi juga akan dihitung sehingga diketahui jumlah sarana perdagangan yang dibutuhkan oleh pengungsi dilokasi relokasi.

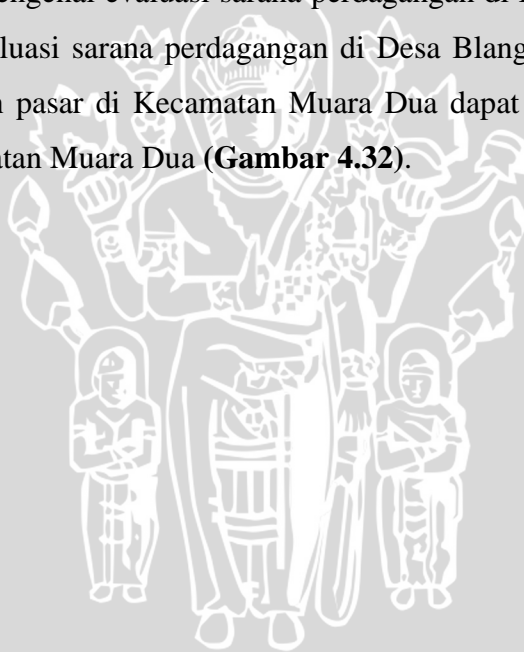
Tabel 4.24
Analisis Kebutuhan Sarana Perdagangan Dilokasi Relokasi Desa Blang Crum

No	Sarana	Jlh Penduduk (Jiwa)	Eksisting	Standar (Jiwa)	Kebutuhan	Penambahan Sarana
1	Warung/Kios	903	-	250	4	4 buah dilokasi relokasi
2	Toko		-	2500	-	-
3	Pasar Umum		-	10.000	-	-

Sumber : Hasil Analisis, 2006

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana perdagangan yang dibutuhkan dilokasi relokasi untuk memenuhi kebutuhan sarana perdagangan pengungsi Mon Geudong adalah warung/kios sebanyak 4 buah. Untuk kebutuhan pasar umum, penduduk Desa Blang Crum dan pengungsi Mon Geudong dapat menggunakan pasar Cunda karena pasar tersebut berskala regional.

Untuk lebih jelas mengenai evaluasi sarana perdagangan di Desa Blang Crum dapat dilihat pada peta evaluasi sarana perdagangan di Desa Blang Crum (**Gambar 4.31**) dan untuk persebaran pasar di Kecamatan Muara Dua dapat dilihat pada peta persebaran pasar di Kecamatan Muara Dua (**Gambar 4.32**).



Peta 4.31

Peta Evaluasi Sarana Perdagangan Dan Jasa Desa Blang Crum



Peta 4.32

Peta Persebaran Pasar Di Kec. Muara Dua



4.4.4. Sarana Peribadatan

Berdasarkan hasil analisis eksisting sarana peribadatan dan jasa di Desa Blang Crum, maka dapat dihitung kebutuhan akan sarana peribadatan tersebut di Desa Blang Crum dengan menggunakan standar sarana Dep. PU untuk Perdesaan dan Kota Kecil.

Tabel 4.25
Analisis Kebutuhan Sarana Peribadatan Desa Blang Crum

No	Sarana	Jlh Penduduk (Jiwa)	Eksisting	Standar (Jiwa)	Kebutuhan	Penambahan Sarana
1	Mesjid	2771	-	2500	1	1
2	Mushalla		1	500	5	4
3	Gereja		-	10.000	-	-

Sumber : Hasil Analisis, 2006

Dari hasil perhitungan sarana peribadatan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan standar sarana peribadatan Dep. PU, setelah jumlah penduduk Desa Blang Crum bertambah dengan jumlah pengungsi Mon Geudong, maka diperlukan penambahan sarana peribadatan berupa 1 buah Mesjid dan 4 buah Mushalla. Untuk mengoptimalkan fungsi dari Mesjid dan Mushalla tersebut, hendaknya diperhatikan pendistribusiannya. Karena jumlah Mushalla yang akan ditambah di Desa Blang Crum berjumlah 4 buah, maka persebarannya minimal terdapat 1 buah Mushalla disetiap unit lingkungan. Sehingga dari segi pelayanannya bisa lebih optimal karena jarak yang ditempuh bisa lebih terjangkau. Sedangkan untuk penambahan Mesjid, hendaknya diletakkan dipusat Desa Blang Crum sehingga jarak pelayanannya bisa sama. Selain penambahan sarana baru, juga dibutuhkan perbaikan Mushalla yang lama agar terciptanya kenyamanan dan ketenangan warga yang beribadah didalamnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta evaluasi sarana peribadatan Desa Blang Crum (**Gambar 4.33**) dan peta persebaran mesjid di Kecamatan Muara Dua (**Gambar 4.34**).

Peta 4.33

Evaluasi Sarana Peribadatan Desa Blang Crum



Peta 4.34

Peta Persebaran Mesjid Di Kec. Muara Dua

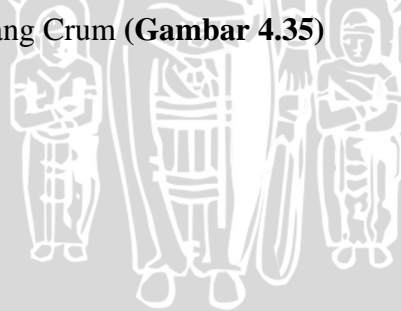


4.4.5. Prasarana Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan yang vital bagi manusia. Karena selain dipergunakan untuk keperluan minum, air bersih juga digunakan untuk keperluan mandi dan memasak. Sumber air masyarakat Desa Blang Crum pada umumnya adalah air sumur. Masyarakat yang memiliki sumur pribadi yaitu 312 rumah. Dengan kata lain seluruh rumah di Desa Blang Crum memiliki sumur sendiri. Ditambah dengan dua buah sumur umum. Hal ini disebabkan karena jangkauan PDAM masih sangat terbatas, hanya masih disekitar kota saja.

Kondisi sumur warga Desa Blang Crum cukup baik dan layak untuk dikonsumsi karena selain air sumur itu bersih dan jernih, kedalaman sumur juga sangat dangkal yaitu 1-2 meter. Hal ini karena topografi Desa Blang Crum berada pada ketinggian 0-5 meter dari permukaan laut. Selain itu, air sumur di Desa Blang Crum juga telah memenuhi parameter air bersih karena tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa.

Jadi tidak ada masalah menyangkut penyediaan prasarana air bersih bagi penduduk Desa Blang Crum. Oleh karena itu untuk pengungsi dilokasi relokasi, dalam pembangunan rumah bagi mereka, juga harus disediakan sebuah sumur sebagai sarana sumber air bersih bagi pengungsi tersebut pada masing-masing rumah mereka. Untuk lebih jelas mengenai evaluasi air bersih di Desa Blang Crum dapat dilihat pada peta evaluasi air bersih Desa Blang Crum (**Gambar 4.35**)



Peta 4.35

Peta Evaluasi Air Bersih Di Desa Blang Crum



4.4.6. Prasarana Jalan

Jalan di Desa Blang Crum termasuk dalam jenis jalan lokal sekunder. Jalan di Desa Blang Crum sebagian telah diaspal, tetapi masih ada juga yang jenis makadam. Panjang jalan yang telah diaspal termasuk jalan negara adalah 4.2 km. Sedangkan panjang jalan makadam adalah 4.3 km. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada evaluasi tiap jalan yang ada di Desa Blang Crum berikut ini:

- Jalan Medan – Banda Aceh

Dari hasil analisis sebelumnya maka tidak dibutuhkan perbaikan untuk jalan Negara ini. Hanya diperlukan perawatan berkala oleh pemerintah saja.

- Jalan Meunasah

Dari hasil analisis sebelumnya maka diperlukan perbaikan kondisi jalan ini berupa pengaspalan jalan sehingga bisa melancarkan pergerakan warga Desa Blang Crum dan memperindah kondisi desa tersebut.

- Jalan Lorong Barona

Dari hasil analisis sebelumnya maka pada saat lokasi pengungsi sudah mulai dibangun maka pemerintah juga diharapkan meningkatkan kelas jalan menjadi lokal sekunder dan mengaspal Jalan Lorong Barona tersebut serta melakukan pelebaran jalan sehingga lebar jalan menjadi 4 – 5 m. Hal ini tentu akan memudahkan kendaraan roda empat untuk masuk ke lokasi relokasi tersebut.

- Jalan Lorong Lampoh Jok

Dari hasil analisis sebelumnya maka diperlukan pelebaran jalan menjadi 4 – 5 m dan perbaikan untuk prasarana jalan ini berupa pengaspalan Hot Mix sehingga kondisi jalan menjadi lebih baik serta membuat desa menjadi lebih indah dan nyaman.

- Jalan Lorong Keulayu

Dari hasil analisis sebelumnya maka tidak diperlukan lagi perbaikan untuk jalan ini karena kondisi jalan yang memiliki panjang 200 m dan lebar 4 m ini sudah cukup baik. Hanya saja diperlukan perawatan oleh warga itu sendiri.

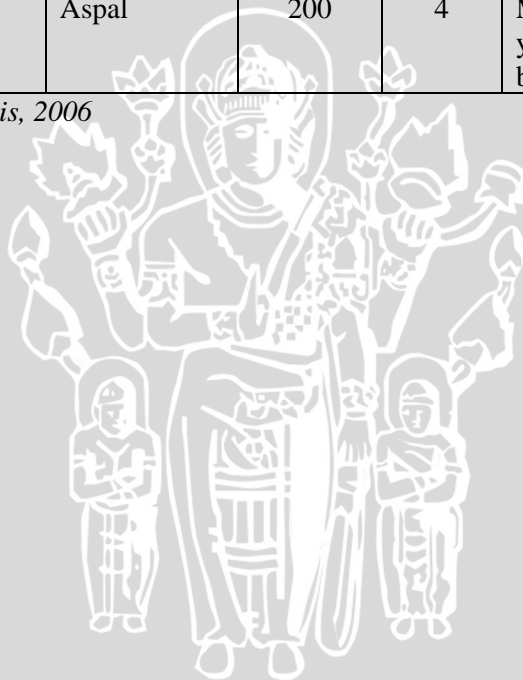
Karena adanya perencanaan lokasi relokasi di Desa Blang Crum, maka akan ada penambahan ruas jalan di lokasi tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 jalan dilokasi relokasi tersebut cukup berkelas lokal sekunder dengan lebar 5 meter dan diaspal hotmix. Mengenai evaluasi

jaringan jalan di Desa Blang Crum dapat dilihat pada evaluasi jaringan jalan di Desa Blang Crum (**Gambar 4.36**).

Tabel 4.26
Evaluasi Jaringan Jalan Desa Blang Crum

No	Nama Jalan	Jenis Perkerasan	Panjang (m)	Lebar (m)	Evaluasi
1	Jalan Negara	Aspal	4000	12	Perawatan secara bekala
2	Jalan Meunasah	Makadam	3800	5	Pengaspalan Hot Mix
3	Jalan Lorong Barona	Makadam	200	3	Pelebaran jalan menjadi 5m dan pengaspalan Hot Mix
4	Jalan Lorong Lampoh Jok	Makadam	300	3	Pelebaran jalan menjadi 5m dan pengaspalan Hot Mix
5	Jalan Lorong Keulayu	Aspal	200	4	Menambal jalan yang telah berlobang

Sumber : Hasil Analisis, 2006



Peta 4.36

Peta Evaluasi Jaringan Jalan Di Desa Blang Crum



4.4.7. Prasarana Drainase

Saluran drainase di Desa Blang Crum yang berupa parit yang telah disemen masih sangat terbatas karena hanya berada sepanjang 800 m disepanjang jalan Medan – Banda Aceh dan 200 m di jalan Meunasah. Drainase ini termasuk jenis drainase terbuka dengan kondisi yang rusak karena tidak adanya perawatan baik dari pemerintah maupun dari warga itu sendiri. Dari 3800 m panjang jalan Meunasah, hanya sepanjang 200 m saja yang memiliki drainase dengan perkerasan semen dengan kondisi yang masih baik. Sedangkan untuk selebihnya di jalan Meunasah masih berupa parit yang diuruk sendiri oleh warga. Untuk saluran drainase di sepanjang jalan Lorong Lampoh Jok dan Lorong Keulayu saluran drainasenya masih berupa parit hasil urukan warga dengan kondisi yang tidak baik. Untuk warga yang berada di jalan Lorong Lampoh Jok saluran yang mereka uruk tersebut langsung menuju ke alur sungai yang berada dibelakang rumah mereka.

Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan drainase yang baik untuk seluruh jalan yang berada di Desa Blang Crum dan pada kawasan relokasi pengungsi. Untuk jalan Medan – Banda Aceh diperlukan perpanjangan saluran drainase sehingga mencapai alur sungai yang berada di desa yang berhubungan ke sungai Krueng Meuraksa. Untuk jalan lainnya juga dibuatkan saluran drainase yang merupakan perbaikan dari saluran drainase yang telah ada sebelumnya. Seluruh saluran drainasenya, baik untuk Desa Blang Crum maupun lokasi relokasi cukup dengan saluran terbuka dan perkerasan semen saja agar lebih mudah perawatan dan dapat meminimalkkan biaya pembuatan saluran.

Untuk lebih jelas mengenai evaluasi saluran drainase di Desa Blang Crum dapat dilihat pada peta evaluasi saluran drainase Desa Blang Crum (**Gambar 4.37**).

Tabel 4.27
Evaluasi Jaringan Drainase Desa Blang Crum

No	Nama Jalan	Jenis Jaringan Drainase	Panjang (m)	Lebar (cm)	Kondisi Eksisting	Evaluasi
1	Jalan Medan-Banda Aceh	Saluran terbuka	-Parit semen 800 -Parit uruk 2000	80	Dari 4000m panjang jalan hanya 800m saja yang telah dibangun saluran dengan kondisi yang telah rusak. Sisanya hanya berupa parit uruk	Dibutuhkan perpanjangan saluran drainase sampai ke alur sungai dengan jenis saluran terbuka dan perkerasan semen
2	Jalan Meunasah	Saluran terbuka	-Parit semen 200 -Parit uruk 2800	60	Dari 3800m panjang jalan hanya 200m saja yang telah dibangun saluran dengan kondisi yang masih baik. Sisanya hanya berupa parit uruk	Dibutuhkan pembuatan saluran drainase sampai ke alur sungai dengan jenis saluran terbuka dan perkerasan semen
3	Jalan Lorong Barona	Saluran terbuka	-	-	-	Dibutuhkan pembuatan saluran drainase sampai ke alur sungai dengan jenis saluran terbuka dan perkerasan semen
4	Jalan Lorong Lampoh Jok	Saluran terbuka	200	30	Saluran mereka gali sendiri menuju alur sungai terdekat dengan kondisi yang kurang baik	Dibutuhkan pembuatan saluran drainase sampai ke alur sungai dengan jenis saluran terbuka dan perkerasan semen
5	Jalan Lorong Keulayu		200	30	Saluran mereka gali sendiri dengan kondisi yang kurang baik	Dibutuhkan pembuatan saluran drainase dengan jenis saluran terbuka dan perkerasan semen

Sumber : Hasil Analisis, 2006

Peta 4.37

Peta Evaluasi Jaringan Drainase Di Desa Blang Crum



4.4.8. Prasarana Sanitasi

Prasarana sanitasi di Desa Blang Crum pada umumnya telah baik karena seluruh rumah warga yaitu sebanyak 312 rumah telah memiliki jamban masing-masing. Hanya saja jamban mereka ada yang didalam rumah dan ada yang diluar rumah. Dan semua warga telah memiliki septiktank masing-masing sebagai tempat pembuangan akhir dari jamban tersebut. Pada umumnya kondisi jamban mereka cukup baik. Di Desa Blang Crum juga terdapat 3 buah jamban umum tapi warga sudah jarang menggunakannya karena pada saat ini semua rumah telah memiliki jamban masing-masing. Oleh karena itu tidak dibutuhkan penambahan jamban umum lagi karena setiap rumah telah memiliki jamban masing-masing.

Sedangkan untuk perencanaan permukiman di lokasi relokasi, setiap rumah juga harus dilengkapi dengan prasarana MCK didalam rumah dan septiktank. Sehingga tingkat kesehatan warga bisa menjadi lebih baik daripada di desa asal mereka. Untuk evaluasi sanitasi Desa Blang Crum dapat dilihat pada peta evaluasi sanitasi Desa Blang Crum (**Gambar 4. 38**).

4.4.9. Prasarana Sampah

Untuk sarana persampahan di Desa Blang Crum mereka memiliki sebuah TPS yang menampung sampah mereka. Akan tetapi di Desa Blang Crum tidak terdapat pasukan kuning untuk mengangkut sampah warga untuk dibawa ke TPS, jadi warga membawa sampahnya masing-masing untuk dibuang ke TPS setempat.

Sampah yang dihasilkan oleh penduduk Desa Blang Crum ditambah dengan pengungsi Mon Geudong adalah :

Volume sampah	=	koefisian kuantitas sampah x jumlah penduduk
	=	2.5 x (1868 + 903)
	=	6927.5 ltr/hari

Dari perhitungan diatas dapat kita ketahui bahwa volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk Desa Blang Crum dan Pengungsi Mon Geudong adalah 6927,5 liter. Satu kontainer TPS bervolume 6 m³. Melihat dari volume sampah yang dihasilkan di Desa Blang Crum, bila dibandingkan dengan volume TPS yang sekitar 6000 liter maka sampah yang dihasilkan melebihi kapasitas volume bak TPS. Tetapi

karena kelebihan hanya sedikit dan sampah diangkut oleh truk sampah untuk dibawa ke TPA setiap dua hari sekali maka sampah yang berlebih tadi tidak akan jadi suatu masalah yang besar karena tidak akan terjadi penumpukan sampah yang berlebihan.

Menurut standar sampah perdesaan dan kota kecil, setiap 2 m³ volume bak sampah melayani 200 buah rumah. Volume total sebuah kontainer sampah adalah 6 m³ dan dapat melayani 600 buah rumah. Oleh karena jumlah rumah yang ada di Desa Blang Crum adalah 312 dan ditambah dengan rumah yang akan dibangun dilokasi relokasi sebanyak 189 rumah, jadi total rumah di Desa Blang Crum 501 rumah, maka 1 kontainer sampah masih cukup untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh penduduk Desa Blang Crum dan Pengungsi Mon Geudong.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan persampahan maka di Desa Blang Crum dan lokasi relokasi, maka direkomendasikan pengadaan pasukan kuning yang bertujuan untuk mengumpulkan sampah warga untuk dibawa ke TPS. Jumlah pasukan kuning yang menggunakan gerobak direncanakan 10 unit. Jumlah ini didapat dari perhitungan berdasarkan standar DPU yaitu setiap 1 unit gerobak melayani 50 KK. Maka di Desa Blang Crum dibagi kedalam 10 wilayah pelayan. Wilayah pelayanan 1-6 untuk penduduk Desa Blang Crum dan wilayah pelayanan 7-10 berada dilokasi relokasi. Untuk lebih jelas mengenai evaluasi persampahan dan skala pelayanan pasukan kuning di Desa Blang Crum tersebut dapat dilihat pada peta evaluasi persampahan Desa Blang Crum (**Gambar 4.39**).

Peta 4.38

Peta Evaluasi Sanitasi Desa Blang Crum



Peta 4.39

Peta Evaluasi Sampah Desa Blang Crum



BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1. Kesimpulan

Dalam penelitian “Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana Di Desa Blang Crum Akibat Relokasi Pengungsi Mon Geudong”, yang membandingkan antara kebutuhan penduduk dengan sarana prasarana yang tersedia di Desa Blang Crum, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pada umumnya seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan oleh penduduk Desa Blang Crum dan pengungsi Mon Geudong telah tersedia di Desa Blang Crum. Dari segi jumlah, sarana yang kurang adalah sarana pendidikan berupa TK dan SD. Dari segi kondisi fisik bangunan yang masih kurang baik adalah mushalla, beberapa ruas jalan dan saluran drainase. Dari segi pelayanan, seluruh sarana prasarana yang ada di Desa Blang Crum telah mampu untuk melayani penduduk yang ada di Desa Blang Crum.
2. Berdasarkan hasil evaluasi, maka sarana yang perlu ditambah agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk Desa Blang Crum dan pengungsi Mon Geudong di Desa Blang Crum adalah sarana pendidikan berupa penambahan 3 buah Taman Kanak-Kanak, 1 buah SD, 4 buah warung/kios dan 1 buah toko dilokasi relokasi.

5.2. Rekomendasi dan Saran

5.2.1 Rekomendasi

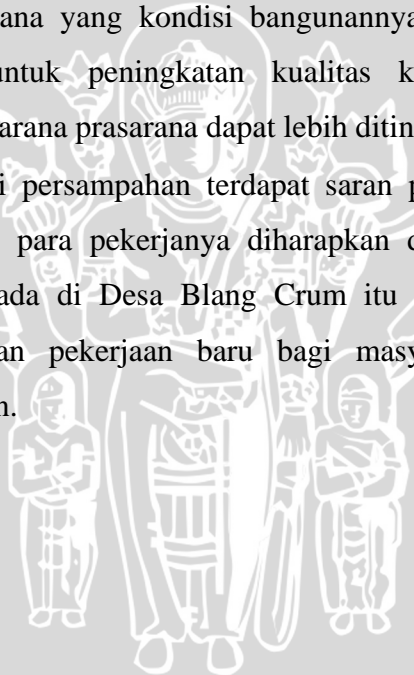
Beberapa rekomendasi bagi kepentingan penelitian lebih lanjut yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

Adanya keterbatasan data, waktu dan tenaga menyebabkan penulis kesulitan dalam mengetahui kondisi yang lebih detil khususnya untuk lokasi relokasi. Untuk itu, bagi pihak yang berwenang diharapkan dapat melakukan inventarisasi data selengkapnya agar dapat menjadi landasan yang kuat dalam penelitian-penelitian selanjutnya maupun upaya pembangunan di masa yang akan datang.

5.2.2. Saran

Saran dari penelitian “Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana Di Desa Blang Crum Akibat Relokasi Pengungsi Mon Geudong” antara lain sebagai berikut:

- Penelitian hanya meneliti sebatas faktor fisik dan non fisiknya saja, untuk kepentingan studi selanjutnya dapat dipertimbangkan aspek-aspek lainnya dalam pelestarian, antara lain aspek hukum, ekonomi dan sosial secara lebih mendalam.
- Untuk sarana pendidikan dan perdagangan yang perlu ditambah maka dalam perencanaan titik lokasi sarana barunya hendaklan diperhatikan persebaran dari sarana yang telah ada sehingga sarana yang baru dapat berguna secara maksimal bagi pengungsi Mon Geudong dan penduduk Desa Blang Crum.
- Untuk sarana prasarana yang kondisi bangunannya masih kurang baik maka disarankan untuk peningkatan kualitas kondisi bangunannya sehingga pelayanan sarana prasarana dapat lebih ditingkatkan lagi.
- Berdasarkan evaluasi persampahan terdapat saran penambahan pasukan kuning, maka untuk para pekerjanya diharapkan dari warga desa dan pengungsi yang berada di Desa Blang Crum itu saja, sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan.



Daftar Pustaka

Referensi :

Ibrahim, Syahrul, *Pendayagunaan Rencana Detail Tata Ruang Kota*, Jakarta: Trikarasa, 1995

Jaya Dinata, T. Johara, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Perdesaan, Perkotaan Dan Wilayah*, Bandung : ITB, 1999

Marzuki, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : Graha Indo, 1998

Nasir, Mohammad, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indo, 1998

Kalbermatten, M. John, *Teknik Sanitasi Tepat Guna*, Bandung : alumni, 1987

Singa Rimbun, Masri, Efendi, Sofyan, *Metodelogi Penelitian Survey*, Jakarta : LP3S, 1986

Warpani, Suwardjoko, *Analisis Kota Dan Daerah*, Bandung : ITB, 1980

Hartono.A.J, *Teknologi Membran Pemurnian Air*, 1994

Riyadi, *Matrix Fungsi*, 2003

Dokumen :

Departemen Pekerjaan Umum Cipta Karya, *Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana Dan Sarana Lingkungan Perdesaan Dan Kota Kecil*, Surabaya, 2002

Pemerintahan Desa, *Profil Desa*, Kota Lhokseumawe, 2000

Pemkot Lhokseumawe, *RTRW, Tahun 2004 – 2014*, Lhokseumawe : 2004